

LAPORAN PENELITIAN:

**TINJAUAN TERHADAP KEADILAN GENDER
DALAM BIDANG
PERTANIAN, IRIGASI DAN PERIKANAN**

PELAKSANA:

**TIM RELAWAN PEREMPUAN UNTUK KEMANUSIAAN
(RPUK)**

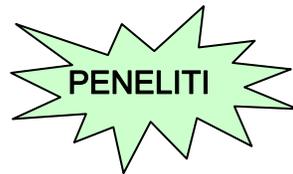
ATAS DUKUNGAN:

BLACK AND VEATCH (BV)



BANDA ACEH

2007



Khairani Arifin	(Penanggung Jawab)
Norma Susanti	(Anggota)
Erni	(Anggota)
Siti Maisarah	(Anggota)
Laila Juari	(Anggota)
Rosnida Sari	(Anggota)
Sulistiyani	(Anggota)
Yasnifa	(Anggota)
Rismawati	(Anggota)
Seri Rahayu	(Anggota)



Shinta Dewi, M.A

Ir. Samsidar



- 1) Brian Bruns
- 2) Totok Hartono (Alm)
- 3) Gary Shea
- 4) Kamaruddin
- 5) Ruruh Basanto
- 6) Susanto
- 7) Fazlullah
- 8) Zulkarnain
- 9) Samsuddin Harahap
- 10) Partomuan Harahap
- 11) Kepala Dinas dan Staf Lapangan Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Sumber Daya Air Kab. Abdya dan Aceh Utara.
- 12) Teman-teman TPP dan FD di Kec. Babah Rot, Tangan-tangan, Kuala Batee, Syamtalira Aron, Syamtalira Bayu, Seunudon dan Matang Kuli.
- 13) Teman-teman Bina Swadaya Kabupaten Aceh barat Daya dan Kab. Aceh Utara
- 14) Pengurus P3A dan masyarakat di desa Padang Bak Jeumpa, Kp. Teungoh dan Pante Rakyat di Aceh Selatan. Desa Puntti, Desa Meunasah Sagoe, Desa Ceubrek Tunong dan Desa Siren Pirak di Aceh Utara.
- 15) Semua Pihak yang telah memberikan Bantuan dalam Penelitian



KATA PENGANTAR

Sejarah mencatat kemampuan perempuan Aceh untuk melakukan hal-hal yang setara dengan laki-laki sungguh tak diragukan lagi. Kendati demikian perempuan Aceh masih sulit mendapatkan pengakuan atas berbagai potensinya. Budaya patriarki yang senantiasa melingkupi menjadi penyebab tersendatnya kiprah para perempuan ini.

Pertanian, perikanan dan irigasi adalah tiga sektor di Aceh yang keterlibatan perempuannya sangat tinggi. Namun perempuan hampir tidak pernah dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan pada ketiga sektor ini. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana peran, posisi, akses, manfaat dan kontrol perempuan dalam ketiga sektor ini. Untuk menjawab rasa keingintahuan tersebut, atas dukungan BRR (Badan rekonstruksi dan Rehabilitasi), RPuK sebagai sebuah lembaga yang konsen pada persoalan-persoalan perempuan melakukan penelitian “Tinjauan terhadap Keadilan Gender dalam Bidang Pertanian, Irigasi dan Perikanan di Nanggroe Aceh Darussalam”. Penelitian ini dilakukan di 6 (enam) desa di Kabupaten Aceh Barat Daya dan Aceh Utara selama 9 (sembilan) bulan.

Ada banyak pihak yang telah berpartisipasi dalam kelancaran proses penelitian ini. RPuK mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena telah berbagi pengalaman, informasi dan dukungan lainnya kepada: BAPPEDA Aceh Barat Daya dan Aceh Utara, Kepala Dinas dan Staf Lapangan Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Sumber Daya Air Kab. Abdyta dan Aceh Utara. Teman-teman TPP dan FD Kecamatan. Babah Rot, Tangan-tangan, Kuala Batee, Syamtalira Aron, Syamtalira Bayu, Seunudon dan Matang Kuli. Teman-

teman Bina Swadaya Kabupaten Aceh Barat Daya dan Aceh Utara. Pengurus P3A dan masyarakat di desa Padang Bak Jeumpa, Kp. Teungoh dan Pante Rakyat di Aceh Selatan. Desa Punt, Desa Meunasah Sagoe, Desa Ceubrek Tunong dan Desa Siren Pirak di Aceh Utara, serta pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu keberhasilan penelitian ini.

Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna untuk itu masukan dan kritikan yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dikemudian hari. Selamat membaca.

RPuK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		
RINGKASAN EKSEKUTIF		1
BAB I	PENDAHULUAN.....	8
	A. Latar Belakang	8
	B. Tujuan Penelitian	12
	C. Metode	12
	D. Lokasi Penelitian	12
	E. Responden.....	13
	F. Pelaksanaan Penelitian	14
	G. Ruang Lingkup Laporan Penelitian	17
BAB II	PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PROGRAM	
	(Pengalaman Beberapa Lembaga)	18
	A. Pengarusutamaan Gender	18
	B. Pengalaman Membuat Panduan Pengarusutamaan.....	21
	1. Program Kementerian Pemberdayaan	21
	2. Asian Development Bank (ADB)	24
	3. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR)	30
	4. Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	38
	5. UNDP (United Nation Development Programme)	48
	6. Oxfam “ Gender Mainstreaming in the Oxfam	48
	7. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) ..	50
BAB III	HASIL PENELITIAN.....	53
	A. Profil Kegiatan Masyarakat	53
	1. Bidang Produktif	54
	2. Bidang Reproduksi	62
	3. Bidang Politik dan Sosial Kemasyarakatan	64
	B. Akses dan Penguasaan Laki-laki dan Perempuan	67
	1. Sumber Daya Alam Dalam Bentuk Tanah	68
	2. Hasil Sumber Daya Alam dari sawah	69
	3. Akses dan Penguasaan Terhadap Informasi	71
	C. Hubungan Kelembagaan	76
	1. Lembaga Pemerintahan Desa	76
	2. Lembaga di Luar Pemerintahan Desa	85
	D. Kebutuhan Dan Harapan	89
BAB IV	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
	A. Kesimpulan	103
	B. Rekomendasi	104
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel Responden	1.1
Tabel Pelaksanaan Penelitian	1.2
Tabel Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam program PKK	2.1
Tabel Indikator Partisipasi dan Peran Aktif Perempuan	2.2

RINGKASAN EKSEKUTIF
HASIL PENELITIAN
TINJAUAN TERHADAP KEADILAN GENDER
DALAM BIDANG PERTANIAN, IRIGASI DAN PERIKANAN

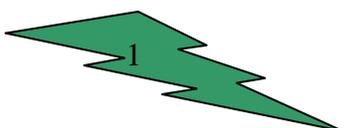
Oleh

Tim Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPUK)

Sejarah mencatat kemampuan perempuan Aceh untuk melakukan hal-hal yang setara dengan laki-laki tidak diragukan lagi. Kendati demikian perempuan Aceh masih sulit mendapatkan pengakuan atas berbagai potensinya. Budaya patriarki yang senantiasa melingkupi menjadi penyebab tersendatnya kiprah para perempuan ini. Situasi yang terlihat saat ini adalah pembangunan kembali Aceh pasca konflik dan bencana, tidak juga membuka ruang partisipasi perempuan yang lebih luas. Dalam pembangunan kembali sektor pertanian dan perikanan sebagai penyokong utama perekonomian masyarakat, keterlibatan perempuan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan sangat minim. Perempuan hampir tidak pernah dilibatkan dalam proses-proses pembangunan di tingkat desa maupun tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.

Berdasarkan persoalan-persoalan di atas, maka dianggap penting untuk melihat dan meneliti kembali peran, posisi, akses, manfaat dan kontrol perempuan dan laki-laki dalam pembangunan khususnya dalam sektor pertanian, pengairan dan perikanan. Persoalan-persoalan yang akan dikaji lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah profil kegiatan masyarakat dan hubungan kelembagaan di desa yang dikaitkan dengan peran perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga maupun aktivitas kemasyarakatan?
2. Bagaimana pengarusutamaan gender dilaksanakan dalam program irigasi, pertanian dan perikanan.



3. Apa saja kebutuhan masyarakat khususnya perempuan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan:

1. Profil kegiatan masyarakat dikaitkan dengan peran perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga dan aktivitas kemasyarakatan.
2. Kesempatan (akses) dan penguasaan (kontrol) laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya dalam bidang pertanian, pengairan dan perikanan.
3. Keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam hubungan kelembagaan di masyarakat berkaitan dengan proses pembangunan di sektor pertanian, pengairan dan perikanan.
4. Harapan dan kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor pertanian, pengairan dan perikanan.
5. Panduan bagi pelaksana lapangan tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di sektor pertanian, pengairan dan perikanan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*) melalui wawancara kelompok/FGD (*Focus Group Discussion*) dan wawancara mendalam.

Selain itu, untuk mendapatkan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Penelitian ini dilakukan di 2 (dua) Kabupaten yaitu Aceh Barat Daya dan Aceh Utara.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Profil Kegiatan Masyarakat yang dilakukan di desa penelitian adalah kegiatan produktif dan kegiatan reproduktif. Kegiatan produktif yang dilakukan oleh masyarakat di desa penelitian umumnya adalah sebagai nelayan, petani tambak, petani, *muge* sayur dan ikan, tenaga upahan, beternak bebek dan ayam serta buruh bangunan.

Dalam melakukan kegiatan Produktif di desa penelitian terdapat perbedaan-perbedaan jenis kegiatan laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh pandangan masyarakat mengenai peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Peran pemenuhan kebutuhan keluarga terbagi antara laki-laki dan perempuan akan tetapi tanggung jawab domestik tidak terbagi dan hanya menjadi beban perempuan. Pandangan masyarakat ikut mempengaruhi dan menetapkan klasifikasi jenis pekerjaan bagi perempuan dan laki-laki sehingga mengakibatkan kemiskinan perempuan semakin meningkat. Penggunaan teknologi juga ikut mempengaruhi tingkat pendapatan perempuan karena perempuan kehilangan akses pekerjaan yang diambil alih oleh teknologi. Sistem keamanan di masyarakat belum terbangun untuk mendukung perlindungan perempuan yang bekerja di ranah publik. Akses perempuan terhadap peningkatan SDM dan akses terhadap informasi yang lemah membuat posisi perempuan tidak seimbang dengan laki-laki di ranah publik. Interpretasi agama yang tidak sensitif pada perempuan juga ikut memosisikan perempuan untuk terus bekerja di wilayah domestik.

Jenis-jenis kegiatan reproduktif dominan di desa penelitian adalah, memasak, membersihkan rumah, mencuci piring dan baju, mengantar anak ke sekolah, posyandu dan puskesmas, mengurus keperluan suami dan anak-anak, mendidik anak.

Kegiatan di bidang reproduktif merupakan kegiatan yang paling banyak dibebankan kepada perempuan. Selain harus melakukan kerja produktif, dalam waktu bersamaan perempuan juga harus menyelesaikan tugas-tugas reproduktifnya. Beban ganda yang dialami perempuan dalam kehidupannya menyebabkan perempuan sangat sedikit terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan dalam pembangunan desa.

Dalam bidang politik dan sosial kemasyarakatan, jenis-jenis kegiatan yang dominan dilakukan oleh masyarakat dalam bidang politik adalah pertemuan dan rapat-rapat desa untuk mengambil keputusan, baik yang berkaitan dengan pembangunan desa maupun keputusan di bidang kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Dalam bidang sosial kemasyarakatan aktivitas dominan yang dilakukan adalah, wirid yasin, pengajian, samadiah, perayaan atas pernikahan, sunatan rasul, peusijuek, syukuran dan kelahiran anak, menjenguk orang sakit dan melayat orang meninggal, maulid nabi, *kenduri blang*, dan lain-lain.

Dalam melakukan kegiatan politik, pengambilan keputusan di desa pada umumnya dilakukan oleh elit pemerintahan desa (*Kepala Desa, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imuem*) dan orang-orang terpandang atau kelompok berpengaruh lainnya. Dalam kondisi khusus masyarakat laki-laki terlibat cukup baik untuk merumuskan kebijakan desa. Partisipasi perempuan sangat minim, kehadiran perempuan hanya sebatas kehadiran saja dan tidak untuk berkontribusi dalam pemberian ide dan masukan dalam keputusan yang diambil. Keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan belum dianggap sebagai prioritas, khususnya dalam membicarakan hal-hal penting berkaitan dengan proses pembangunan desa, misalnya dalam pertemuan P3A. Dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, keterlibatan perempuan dan laki-laki seimbang.

Akses dan Penguasaan Laki-laki dan Perempuan Terhadap Sumber Daya dan Informasi, laki-laki memiliki akses dan menguasai sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya sosial dan sumber daya informasi. Perempuan memiliki akses yang minim dan tidak menguasai sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya informasi.

Dalam hubungan kelembagaan perempuan tidak ditemukan ada dalam struktur kepengurusan P3A, kecuali P3A di Kec. Syamtalira Aron-DI. Krueng Pase Kanan. Pada P3A ini pun belum dapat dilihat proses pengambilan keputusan yang melibatkan perempuan secara maksimal, karena pengurus belum lama terpilih dan belum menjalankan peran-perannya secara maksimal. Pada P3A lain, yang pengurusnya didominasi laki-laki dan sedikit

sekali perempuan. Proses pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh laki-laki, padahal anggotanya yang perempuan jumlahnya tidak dapat dikatakan sedikit walaupun keanggotaannya karena mengikuti posisi keanggotaan suami. Rapat anggota dengan pengurus P3A jarang dilakukan, biasanya pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh pengurus.

Lembaga-lembaga lain yang terlibat melakukan penguatan dan pendampingan juga tidak melakukan perubahan terhadap kondisi ini, baik di tingkat internal maupun di kelompok masyarakat yang didampingi, bahkan di tingkat konsultan. Jumlah staf lapangan didominasi oleh laki-laki, sehingga pendekatannya lebih terfokus pada kelompok laki-laki, dengan alasan pekerjaan seperti ini membutuhkan kemampuan fisik semata, walaupun programnya bernama “konstruksi partisipatif”.

Peluang peningkatan kapasitas dan mendapatkan bantuan sebagian besar dikuasai oleh pengurus, sehingga akses perempuan semakin jauh, karena mereka bukan pengurus. Pengorganisasian untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya (kelompok nelayan, petambak dll) masih minim, khususnya kelompok perempuan, Jikapun sudah dilakukan sejauh ini belum mampu memberdayakan perempuan.

Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat baik oleh pemerintah maupun lembaga lainnya umumnya tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu dan tidak sesuai kebutuhan. Pengorganisasian untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya (kelompok nelayan, petambak dll) masih minim, khususnya kelompok perempuan, Jikapun sudah dilakukan sejauh ini belum mampu memberdayakan perempuan. Tahapan kegiatan, sering tidak dilaksanakan secara sistematis dan sesuai kebijakan yang ditetapkan. Staf lapangan belum mempunyai perspektif gender yang memadai. Selain itu dalam proses pelaksanaan proyek, keterlibatan masyarakat masih sangat minim, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring.

Dalam lembaga-lembaga formal yang ada di desa jumlah perempuan dalam struktur pemerintahan desa sangat minim (kecuali sebagai pengurus PKK). Sehingga pengambilan keputusan di desa hampir tidak melibatkan perempuan. Lembaga-lembaga pemberi bantuan (baik pemerintah maupun lembaga lainnya) masih melihat masyarakat sebagai objek (penerima), sehingga pelaksanaan proyek sering tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Koordinasi antara lembaga pemberi bantuan sangat lemah, baik koordinasi di tingkat internal (misal: garis koordinasi yang tidak jelas, atau tumpang tindih jabatan, dll) maupun koordinasi dengan lembaga lain.

Pertemuan-pertemuan untuk merumuskan dan merencanakan pembangunan desa, sebagian besar hanya melibatkan perangkat desa. Dan hanya sebagian kecil yang melibatkan komunitas, itupun biasanya hanya kelompok-kelompok menengah di desa, misalnya pemuka-pemuka masyarakat dan kelompok orang kaya (pengusaha dll).

Kebijakan-kebijakan tentang Penerapan PUG dalam program, tidak diimplementasikan walaupun sudah ditetapkan (contoh: Check List yang dibuat ADB belum sepenuhnya dijadikan acuan, sehingga tidak ada data terpilah, tidak ada penyediaan anggaran khusus untuk perempuan dll).

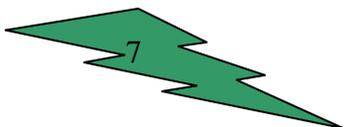
Pengetahuan dan pemahaman gender di instansi pemerintahan maupun lembaga pemberi bantuan lainnya, termasuk program-program BV masih sangat minim sehingga penyusunan dan implementasi program belum responsif gender.

Untuk berbagai masalah di atas, dibutuhkan:

1. Training-training gender untuk tingkat pengambil kebijakan dan staf lapangan sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program dapat dilakukan dengan lebih berkeadilan gender.

2. Perlu sebuah buku panduan bagi pelaksana lapangan untuk memudahkan pelaksanaan program yang berkeadilan gender.
3. Perlu menambah tenaga kerja perempuan, baik di tingkat pengambil kebijakan, maupun di tingkat pelaksana lapangan, sehingga akses perempuan untuk bekerja di bidang pertanian, irigasi dan perikanan meningkat.

*Keadilan
Gender
Dalam
Pertanian,
Irigasi &
Perikanan*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partisipasi perempuan di segala bidang pembangunan masih rendah. Keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam berbagai tingkatan juga masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari representasi perempuan di parlemen. Di DPR RI hanya terisi 11% perempuan dari keseluruhan anggota, sementara di DPRD seluruh Indonesia sebanyak 21% (data KPP/Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia 2006, seperti dilansir Harian Suara Merdeka 1 Agustus 2006). Jumlah ini belum signifikan mengingat populasi perempuan yang melebihi separuh jumlah penduduk Indonesia. Hal ini menyebabkan kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak mengakomodir kebutuhan dan persoalan perempuan.

Selain itu banyak kasus-kasus yang terjadi yang disebabkan oleh ketidakadilan gender seperti kekerasan terhadap perempuan, perdagangan perempuan dan kasus lainnya yang terus meningkat. Untuk itu peran perempuan sebagai pemangku kebijakan sangat dibutuhkan guna meminimalisir kasus-kasus ini dan mendorong terciptanya kesetaraan dan keadilan gender.

Kondisi perempuan di Aceh tidak jauh berbeda dengan kondisi perempuan di Indonesia secara umum. Aceh memiliki sejarah yang layak untuk dikaji tentang kiprah para perempuannya. Nama-nama seperti Taj'al-Alam Tsafiatu'ddin, Nurul Alam, Inayat Zakiatu'ddin Syah, dan Kamalat Syah telah tercatat sebagai raja-raja perempuan di Aceh. Demikian juga dengan Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, T. Fakinah, juga Laksamana Malahayati turut menorehkan sejarah kepemimpinan perempuan Aceh. Tercatat pula perempuan-perempuan yang menduduki posisi Uleebalang, seperti Cut Nyak

Karti di Keureutu dan Cut Nyak Fatimah di salah satu mukim di Aceh Barat. Perempuan-perempuan ini telah membuktikan bahwa perempuan juga layak dan mampu menjadi pemimpin yang cakap, baik sebagai negarawan ataupun pemimpin perang.

Pada masa pemerintahan Taj'al-Alam contohnya, telah berhasil mengadakan pembaharuan dan menyebarkan pemahaman mengenai demokratisasi. Upaya untuk memberdayakan perempuan juga telah dilakukannya, salah satunya adalah dengan menambah 18 perempuan sebagai anggota Badan Mahkamah.

Berjenis kelamin perempuan juga tidak menyurutkan dukungan para menteri terhadap Taj'al-Alam. Ulama-ulama besar seperti Syah Nuru'ddin Ar-Raniri dan Syekh Abdur Ra'uf bahkan turut memberi dukungan kuat kepada Taj'al-Alam. Hal ini menunjukkan progresifnya kalangan agamawan untuk menerima pemimpin perempuan pada masa itu. Dukungan tersebut sangat membantu Taj'al-Alam untuk berkuasa selama 34 tahun dengan gemilang.

Dukungan terhadap pemimpin perempuan di Aceh ternyata tidak berlangsung lama. Pada masa pemerintahan Kamalat Syah muncul gerakan yang menentang perempuan menjadi raja. Saat itu Agama telah dijadikan alat untuk kepentingan politik. Pihak yang menentang Kamalat Syah menjadi raja berangkat ke Mekkah dan mendapatkan fatwa bahwa perempuan tidak boleh menjadi raja. Atas dasar fatwa inilah Kamalat Syah kemudian dijatuhkan dari kursi kekuasaannya. Setelah kepemimpinannya tidak lagi ditemukan catatan tentang negarawan perempuan di Aceh. Meskipun demikian perempuan-perempuan Aceh hingga kini masih terus berusaha menunjukkan kekuatan untuk memperjuangkan hidup yang setara dan berkeadilan (H. Mohammad Said, Aceh Sepanjang Abad, 1981 (cetakan kedua).

Perjuangan ini terus berlanjut dalam berbagai kondisi dan perubahan politik yang terjadi di Aceh. Pada masa konflik bersenjata di Aceh, perempuan-

perempuan Aceh menghadapi beragam persoalan. Banyak perempuan yang terpaksa menjadi janda karena para suami hilang atau terbunuh. Anggota keluarga lain yang laki-laki pun banyak yang terpaksa pergi jauh meninggalkan rumah atau berada di rumah sepanjang hari karena alasan keamanan. Hal ini mengkondisikan perempuan Aceh menjadi tumpuan hidup keluarga dan mengambil peran-peran dalam masyarakat yang selama ini dilakukan oleh laki-laki. Ternyata dalam kondisi ini perempuan Aceh tetap *survive* untuk mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga dan masyarakatnya. Contohnya ketika kepemimpinan di desa kosong pada saat konflik, perempuan mengambil peran-peran kepemimpinan di desa dan berhasil menjalankan pemerintahan di desa secara adil.

Keadilan
Gender
Dalam
Pertanian,
Irigasi &
Perikanan

Demikian pula setelah tsunami melanda Aceh pada Desember 2004, perempuan-perempuan korban tsunami tetap bertahan hidup dan menunjukkan kemandirian dalam berbagai bidang. Dengan modal usaha dan ketrampilan-ketrampilan yang diberikan berbagai LSM, kapasitas perempuan menjadi sedikit meningkat. Namun kenyataannya banyak lembaga dalam menjalankan programnya tidak memberdayakan dan minim partisipasi perempuan.

Pengalaman perempuan Aceh dari masa ke masa telah memberikan pembelajaran tersendiri. Perempuan Aceh yang mandiri menjadi terbiasa membuat pilihan dan mengambil keputusan, walaupun masih sangat banyak perempuan yang belum mampu melakukannya. Hal ini tidak terlepas dari budaya patriarki yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Budaya ini meng subordinasi kaum perempuan. Perempuan masih dianggap sebagai warga kelas dua setelah laki-laki yang selayaknya ditempatkan di wilayah domestik: dapur, sumur dan kasur. Parahnya, budaya patriarki juga memisahkan pikiran perempuan itu sendiri, sehingga mereka pun meyakini bahwa tempat mereka memang di ranah domestik. Hal ini mempersempit peluang perempuan untuk berkiprah di ranah publik. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan, akses terhadap informasi yang rendah membuat

perempuan tidak dapat bersaing dengan laki-laki untuk memegang posisi-posisi kunci di pemerintahan. Tidak banyak pemimpin perempuan di Aceh, baik untuk jabatan eksekutif maupun legislatif.

Pembangunan kembali Aceh pasca konflik dan bencana ternyata tidak juga memberikan ruang partisipasi perempuan secara luas. Dalam sektor pertanian dan perikanan yang merupakan penyokong utama perekonomian masyarakat Aceh, keterlibatan perempuan dalam kesehariannya sangat tinggi. Tetapi dalam proses pembangunan kembali, keterlibatan perempuan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan sangat minim. Perempuan hampir tidak pernah dilibatkan dalam proses-proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan lainnya baik di tingkat desa maupun di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Berdasarkan persoalan-persoalan di atas, maka dianggap penting untuk melihat dan meneliti kembali peran, posisi, akses, manfaat dan kontrol perempuan dan laki-laki dalam pembangunan khususnya dalam sektor pertanian, pengairan dan perikanan.

Persoalan-persoalan yang akan dikaji lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah profil kegiatan masyarakat dikaitkan dengan peran perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga dan aktivitas kemasyarakatan?
2. Bagaimanakah kesempatan (akses) dan penguasaan (kontrol) laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya dalam bidang pertanian, pengairan dan perikanan?
3. Bagaimanakah keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam hubungan kelembagaan di masyarakat berkaitan dengan proses pembangunan di sektor pertanian, pengairan dan perikanan?
4. Apa saja yang menjadi harapan dan kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor pertanian, pengairan dan perikanan?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan:

1. Profil kegiatan masyarakat dikaitkan dengan peran perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga dan aktivitas kemasyarakatan.
2. Kesempatan (akses) dan penguasaan (kontrol) laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya dalam bidang pertanian, pengairan dan perikanan.
3. Keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam hubungan kelembagaan di masyarakat berkaitan dengan proses pembangunan di sektor pertanian, pengairan dan perikanan.
4. Harapan dan kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor pertanian, pengairan dan perikanan.
5. Panduan bagi pelaksana lapangan tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di sektor pertanian, pengairan dan perikanan.

C. Metode

Studi ini menggunakan Metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*) melalui wawancara kelompok/FGD (*Focus Group Discussion*) dan wawancara mendalam. Metode PRA adalah cara yang digunakan dalam melakukan kajian untuk memahami keadaan atau kondisi desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, untuk mendapatkan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 2 (dua) Kabupaten yaitu Aceh Barat Daya dan Aceh Utara. Di Aceh Barat Daya, desa yang dipilih untuk menjadi lokasi penelitian adalah:

1. Desa Padang Bak Jeumpa Kecamatan Tangan-Tangan.

2. Desa Kampong Teungoh Kecamatan Kuala Batee.
3. Desa Pante Rakyat Kecamatan Babah Root.

Di Aceh Utara, desa yang dipilih untuk menjadi lokasi penelitian adalah:

1. Desa Puntir Kecamatan Syamtalira Bayu.
2. Desa Meunasah Sagoe Kecamatan Seunudon.
3. Desa Matang Lada Kecamatan Seunudon.
4. Desa Siren Pirak Kecamatan Matang Kuli.
5. Desa Cibrek Tunong Kecamatan Syamtalira Arun.

Kedua kabupaten dan desa-desa ini dipilih karena pada lokasi-lokasi tersebut masyarakatnya banyak beraktivitas dalam sektor pertanian, pengairan dan perikanan.

E. Responden

Responden dalam penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan aspek gender. Responden dalam penelitian ini berjumlah 390 orang yang terdiri dari berbagai unsur, yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1.
RESPONDEN

No	Unsur	Jumlah
1.	Staf program dan staf lapangan Dinas Pertanian	48 orang
2.	Staf program dan staf lapangan Dinas Sumber D Air/Pengairan	48 orang
3.	Staf program dan staf lapangan Dinas Perikanan	48 orang
4.	TPP (Tenaga Pendamping Petani) dan FD (Fasilitator Desa)	24 orang
5.	KTPP (Koordinator Tenaga Pendamping Petani)	2 orang

6.	CMS (Community Mobilizing Specialist)	2 orang
7.	CPS (Community Participation Specialist)	2 orang
8.	Petani perempuan	108 orang
9.	Petani, nelayan dan petambak laki-laki	36 orang
10.	Pengurus dan anggota P3A (Perkumpulan Petani Pengguna Air) perempuan	14 orang
11.	Pengurus dan anggota P3A (Perkumpulan Petani Pengguna Air) laki-laki	58 orang
	TOTAL	390 orang

Keadilan
Gender
Dalam
Pertanian,
Irigasi &
Perikanan

F. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan Penelitian ini dimulai sejak bulan Desember 2006 sampai dengan Juli 2007 yang dilakukan dalam beberapa tahapan, yang secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2.
PELAKSANAAN PENELITIAN

NO	AKTIVITAS	WAKTU	KETERANGAN
1	Konsolidasi Tim	Minggu I dan II Desember 2006	Kegiatan dilakukan untuk mensosialisasikan rencana penelitian kepada seluruh anggota tim peneliti dan staf RPuK lainnya.
2	Koordinasi dengan Pihak Black and Veatch (BV)	Minggu ke III Desember 2006	Kegiatan ini dilakukan untuk memperjelas alur penelitian dan anggaran
3	Pertemuan dengan Dinas Perikanan dan Pertanian di Banda Aceh, Aceh Utara dan Aceh	Minggu Ke IV Desember 2006 – Minggu ke III Januari 2007	Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi awal tentang pelaksanaan program pada dinas terkait baik berupa dokumen maupun informasi

	Barat Daya		lainnya.
4	Konsultasi dengan Konsultan	Minggu ke IV Januari 2007	Kegiatan ini dilakukan untuk mendiskusikan alur, format, isi dan referensi penelitian.
5	Traning PRA untuk Peneliti	Minggu I Februari 2007	Dilakukan untuk peningkatan kapasitas tim peneliti dalam memahami dan menggunakan alat-alat PRA (<i>Participatory Rural Appraisal</i>).
6	Studi dokumen lembaga-lembaga tentang cara merencanakan dan mengimplemen tasikan Pengarus utamaan Gender (PUG) dalam program	Minggu II sampai dengan Minggu Ke IV Februari 2007	Mempelajari literatur, strategi gender dan pengalaman sukses oleh berbagai lembaga dalam menerapkan PUG.
7	Penyusunan daftar pertanyaan dan metode	Minggu 1 Maret 2007	Dilakukan untuk menyamakan konsep tim peneliti tentang informasi apa saja yang harus didapatkan dari responden.
8	Wawancara dengan lembaga-lembaga terkait tentang cara merencanakan dan mengimplemen tasikan Pengarus utamaan Gender (PUG) dalam program	Minggu I – Minggu ke III Maret 2007	Mempelajari dan mendapatkan informasi sebagai perbandingan dalam pelaksanaan PUG yang dilakukan oleh PPK, PEKKA, OXFAM, WORLD VISION, UNDP, KKTGA, MUSLIM AID, IDLO, CIDA, P2KP, SATKER BRR.
9	FGD dengan Staf	Minggu Ke IV	Dilakukan untuk mendapatkan

	Lapangan Dinas Pertanian, Sumber Daya Air/Pengairan, Kelautan dan Perikanan di Aceh Barat Daya dan Aceh Utara	Maret – Minggu ke I April 2007	informasi tentang pelaksanaan PUG sesuai Inpres No. 9 Tahun 2000.
10	Simulasi FGD komunitas	Minggu ke II April 2007	Dilakukan untuk <i>try-out</i> PRA di Desa Lam Pegeu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.
11	Finalisasi draft dan metode	Minggu ke III April 2007	Dilakukan untuk mendapatkan rumusan pertanyaan dan metode yang tepat berdasarkan hasil <i>try-out</i> PRA.
12	Wawancara dengan KTPP, CMS dan CPS	Minggu Ke III-IV April 2007	Aceh Barat Daya dilakukan wawancara dengan Susanto (CPS), Samsudin Harahap (KTPP), Partomuan Harahap (CMS). Aceh Utara dilakukan wawancara dengan Ruruh Basanto (CPS), Zulkarnaen (CMS), Fazlullah (KTPP)
13	FGD dengan P3A	Minggu ke IV April 2007	Aceh Barat Daya dilakukan FGD dengan P3A di Desa Padang Bak Jeumpa, Desa Kampung Tengoh, Desa Pante Rakyat. Aceh Utara dilakukan P3A di Desa Punti, Desa Siren Pirak, Desa

			Cibrek Tunong.
14	FGD FD dan TPP	Minggu ke IV April 2007	Dilakukan di Blang Pidie dan Lhokseumawe
15	FGD dan wawancara dengan Masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya dan Aceh Utara	Minggu I Mei S/d Minggu ke IV Juni 2007	Desa Padang Bak Jeumpa, Kp. Teungoh, Pante Rakyat, Desa Punti, Desa Sagoe dan Desa Matang Lada.
16	Penulisan Laporan	Juli 2007	

G. Ruang lingkup Laporan Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam Laporan Penelitian ini terdiri dari: Bab I adalah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, metode, responden lokasi penelitian dan pelaksanaan kegiatan.

Bab II adalah landasan teoritis dan pengalaman sukses lembaga-lembaga lain yang telah melakukan program di masyarakat.

Bab III adalah hasil penelitian mengenai profil kegiatan masyarakat, akses dan kontrol perempuan dan laki-laki, hubungan kelembagaan, dan kebutuhan dan harapan perempuan.

Bab IV adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

B A B II

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PROGRAM (PENGALAMAN BEBERAPA LEMBAGA)

*Keadilan
Gender
Dalam
Pertanian,
Irigasi &
Perikanan*

A. Pengarusutamaan Gender

Istilah gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan perbedaan laki-laki dan perempuan yang merupakan bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan.

Istilah pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) tercantum dalam *Beijing Platform of Action* pada tahun 1995 dengan pengertian sebagai berikut:

Gender Mainstreaming is a strategy for integrating gender concerns in the analysis formulation and monitoring policies, programs and projects.

Lebih lanjut lagi Inpres RI No.9 Tahun 2000 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Oleh karena itu pengarusutamaan gender menjamin seluruh kebijakan program dan proyek pada setiap sektor pembangunan telah memperhitungkan aspek gender. Hal ini dilakukan dengan melihat laki-laki dan perempuan sebagai pelaku yang setara dalam akses, partisipasi dan kontrol atas pembangunan serta dalam memanfaatkan hasil pembangunan. Dengan demikian hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat dapat ditegakkan.

Berdasarkan Inpres tersebut, tujuan pengarusutamaan gender dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender.
- Memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi, sebagai dampak dari bias gender.
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik pemerintah maupun nonpemerintah sehingga mau melakukan tindakan yang sensitif gender di bidang masing-masing. (Bahan Pembelajaran PUG, hal 120)

Strategi pengarusutamaan gender berupaya untuk menjawab adanya ketidakadilan gender dengan mengintegrasikan kerangka analisis gender yang merupakan suatu kerangka konseptual yang dilandasi kesadaran adanya kemungkinan perbedaan kapasitas, potensi, aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki di dalam setiap tahap proses pembangunan di berbagai sektor maupun lintas sektor.

Pada prinsipnya PUG merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki di dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. (Meneg PP, Panduan Pelaksanaan Inpres No.9 Tahun 2000, Jakarta: Meneg PP, 2000, hal 3-4)

PUG penting untuk memastikan apakah perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, apakah perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, apakah perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan control terhadap pembangunan, dan apakah perempuan dan laki-laki dapat menikmati hasil pembangunan tersebut. Tujuan paling

akhir dari pengarusutamaan gender adalah mempersempit dan bahkan meniadakan kesenjangan gender yang mengantarkan pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

Keadilan dan kesetaraan gender berusaha diwujudkan dengan program dan proyek-proyek pembangunan, yang sensitif dan responsive terhadap kebutuhan gender, baik yang sifatnya praktis maupun yang strategis. Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan strategi ini adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi kebutuhan praktis sebagaimana didefinisikan oleh perempuan dan laki-laki untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka; menangani kebutuhan strategis perempuan;
- Menangani kebutuhan strategis golongan ekonomi lemah melalui pembangunan untuk rakyat. (Sri Mastuti dan Rinusu, 2003: hal 14)

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial antara perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. (Bahan Pembelajaran PUG, 2005: hal, 38)

Prinsip-prinsip dalam mensosialisasikan PUG dan penerapannya di Indonesia:

1. Pluralistis, yaitu menerima keragaman budaya, agama dan adat istiadat (pluralistik).
2. Bukan pendekatan dikotomis, maksudnya dalam rangka pengarusutamaan gender tidak melalui pendekatan yang harus selalu mempertimbangkan antara kepentingan laki-laki dan perempuan
3. Melalui proses sosialisasi dan advokasi, prinsip ini bermakna melalui perjuangan dan penerapan secara bertahap dan terus dilakukan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender dapat diterapkan.

4. Menjunjung nilai HAM dan demokratisasi, penerapan PUG di Indonesia dilakukan dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan demokratisasi.(PUG,2005:hal 39).

B. Pengalaman Membuat Panduan Pengarusutamaan Gender di Beberapa Lembaga

Beberapa lembaga telah mengeluarkan panduan untuk mengimplementasikan program pengarusutamaan gender, namun tidak banyak lembaga yang secara khusus membuat panduan untuk sektor-sektor pertanian, perikanan, dan pengairan. Berikut dijabarkan tentang panduan-panduan yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut.

1. Program Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia

Dalam melakukan perencanaan kebijakan, program, proyek, maupun kegiatan pembangunan, dapat digunakan GAP (*Gender Analysis Pathway*) AKAG (Alur Kerja Analisis Gender). GAP merupakan salah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh BAPENAS yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek, dan atau kegiatan pembangunan. Dengan menggunakan GAP, para perencana kebijakan/ program/ proyek/ kegiatan dapat mengidentifikasi kesenjangan dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/ program/ proyek/ kegiatan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut.

Terdapat 8 (delapan) langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan GAP. Langkah-langkah tersebut terbagi dalam 3 tahap:

- a. Tahap 1: Analisis kebijakan responsif gender

Tahap ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan yang ada dan menggunakan data pembuka wawasan yang dipilah menurut jenis kelamin, untuk kemudian diidentifikasi adanya kesenjangan gender (*gender gap*) dan permasalahan gender (*gender issues*). Pada tahap ini terdapat 4 (empat) langkah yang harus dilakukan, yaitu:

➤ Langkah 1: Identifikasi tujuan dan atau sasaran kebijakan/ program/ proyek/ kegiatan pembangunan saat ini. Dalam kaitannya dengan hal ini beberapa pertanyaan dapat diajukan, seperti: Tujuan dan/atau sasaran kebijakan/ program/ proyek/ kegiatan pembangunan apa saja yang telah dirumuskan/ ditetapkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender? Apakah komitmen tersebut telah diintegrasikan dalam tujuan dan atau sasaran kebijakan/ program/ proyek/ kegiatan pembangunan tersebut? Apabila belum/ tidak, apa yang perlu dilakukan?

➤ Langkah 2: Sajikan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang terpilah menurut jenis kelamin sebagai data pembuka wawasan (*eye opener data*). Data kualitatif dan kuantitatif dapat digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang ada saat ini memberikan dampak yang berbeda kepada perempuan dan laki-laki sekaligus dapat digunakan untuk menentukan perspektif/dimensi gender yang akan dirumuskan. Data itu harus dipilah menurut jenis kelamin (perempuan dan laki-laki), sehingga para perencana dapat memahami adanya perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan antara perempuan dan laki-laki.

➤ Langkah 3: Analisis sumber terjadinya dan/atau faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender. Untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender, dapat digunakan 4 (empat) faktor utama, yaitu: akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat. Untuk itu

pertanyaan dasar dapat diajukan seperti: Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber-sumber daya pembangunan? Siapa yang menguasai sumber-sumber daya pembangunan? Bagaimana partisipasi perempuan dan laki-laki dalam berbagai tahapan pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan? Apakah perempuan dan laki-laki dapat memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan atau sumber-sumber daya pembangunan yang ada?

➤ Langkah 4: Identifikasi masalah-masalah gender (*gender issues*).

Dalam langkah ini dapat mengidentifikasi masalah-masalah kesenjangan gender. Pertanyaan dasar yang dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan gender: Apa masalah gender yang diungkap oleh faktor-faktor kesenjangan gender? Di mana terjadinya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki? Apakah kesenjangan terjadi di wilayah publik dan atautkah terjadi di wilayah domestik, mengapa terjadi kesenjangan gender tersebut? Apakah kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang ada justru memperlebar kesenjangan tersebut, mempersempit kesenjangan gender tersebut atau tetap? Apakah akar permasalahannya?

b. Tahap II : Formulasi kebijakan yang responsif gender. Tahap ini terbagi menjadi 2 (dua) langkah, yaitu :

➤ Langkah 1: Rumuskan kembali kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang baru yang responsif gender. Pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan dapat membantu mengarahkan kembali kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan agar responsif gender: Langkah-langkah apa yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan yang ada? Bagaimana pemerintah dapat memperkecil atau menghilangkan kesenjangan gender tersebut? Bagaimana dapat memastikan bahwa perempuan dapat

berpartisipasi lebih optimal dalam proses pembangunan dan mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan tersebut? Alternatif kebijakan /program/proyek/.kegiatan pembangunan apa yang harus dikembangkan untuk memperkecil /menghilangkan kesenjangan gender dan masalah-masalah gender? Rumusan tujuan yang bagaimana yang dapat menjamin kesetaraan dan keadilan gender pada kelompok sasaran?

➤ Langkah 2: Identifikasi indikator gender (*gender indicator*). Pada langkah ini pertanyaan yang dapat dirumuskan seperti: Indikator kuantitatif dan/atau kualitatif apa saja yang dapat diidentifikasi untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang responsif gender? Indikator apa saja yang dapat menjelaskan apakah faktor-faktor kesenjangan sudah berkurang, tetap, atau bahkan melebar? Apakah ukuran kesetaraan dan keadilan gender?

c. Tahap III : Rencana aksi yang responsif gender. Pada tahap ini menyusun rencana aksi yang responsif gender, terdiri dalam 2 (dua) langkah, yaitu :

➤ Langkah 1: Penyusunan rencana aksi. Rencana aksi yang disusun bertujuan mengurangi, menghilangkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki sesuai kebijakan yang responsif gender.

➤ Langkah 2: Identifikasi sasaran (kualitatif dan/ atau kuantitatif) untuk setiap rencana aksi. (Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 2000: hal 12)

2. Asian Development Bank (ADB)

Panduan pelaksanaan *Gender and Development (GAD)* yang dirumuskan dalam Daftar Periksa (checklist) Gender oleh ADB merupakan

salah satu pedoman strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Panduan pelaksanaan ini ditujukan sebagai daftar periksa bagi proyek-proyek penyediaan air dan sanitasi di pedesaan dan proyek perkotaan yang berbasis masyarakat. Proyek-proyek penyediaan air dan sanitasi yang ditangani oleh ADB menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara perhatian pada gender dan partisipasi kaum perempuan di satu pihak, dengan tingkat keberhasilan proyek dan kesinambungan pengelolaan penyediaan air dan sanitasi di pihak lain.

Sebuah proyek penyediaan air dan sanitasi harus memperhatikan kendala-kendala partisipasi kaum perempuan dalam desain proyek, konstruksi, operasional dan pemeliharaan (O&M), pelatihan, serta monitoring dan evaluasi (M&E). Proyek tersebut juga harus memperhatikan hubungan antara gender dan kemiskinan dengan mengidentifikasi, misalnya rumah tangga yang dikepalai kaum perempuan dan kebutuhan khusus rumah tangga.

Teknik-teknik meningkatkan keadilan gender dalam pembangunan pedesaan yang dilakukan oleh ADB adalah dengan menggunakan:

- a. Metodologi tinjau ulang, yaitu dengan meninjau informasi yang tersedia atas layanan-layanan yang diberikan di wilayah proyek dan profil sosio-ekonomi dari populasi target sasaran. Kemudian juga dilakukan peninjauan ulang terhadap aspek perundang-undangan yang terkait dan kerangka kerja kelembagaan dan implikasi gendernya. Selain itu juga dilakukan survey ke rumah tangga untuk mendapatkan gambaran profil sosial ekonomi yang terpilah berdasarkan gender atau jenis kelamin dan identifikasi praktek-praktek penyediaan air dan sanitasi, kendala-kendalanya dan kebutuhan-kebutuhan populasi target sasaran.
- b. Metodologi partisipatif, yaitu untuk mengumpulkan informasi kualitatif yang tidak dapat dikumpulkan melalui survey, dalam metode ini juga harus ditentukan cara-cara di mana kaum laki-laki dan kaum

perempuan yang mendapat manfaatnya dan *stakeholder* lainnya, khususnya kaum perempuan miskin dapat berpartisipasi di dalamnya. Petakan wilayah-wilayah target sasaran serta identifikasi kelompok-kelompok *stakeholder* utama dan peran mereka.

Kerangka analisis gender untuk pertanian yang digunakan oleh ADB memiliki empat bagian dan dilaksanakan dalam dua langkah utama, pertama dilakukan pengumpulan informasi untuk profil kegiatan dan profil akses dan pengendalian. Kemudian informasi ini digunakan dalam analisis faktor-faktor dan kecenderungan yang mempengaruhi kegiatan serta akses dan pengendalian, dan dalam analisis siklus proyek.

Analisis gender untuk subsektor pertanian dilakukan dengan menggunakan dasar pertimbangan untuk masing-masing subsektor yang terkait dengan kegiatan kaum laki-laki dan perempuan serta pola pengendalian dan akses yang dipilah berdasarkan gender.

Menurut daftar periksa gender yang digunakan oleh ADB, untuk melihat isu gender, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Melihat isu utama, apakah kaum laki-laki dan kaum perempuan dibedakan dalam pemakaian air dan kebutuhan irigasi dimasa depan?. Apakah kaum perempuan yang khusus bekerja di pertanian membutuhkan akses air irigasi? Bagaimana dampak intensifikasi produk karena proyek irigasi terhadap perempuan? Bagaimana pola bertanam mempengaruhi kaum perempuan? Bagaimanakah kaum perempuan dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan tenaga kerja dan pelayanan yang diciptakan dalam tahap implimentasi proyek? Apakah terdapat perkumpulan pemakai air? Dapatkah kaum perempuan menjadi anggotanya? Apakah saat ini kaum perempuan terlibat dalam pengelolaan air? Apakah mereka mempunyai peran dalam menyelesaikan perselisihan pengelolaan air? Apakah lembaga pelaksana proyek mempunyai kapasitas untuk mengarusutamakan

GAD dalam proyek? Apakah lembaga pelaksana mempunyai tenaga kerja perempuan?

- b. Strategi-strategi utama, dalam melihat strategi utama pada sektor pertanian sangat perlu memperhatikan perbedaan penggunaan air di wilayah proyek. Masukkan tindakan untuk menghindari potensi konflik diantara penggunaan yang bersaing, untuk mengatasi kendala waktu, rancanglah perbaikan sistem air khusus untuk laki-laki dan khusus untuk kaum perempuan, masukkan ketentuan efektifitas biaya dalam proyek untuk memenuhi kebutuhan penggunaan air irigasi atau penggunaan air non irigasi (seperti untuk ternak, kolam ikan, tempat pencucian, kebun tanaman pangan keluarga, dan air minum). Selanjutnya jika irigasi dikaitkan dengan perubahan pemilikan tanah, dampingi kaum perempuan agar menjadi pemilik tanah bersama kaum laki-laki, libatkan penerima manfaat, baik kaum perempuan maupun laki-laki dalam mendesain proyek dan pembuatan keputusan mengenai lokasi saluran dan infrastruktur lainnya. Dalam mendesain proyek, masukan tunjangan khusus untuk tenaga kerja perempuan. Pertimbangkan untuk melakukan pembangunan dan penguatan kapasitas lembaga pelaksana untuk mengembangkan dan mengimplimentasikan proyek yang memasukkan aspek gender. Berikan fasilitas partisipasi kaum perempuan dalam perkumpulan pemakai air. Pertimbangkan untuk menetapkan target jumlah kaum perempuan yang disertakan dalam perkumpulan pemakai air. Pertimbangkan merekrut organisasi non pemerintah untuk memobilisasi dan melatih kaum perempuan agar berpartisipasi dalam perkumpulan-perkumpulan pemakai dan pengelola air. Jika keanggotaan pemakai air didasarkan pada kepemilikan tanah, lakukan eksplorasi peluang untuk memasukkan keanggotaan bersama suami dan istri. Apabila tenaga pelaksana hanya mempunyai sedikit pekerja lapangan perempuan, pertimbangkan untuk merekrut dari masyarakat sebagai pekerja lapangan.

Panduan pelaksanaan isu gender dalam bidang perikanan yang dilakukan oleh ADB mempunyai strategi yang sama dengan yang dilakukan dalam bidang pertanian yaitu dengan menentukan isu-isu utama dan strategi utama.

1. Isu-isu utama yang dilakukan dalam bidang perikanan terdiri dari:

- Apa kegiatan yang berbeda yang dilaksanakan oleh anak perempuan dan kaum perempuan dan oleh anak laki-laki dan kaum laki-laki dalam penangkapan dan pemrosesan ikan, budidaya air, dan pemasaran?
- Apakah kaum perempuan menangkap atau membeli ikan untuk diproses, atau memproses penangkapan dari anggota rumah tangga laki-laki?
- Kegiatan apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan secara bersama-sama?
- Apakah terdapat perbedaan dalam lamanya penggunaan waktu, atau perbedaan musim untuk kegiatan terpisah atau kegiatan yang dilakukan bersama?
- Apakah proyek meningkatkan beban waktu bagi perempuan?
- Apakah ini menjadi manfaat atau kerugian bagi perempuan?
- Apakah kaum perempuan yang bekerja di pusat pengolahan ikan sebagai tenaga kerja bayaran atau bekerja untuk diri sendiri dengan tujuan untuk diproses dan dipasarkan?
- Apakah kaum perempuan mencari ikan secara teratur atau musiman? Apakah memasarkan ikan merupakan kegiatan utama atau hanya sebagai sumber pendapatan tambahan bagi kaum perempuan?
- Apakah kaum perempuan tergantung pada tengkulak untuk memasarkan ikan mereka atau mereka memasarkan sendiri?
- Apakah penjual ikan perempuan mempunyai tempat dan legalitas dalam menjual ikan?
- Apakah kaum perempuan dan kaum laki-laki mempunyai peralatan untuk menangkap ikan?

- Apakah ada ketergantungan pada tengkulak dalam hal modal dan peralatan?
 - Apakah kaum perempuan mempunyai akses untuk memperoleh modal kredit resmi?
 - Apakah kaum laki-laki maupun kaum perempuan mempunyai keterampilan dalam mencari ikan?
 - Apakah pencari ikan mempunyai hak atas sumber daya *property* dalam perikanan perairan dalam?
 - Apakah kaum laki-laki dan perempuan miskin mempunyai akses untuk sumber perikanan perairan dalam seperti, danau, sungai, kolam, atau akses dibatasi hanya untuk laki-laki saja?
 - Apakah kegiatan proyek mengubah pembagian kerja berdasarkan gender dalam menangkap, memproses, dan memasarkan ikan perairan laut dan perairan-perairan dalam?
 - Apakah proyek yang diajukan mempengaruhi lokasi dermaga atau fasilitas pemroses?
 - Bagaimana proyek bisa mempengaruhi kaum perempuan dalam sektor tersebut?
2. Strategi-strategi utama yang dilakukan dalam isu gender di bidang perikanan adalah dengan menentukan cara-cara untuk mengefesiensikan kegiatan kaum perempuan dan kaum laki-laki dalam penggunaan waktu dan sumber daya yang diinvestasikan, tanpa menghilangkan partisipasi kaum perempuan dan pengendalian atas kegiatan-kegiatannya. Dalam hal ini hendaknya masukkan upaya perbaikan untuk mengurangi dampak proyek yang merugikan kegiatan kaum laki-laki dan kaum perempuan, pada peringkat keterlibatan kaum perempuan, atau pada pendapatan kaum perempuan. Perhitungkan juga dukungan atas kegiatan pasca panen (sering merupakan bidang yang dilakukan oleh kaum perempuan) dalam daerah proyek. Kembangkan komponen yang akan mendukung keterlibatan dan kontribusi kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam sektor perikanan. Pastikan proyek tersebut mencerminkan dan dibangun

pada wilayah timbal balik dan kerja sama tradisional antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Jika teknologi baru atau pelatihan keterampilan disediakan oleh proyek, pastikan bahwa teknologi ini bisa diakses oleh kaum perempuan. Bila kaum laki-laki dan kaum perempuan mempunyai anggaran terpisah dan juga tanggung jawab keuangan terpisah, disediakan pengaman sumber pendapatan kaum perempuan dan dukung peluang yang mendatangkan pendapatan baru bagi kaum perempuan. Adakan partisipasi kaum perempuan dalam koperasi kelompok masyarakat lainnya yang dibentuk atau didukung. Serta kembangkan komponen proyek yang akan memberikan akses setara bagi pencari ikan. Kembangkan kegiatan proyek yang akan mendatangkan peluang pendapatan baru dari kegiatan dalam sumber daya perairan. Kembangkan kelompok pencari ikan laki-laki dan perempuan agar mempunyai kemampuan negosiasi yang lebih baik dengan para pedagang dan tengkulak.

*Keadilan
Gender
Dalam
Pertanian,
Irigasi &
Perikanan*

3. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR)

Strategi sektoral BRR memungkinkan pengarusutamaan gender dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan di seluruh sektor program BRR, khususnya perumahan dan pemukiman, sarana dan prasarana, pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan perempuan, sosial dan keagamaan serta pengembangan kelembanggaan. Tujuan strategi ini adalah memberikan pegangan kepada seluruh staf BRR untuk menjamin agar kebutuhan, kepentingan serta kerisauan kaum perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dipertimbangkan dalam keseluruhan aspek proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

a. Kebijakan dan Strategi Gender BRR

Tujuan utama : keterlibatan penuh antara perempuan dan laki-laki sebagai rekan yang sejajar dalam pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi di NAD dan Nias.

Prinsip BRR dalam kesetaraan gender:

- kesetaraan dan tata pemerintahan yang baik
- kesetaraan dan pembangunan ekonomi
- kesetaraan dan hubungan sosial

Kebijakan sektoral BRR dalam kesetaraan gender

- pembangunan ekonomi
- kesehatan
- pendidikan
- sosial dan agama
- pengembangan kelembagaan

b. Masalah-masalah yang teridentifikasi

- Keterbatasan akses pada kesempatan ekonomi termasuk aset produktif, pinjaman, lahan, pendapatan dari pertanian, lapangan kerja dan pasar.
- Keterlibatan akses, kehadiran dan pengaruh dalam pengambilan kebijakan pada tingkat masyarakat.
- Keterbatasan akses khususnya pada keadilan berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan masalah warisan.
- Keterbatasan akses pada kesempatan pendidikan bermutu - formal dan informal.
- Keterbatasan akses pada pelayanan kesehatan bermutu di daerah perkotaan dan informasi.
- Keterbatasan akses pada informasi, komunikasi dan teknologi.

c. Strategi Sektoral BRR

 Pembangunan ekonomi: mengangkat ksetaraan akses, penguasaan dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki pada sumber daya ekonomi sebagaimana terukur oleh akses pada lapangan kerja, sumber keuangan, pemasaran dan pelatihan. Strategi sektoral dalam pembangunan ekonomi terdiri dari:

- Merancang dan melaksanakan intervensi khusus seperti keterampilan hidup, pembukuan/akuntansi dan pelatihan pemasaran untuk mendukung dan mengelola usaha milik perempuan yang tradisional dan tidak tradisional.
- Memperkenalkan sistem pengukuran khusus dalam pembagian sumber keuangan, saprodi pertanian, dan pelatihan keterampilan.
- Menciptakan intervensi-intervensi percontohan untuk memfasilitasi dan mendukung keterlibatan perempuan dalam kegiatan usaha menengah dan menengah ke atas.
- Merancang dan melaksanakan aktifitas khusus yang ditujukan pada perempuan tentang proses produksi dan pengolahan pertanian, peternakan dan pemasaran.
- Memastikan dan memfasilitasi partisipasi dan keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam kelompok tani dan Kejrreun Blang pada tingkat desa.
- Merancang kegiatan khusus bagi janda dan kepala rumah tangga perempuan untuk mendukung dan meningkatkan akses mereka pada sumber keuangan.
- Menyediakan kompensasi adil dan setara bagi janda nelayan untuk aset yang hilang.
- Mengintegrasikan modul tentang gender dalam pedoman pengembangan kapasitas bagi petugas lapangan.
- Menggunakan mekanisme-mekanisme yang efektif dan sensitif gender (dalam media, forum komunitas) untuk menyebarkan informasi tentang pelayanan keuangan,

*Keadilan
Gender
Dalam
Pertanian,
Irigasi &
Perikanan*

kesempatan kerja, komoditas unggulan suatu daerah, pelatihan ketrampilan dan harga komoditas, kepada perempuan dan laki-laki.

➤ Kesehatan dan pendidikan:

- Meningkatkan akses dan memperbaiki mutu pelayanan kesehatan untuk perempuan dan laki-laki di daerah perkotaan dan pedesaan.
- Melembagakan dan meningkatkan akses yang setara pada pendidikan bermutu pada semua tingkatan bagi perempuan dan laki-laki.
- Memberikan pelayanan kesehatan tingkat desa dan kecamatan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi Posko, Poliandes dan Posyandu.
- Menyediakan dan memperbaiki bantuan pelayanan kesehatan reproduksi (dengan target laki-laki dan perempuan) untuk pelayanan paska kelahiran dan bidan terlatih pada tingkat desa dan kecamatan.
- Menyediakan pelayanan kesehatan mental untuk perempuan dan laki-laki pada tingkat desa dan kecamatan.
- Mendirikan pusat pelayanan terpadu untuk perempuan pada tingkat kabupaten untuk menyediakan pelayanan bantuan pelayanan hukum dan kesehatan serta rujukan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan ke lembaga terkait.
- Melaksanakan kampanye pelatihan untuk anak dan masyarakat tentang air, kesehatan dan sanitasi.
- Menyediakan beasiswa sekolah menengah dalam jumlah yang sama untuk anak laki-laki dan perempuan ke sekolah umum dan agama.
- Memperkenalkan sistem pengukuran khusus (kuota) untuk beasiswa pendidikan tinggi (50% beasiswa harus diberikan pada perempuan).

- Melaksanakan kampanye pemberantasan buta huruf bagi warga desa di daerah pedesaan.

Strategi sektoral dalam bidang kepemimpinan dan pemberdayaan

- Meningkatkan akses, penguasaan dan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki, terhadap sumber ekonomi sebagaimana diukur dengan akses yang setara pada kesempatan kerja, sumber keuangan, dan pelatihan.
- Meningkatkan partisipasi dan keterwakilan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pengembangan bidang sosial, keagamaan dan kebudayaan.
- Mengembangkan mekanisme-mekanisme untuk memajukan keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan lokal, termasuk peran kepemimpinan dan memperkenalkan sistem bantuan untuk meningkatkan kesetaraan akses pada keadilan untuk perempuan dan laki-laki.

Strategi lintas sektoral kepemimpinan dan pemberdayaan:

- Menciptakan kelompok pemimpin perempuan dalam berbagai bidang seperti agama, teknologi, media, dan bisnis melalui pengenalan terhadap pelatihan yang sesuai, pelatihan bahasa, kunjungan pembukaan wawasan dan forum-forum tindak lanjut.
- Membangun Balee Inong untuk meningkatkan partisipasi yang setara untuk perempuan dan laki-laki dalam perencanaan komunitas, akses pada informasi dan membangun jaringan.
- Memprioritaskan rehabilitasi dan rekonstruksi pesantren dan dayah serta membangun kapasitas ustadz dan ustadzah dalam hal metodologi pengajaran Islam dan gender melalui pelatihan penyegaran, forum organisasi dan pembagian sumber daya, materi serta kunjungan pembuka wawasan.
- Membuka ruang untuk dialog dan konsultasi tentang gender dan agama melalui rangkaian seminar bekerja sama dengan

universitas, diikuti oleh pemimpin agama serta ilmuwan provinsi, nasional dan internasional.

- Memfasilitasi sebuah pertemuan internasional di Aceh untuk membahas, membagi dan menganalisis pelajaran dan pengalaman yang bermanfaat tentang partisipasi perempuan dan laki-laki dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Mendukung peningkatan kesadaran tentang hak legal perempuan dan laki-laki perihal aset produktif, perwalian dan warisan, melalui pendirian forum komunitas dengan kesetaraan partisipasi perempuan dan laki-laki pada tingkat desa dan kecamatan dengan kerjasama dengan organisasi masyarakat.
- Menyediakan pelatihan gender dan Islam untuk ilmuwan keagamaan laki-laki dan perempuan pada tingkat akar rumput dengan bekerjasama dengan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) termasuk mengembangkan modul pelatihan.
- Memfasilitasi publikasi dan distribusi pamflet buku kecil sederhana tentang kesetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam Islam serta partisipasi politik, warisan, perwalian, ekonomi, perkawinan, perceraian, pendidikan, kekerasan terhadap perempuan, dan mobilitas dengan bekerjasama dengan universitas, organisasi perempuan dan Ilmuwan Islam.
- Mempromosikan dan mendukung masuknya permasalahan gender dalam proses penyusunan qanun diikuti dengan hukum tentang tata pemerintahan yang baik di Aceh berikut peraturan pelaksanaan terkait.

➤ Strategi sektoral dan lintas sektoral dalam bidang pembangunan kelembagaan dan kapasitas:

- Memperkenalkan sistem pengukuran khusus (kuota) untuk pelatihan pekerjaan atau beasiswa untuk pegawai negeri laki-laki dan perempuan di berbagai sektor (30% beasiswa harus disediakan untuk perempuan).

- Mengembangkan kapasitas Biro Pemberdayaan Perempuan melalui penyediaan bantuan teknis latihan di tempat kerja tentang pengembangan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan jaringan.
- Mengintegrasikan konsep gender dalam modul pelatihan pengembangan kapasitas pejabat pemerintah lokal.
- Menyediakan pelatihan tentang pelaksanaan undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan gender untuk polisi laki-laki dan perempuan pada berbagai tingkatan, serta menyediakan bantuan kelembagaan bagi laki-laki dan perempuan pada berbagai tingkatan, serta menyediakan bantuan kelembagaan bagi unit bantuan perempuan dan anak di lembaga kepolisian pada berbagai tingkatan.
- Memfasilitasi dan mendukung kursus pelatihan khusus untuk sejumlah polisi perempuan dengan bekerjasama dengan akademi polisi.
- Memfasilitasi dan organisasi forum konsultatif pegawai negeri untuk membantu mengidentifikasi titik strategis untuk meningkatkan keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.
- Memberikan pelatihan tentang hak-hak perempuan dan gender bagi para hakim bekerjasama dengan Mahkamah Syariah dan organisasi perempuan.
- Menyediakan dan memfasilitasi kesempatan beasiswa dan kunjungan studi banding untuk dosen pusat studi perempuan. Selanjutnya mendukung pendirian dan perluasan perpustakaan dan pelayanan internet di pusat-pusat tersebut.
- Mempromosikan dan mendukung masuknya permasalahan gender dalam proses penyusunan qanun yang diusulkan, diikuti oleh undang-undang tentang tata pemerintahan baik di Aceh bersama dengan peraturan pelaksanaan terkait.

➤ Strategi sektoral dalam bidang perumahan, pemukiman dan prasarana

- Memperkenalkan sistem pengukuran yang dapat memastikan tingkat partisipasi dan keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam pemetaan dan perencanaan kampung.
- Mengidentifikasi titik masuk untuk melindungi persamaan hak perempuan dan laki-laki untuk memperoleh perumahan/pemukiman yang layak. (pertemuan terpisah dengan perempuan dan laki-laki dalam tahap perencanaan dan evaluasi rekonstruksi dan rehabilitasi merupakan persyaratan kebijakan).
- Merancang dan melaksanakan program yang berbasis pada masyarakat yang terbuka yang mempromosikan pemukiman yang aman, memadai, dan bersih dengan penyediaan air, drainase, transportasi, dan sistem pengelolaan limbah serta melaksanakan kampanye kesadaran.
- Menyediakan dan memperbaiki fasilitas sanitasi, termasuk kamar kecil dan kamar mandi di barak, tempat tinggal sementara, dan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan untuk memastikan kebebasan dan keamanan perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki.
- Melindungi persamaan hak perempuan dan laki-laki, terutama janda dan duda, dalam kepemilikan tanah melalui pengembangan rencana 'outreach' yang peka gender, membuat daftar penerima yang dapat dipilahkan menurut jenis kelamin, dan kampanye pengembangan kesadaran bekerja sama dengan BPN, unit pemberdayaan perempuan di BRR, Mahkamah Syar'iah dan pemangku kepentingan lainnya.
- Mendukung pelebagaan dan sosialisasi sertifikat kepemilikan bersama untuk persil tanah yang direncanakan akan dibeli oleh BRR dengan mengadakan peningkatan kesadaran masyarakat, pelatihan pejabat pendaftaran, mendukung pengembangan

formulir administrasi (sertifikat) dan pemutakhiran basis data (inisiatif bersama BRR-BPN).

- Mendirikan sistem standar untuk memantau dan melaporkan pembagian yang adil Bantuan Renovasi Perumahan (BRP) dan Bantuan Tempat Tinggal Sosial (BTTS) kepada perempuan dan laki-laki dengan membuat daftar penerima dan indikator target yang terpilahkan menurut jenis kelamin.
- Merancang dan melaksanakan proyek untuk mendukung usaha yang dipimpin perempuan atau di mana perempuan terlibat aktif dalam berbagai aspek konstruksi dengan bekerjasama dengan unit pelatihan ketrampilan BRR serta pemangku kepentingan yang terkait.
- Mendukung pelaksanaan intervensi khusus untuk menghindari dan meminimalkan potensi dampak merugikan yang mungkin muncul dari penyediaan prasarana (terutama jalan), termasuk penyebaran HIV/AIDS, kawin kontrak, kawin muda, hak tanah dan pemukiman kembali dengan kerjasama dengan Unit Pemberdayaan Perempuan BRR dan pemangku kepentingan terkait.

4. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan oleh World Bank

Program Pengembangan Kecamatan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, serta kapasitas kelembagaan pembangunan desa atau antar desa. Khususnya meningkatkan peran perempuan dalam hal akses dan kontrol terhadap berbagai sumber daya yang ada. Dengan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memanfaatkan dan mengontrol sumber daya PPK, kesejahteraan masyarakat lebih luas akan meningkat. Selain itu perempuan mempunyai pengalaman, kebiasaan, persoalan dan kebutuhan khusus yang berbeda dari laki-laki.

Partisipasi yang diharapkan dari perempuan

- Sebagai pengusul, perempuan mengajukan usulan kegiatan untuk mengatasi persoalan dan memenuhi prioritas mereka.
- Sebagai pengambil keputusan, perempuan hadir dan mengemukakan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.
- Sebagai pelaksana kegiatan, perempuan dapat ikut berperan sebagai tenaga kerja, anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) atau Unit Pengelola Keuangan (UPK), sesuai keinginan dan kemampuannya.
- Sebagai pemantau, perempuan ikut memantau hasil kerja dan secara aktif meminta laporan pertanggungjawaban keuangan program, serta melakukan tindakan tegas jika menemukan kecurangan di lapangan.
- Sebagai pemelihara, perempuan ikut memelihara hasil pembangunan sarana dan prasarana, atau bisa juga menjadi anggota Tim Pemelihara.
- Sebagai penerima manfaat, perempuan bisa menjadi penerima modal usaha maupun menikmati hasil pembangunan prasarana yang menggunakan sumberdaya PPK.

Pembelajaran dari pelaksanaan PPK Fase I

- Kehadiran perempuan pada setiap pertemuan di tingkat desa dalam pelaksanaan masih rendah. Sekalipun hadir, perempuan belum berpartisipasi aktif seperti yang diharapkan.
- Tujuan PPK tidak dapat dicapai secara optimal karena perempuan belum memanfaatkan hak mereka untuk mengajukan usulan yang berkaitan dengan kebutuhan khusus mereka.

Berdasarkan pembelajaran fase 1 tersebut, PPK memperluas ketentuan-ketentuannya sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dengan cara sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.
PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROGRAM PPK

Tahapan Kegiatan	Ketentuan-ketentuan PPK
1. Sosialisasi PPK di kecamatan (musyawarah antardesa/UDKP I)	<ul style="list-style-type: none">▪ Setiap desa diwakili 6 orang, paling sedikit 3 orang di antaranya perempuan.▪ Forum harus menjelaskan pentingnya partisipasi perempuan.▪ Paling sedikit ada 1 perempuan dalam Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
2. Sosialisasi dan pemilihan FD(Fasilitator Desa)/Musyawarah Pembangunan Desa I (Musbangdes I)	<ul style="list-style-type: none">▪ Dari 2 FD, 1 orang di antaranya adalah perempuan.▪ Posisi Pendamping Lokal terbuka bagi laki-laki dan perempuan.▪ Dari 7 orang di desa yang menerima honor PPK, 3 di antaranya perempuan.▪ Paling sedikit 40% yang hadir adalah perempuan
3. Pelatihan FD	FD perempuan harus dapat hadir dalam pelatihan, jadwal dan tempat pelatihan harus disesuaikan dengan kegiatan peserta FD perempuan.
4. Sosialisasi dan penggalan gagasan di tingkat dusun dan kelompok	<ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah dan jenis kelompok perempuan yang ada harus diidentifikasi.

	<ul style="list-style-type: none">▪ Sosialisasi harus menggunakan metode/teknik yang mampu membuat seluruh kaum perempuan mengetahui PPK dan memahami bahwa kelompok perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan usulan.▪ Paling sedikit 40% yang hadir adalah perempuan.
5. Penentuan wakil & usulan dari perempuan (Pertemuan Khusus Perempuan)	<ul style="list-style-type: none">▪ Sebanyak mungkin perempuan hadir dalam pertemuan khusus perempuan, terutama yang terlibat dalam penggalan gagasan di tingkat kelompok.▪ Penggalan gagasan kelompok perempuan dilakukan secara terpisah dari kelompok laki-laki.
6. Penentuan wakil & usulan dari desa ke kecamatan (Mungbangdes II)	Paling sedikit 40% yang hadir adalah perempuan.
7. Penulisan usulan	Perempuan harus dilibatkan dalam penulisan usulan, terutama usulan perempuan.
8. Verifikasi usulan	Harus ada anggota perempuan dalam Tim Verifikasi.
9. Persiapan kegiatan (Musbangdes III)	<ul style="list-style-type: none">▪ Paling sedikit 40% yang hadir adalah perempuan.▪ Harus ada anggota perempuan

	<p>dalam TPK dan Tim Pemantau.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Hasil pertemuan harus diketahui dan dimengerti oleh kelompok perempuan.
10. Pelaksanaan kegiatan	<ul style="list-style-type: none">▪ Harus ada anggota perempuan dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).▪ Perempuan harus diundang dalam penjelasan rencana pelaksanaan kegiatan.▪ Perempuan harus mendapatkan kesempatan untuk bekerja dalam pembangunan sarana dan prasarana, upahnya sama dengan laki-laki.
11. Pemantauan kegiatan	<ul style="list-style-type: none">▪ Harus ada anggota perempuan dalam Tim Pemantau dan Tim Pemeriksa, di antaranya: Tim 18 dan Tim Audit di kecamatan.▪ Perempuan harus diundang dalam pertemuan-pertemuan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan, baik di desa maupun di kecamatan.

Upaya mendorong perempuan agar hadir dalam pertemuan-pertemuan PPK dilakukan dengan cara :

- 👉 Mengundang perempuan
- 👉 Menetapkan target jumlah peserta perempuan

- Menjadwalkan pertemuan
- Menetapkan lokasi dan tempat pertemuan
- Membatasi lamanya pertemuan
- Mengatasi hambatan lainnya

PPK juga menyusun Indikator Partisipasi dan Peran Aktif Perempuan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

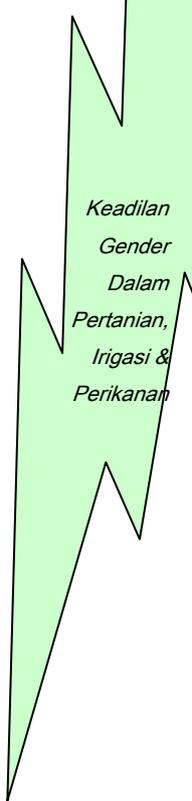
Tabel 2.2.
INDIKATOR PARTISIPASI DAN PERAN AKTIF PEREMPUAN

Hasil yang diharapkan	Cara mengukur	Indikator keberhasilan
1. Perempuan hadir dan berperan aktif dalam pertemuan	<ul style="list-style-type: none">▪ Melihat langsung proses yang sedang berjalan▪ Melihat dokumen-dokumen yang ada, seperti:<ul style="list-style-type: none">- daftar hadir pertemuan- formulir penggalan gagasan.- formulir penilaian tingkat partisipasi- notulensi rapat atau catatan proses yang memuat siapa yang bertanya	<ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah perempuan yang hadir relatif meningkat.▪ Perempuan berani berbicara dan bertanya.▪ Perempuan memberi usulan.▪ Perempuan memberi tanggapan atau mempertahankan pendapatnya.

	dan memberi tanggapan.	
2. Perempuan mengetahui tentang segala aspek PPK di desanya.	<p>Mewawancarai masyarakat perempuan di desa yang bersangkutan secara acak mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - keberadaan program - kegiatan-kegiatan yang didanai - pelaksana kegiatan - manfaat yang didapat - kemajuan kegiatan - pembiayaan - keanggotaan tim yang ada. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah perempuan yang dapat menjelaskan aspek-aspek PPK. ▪ Perempuan dapat menjelaskan segala aspek PPK di desanya dengan baik.
3. Perempuan berperan aktif dalam penyusunan usulan yang berkualitas dan berpotensi untuk didanai.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mewawancarai perempuan pengusul. ▪ Mengamati proses penyusunan usulan. ▪ Membaca dan mempelajari usulan perempuan dan usulan campuran. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perempuan mampu menjelaskan rincian usulan yang diajukan kelompoknya dan mampu mengemukakan alasan pengajuan usulan. ▪ Usulan dapat

	<ul style="list-style-type: none">▪ Melihat daftar prioritas usulan	<p>memenuhi kebutuhan perempuan.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tahap pelaksanaan terurai dengan lengkap.▪ Dampak positif usulan terungkap secara jelas.▪ Kegiatan tindak lanjut diungkapkan secara jelas.▪ Jumlah usulan perempuan yang masuk 10 besar cukup banyak.
4. Perempuan masuk dan berperan aktif dalam Tim PPK.	Melihat Petunjuk Teknis Operasional (PTO) untuk mempelajari struktur ti (UPK, TPK, Tim Pemantau, Tim Verifikasi, dll) dan mencatat posisi yang dipegang perempuan.	<ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah perempuan dalam tim PPK.▪ Perempuan dapat mengerjakan tugasnya dalam tim, misalnya sebagai bendahara mampu membuat pembukuan.
5. Ada kesinambungan peran perempuan	<ul style="list-style-type: none">▪ Mewawancarai tokoh masyarakat	<ul style="list-style-type: none">▪ Pemerintah setempat peduli

setelah berakhir.	PPK	<p>tentang peran perempuan dalam kegiatan-kegiatan di luar PPK.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mewawancarai perempuan untuk mengetahui adanya perubahan peran perempuan dalam PPK dan dalam masyarakat umumnya. 	<p>akan keterlibatan perempuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah perempuan yang berperan aktif di dalam dan di luar kegiatan PPK. ▪ Jumlah perempuan yang menjadi tokoh masyarakat.
-------------------	-----	--	--



5. UNDP (United Nation Development Programme)

Dalam melakukan kegiatan pengarusutamaan gender, UNDP melakukan 5 (lima) langkah kerja, yaitu:

1. Melakukan kajian dokumen-dokumen yang ada yang berkaitan dengan proyek yang dilakukan.
2. Terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan situasi mengenai gender dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan proyek yang dilakukan ,juga dilakukan dengan metode *focus group discussion* untuk mendapatkan analisis situasi gender yang sebenarnya di lapangan. Untuk hal ini UNDP mencoba menggambarkan pertanyaan-pertanyaan dasar apa yang dapat ditanyakan kepada masyarakat, seperti:

➤ *traditional livelihood areas for women*

➤ *women's property ownership*

➤ akses dan partisipasi wanita terhadap distribusi air dan makanan dan ases terhadap perumahan dan lain-lain

3. Merancang kerangka pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan gender, untuk itu dibuat ruang lingkup pertanyaan secara sederhana meliputi :
 - a. Kebutuhan-kebutuhan laki-laki dan perempuan secara umum dalam pembangunan.
 - b. Kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan, seperti fasilitas, pemberian kesempatan dan lain-lain.
 - c. *Gender concerns*
 - d. *Gender inequality*
 - e. Isu-isu gender
4. Kerangka kerja dengan menitikberatkan pada isu-isu yang sangat mendasar mengenai gender. Dalam kaitan untuk mencari isu-isu yang mendasar mengenai gender, maka ruang lingkup pertanyaan-pertanyaan yang disusun meliputi:
 - a. Perbedaan gender, antara laki-laki dan perempuan terutama dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti, masalah kepemilikan terhadap harta benda, akses terhadap tanah, kesempatan terhadap pendidikan.
 - b. Diskriminasi gender. Dapat terjadi karena konstruksi budaya, peraturan perundang-undangan yang bias gender, peraturan-peraturan hukum, penafsiran-penafsiran agama yang keliru dan adat istiadat atau kebudayaan.
 - c. *Patriarchal control*. Dalam kaitan ini terdapat kecenderungan bahwa laki-laki lebih mendominasi dalam membuat keputusan atau menentukan keputusan dalam segala lapisan, baik dalam bidang pemerintahan, sampai kepada kehidupan pribadi perempuan.
 - d. *Patriarchal belief*
 - e. Paksaan /kekerasan. Perempuan sering mendapat perlakuan kekerasan, baik dalam kehidupan rumah tangga , institutionalized dan lain-lain.

5. Melihat dan mengali potensi-potensi yang dimiliki oleh perempuan, di antaranya:

- a. Untuk melihat perubahan dalam praktek dan hukum yang berkaitan dengan diskriminasi perempuan.
- b. Untuk mencapai kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan dan penempatan sumber daya manusia yang tepat.
- c. Untuk menemukan perbedaan tingkatan potensi-potensi yang dimiliki oleh perempuan.

Untuk melihat hal tersebut disusun ruang lingkup pertanyaan yang berkisar tentang:

- a. Peningkatan kemampuan/kesejahteraan, dalam kaitan ini perempuan mempunyai tingkat yang paling lemah dibidang status social ekonomi, kesehatan, pendapatan.
- b. Akses. Dalam kaitan ini harus melihat potensi awal perempuan dalam peningkatan status, pekerjaan dan peran-peran perempuan dalam organisasi, seperti akses perempuan yang bekerja dibidang pertanian dalam memasarkan hasil produksinya, akses perempuan dalam pengaturan masalah pengairan/air, tanah, pelatihan-pelatihan atau informasi-informasi yang berguna dalam peningkatan kemampuan perempuan.
- c. Fokus/ konsentrasi perempuan, menggerakkan perempuan dalam potensi-potensi yang dia miliki.
- d. Pengawasan . baik pengawasan langsung / membuat keputusan keputusan terhadap kebutuhannya akan sumber daya yang ada.

6. Oxfam "Gender Mainstreaming in The Oxfam GB East Asia Programme"

Panduan ini ditujukan untuk pekerja Oxfam di kawasan Asia Timur/Tenggara, yang meliputi:

- Program di semua negara mempunyai strategi pengarusutamaan gender setempat dan perencanaan yang mudah dimengerti serta tindakan untuk mengimplementasikannya.
- Standar rekrutmen, pelantikan, pelatihan dan manajemen kinerja Oxfam didasari oleh pengarusutamaan gender.
- Seluruh manager mulai dari tingkatan A-C memiliki sekurang-kurangnya sebuah tujuan kinerja yang khusus berisi kesetaraan gender.
- Kinerja ditinjau secara teliti berdasarkan keahlian dalam setiap tujuan kinerja dan memantau ketaatan terhadap kebijakan organisasi.
- Laporan tigabulanan divisi adalah untuk menjelaskan laporan tujuan khusus tentang kesetaraan gender.
- Seluruh proyek dan proposal harus memasukan analisis gender secara penuh dan rencana serta anggaran khusus untuk memajukan kesetaraan gender khususnya di wilayah-wilayah yang ditentukan oleh 5 proposal program regional utama(2003-2006).
- Seluruh proyek dan proposal harus memasukan tujuan-tujuan gender, tindakan-tindakan khusus untuk memajukan kesetaraan gender berdasarkan gender analisis dan garis besar anggaran yang mencerminkan analisis yang dibuat pada pernyataan-pernyataan naratif.
- Keterbukaan dan kemauan: Seluruh staf dan mitra mendemonstrasikan dengan sungguh-sungguh keterbukaan dan kemauan untuk memajukan kesetaraan gender.
- Menggunakan sumber-sumber gender yang tersedia: Guna mendukung perencanaan yang lebih efektif dan pengembangan staf, staf harus menggunakan narasumber gender sejak awal berlangsungnya proyek/program.
- Pengarusutamaan gender dalam program-program penanganan bencana: Hal ini memerlukan sebuah analisis gender yang komprehensif termasuk pencantuman anggota-anggota tim dengan

pengetahuan khusus tentang isu-isu gender dan strategi khusus untuk memajukan kesetaraan gender dengan indikator-indikator yang disepakati untuk menilai kemajuannya.

Standar penilaian yang berprinsip kemanusiaan

- Tim penilai harus meliputi wanita dan pria dengan jumlah proporsional.
- Kegiatan penilaian dan pengumpulan data harus dilakukan oleh pria dan wanita secara terpisah.
- Program dan proyek harus memasukan analisis gender dengan menggunakan
- Penilaian dampak harus didasari perbandingan-perbandingan antara status terkini dan analisis gender yang dilakukan.
- Seluruh staf mendemonstrasikan kompetensi dasar untuk memajukan kesetaraan gender.
- Kerangka kerja dan anggaran desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi-isu gender dalam analisis gender serta mempromosikan kesetaraan gender.
- Seluruh program kemanusiaan adalah untuk memenuhi standar gender Oxfam demi kemanusiaan.

7. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

Program pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) memfokuskan kepada lima pintu aspek pemberdayaan perempuan, kelima pintu tersebut yaitu:

- a. Pintu pertama ditujukan pada fokus menuju kesejahteraan, yaitu dengan tujuan terpenuhinya semua kebutuhan hidup perempuan termasuk rasa aman. Peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan kegiatan pengembangan ekonomi, kegiatan simpan pinjam, usaha kelompok, usaha pertanian, dll.

- b. Pintu akses, bertujuan meningkatkan akses perempuan pada berbagai sumberdaya yang ada termasuk pada pengambilan keputusan. Akses terhadap sumberdaya seperti mendapatkan dana BLM, berbagai pelatihan, informasi, dikenal oleh pemerintah sehingga mendapat akses beras murah atau raskin juga terlibat dalam pengambilan keputusan.
- c. Pintu partisipasi, bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan pada setiap tahapan kegiatan dan pembangunan di wilayahnya, seperti berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan dalam kelompok dan dalam masyarakat, dimulai dari kegiatan dalam kelompok mereka secara aktif mendiskusikan, merencanakan, memutuskan dan melaksanakan berbagai kesepakatan dan kegiatan untuk kepentingan mereka sendiri dan juga ikut berpartisipasi dengan berbagai kegiatan di masyarakat.
- d. Pintu kesadaran kritis, bertujuan meningkatkan kesadaran perempuan terhadap hak dan kewajibannya sebagai manusia dan warga negara.
- e. Pintu kontrol terhadap kehidupan sendiri dan kehidupan sosial politiknya, Bertujuan meningkatkan kontrol perempuan terhadap dirinya dan terhadap proses pengambilan keputusan dalam keluarga dan dalam masyarakat. Selain itu juga untuk menumbuhkan agar kelompok mempunyai kontrol berbagai kegiatan dapat dilakukan, yaitu dengan belajar untuk menjadi pemimpin bagi diri, keluarga dan dalam kelompoknya. Mereka berlatih mengambil berbagai keputusan, belajar berorganisasi dengan menerapkan berbagai prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan, membuat kesepakatan-kesepakatan tanpa campur tangan orang lain.

Strategi dan pendekatan yang dilakukan oleh PEKKA dalam menerapkan kelima aspek tersebut adalah dengan pengorganisasian, pengembangan jaringan dan advokasi.

Proyek-proyek di atas, dilakukan dengan pertimbangan bahwa peran dan kebutuhan maupun persepsi yang berbeda antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Proyek-proyek ini harus memperhatikan kendala-kendala gender yang dihadapi oleh kaum perempuan, khususnya faktor-faktor yang membatasi partisipasi mereka baik dalam desain, implimentasi, dan pengelolaan proyek.

Fokus terhadap isu-isu gender akan membuat proyek terus memberi manfaat. Keterlibatan langsung kaum perempuan melalui partisipasi aktif dalam perencanaan, perancangan, implimentasi dan evaluasi proyek akan memberdayakan kaum perempuan serta memberikan rasa kepemilikan yang lebih kuat dan keterlibatan yang lebih besar dalam keberhasilan proyek. Akses yang lebih baik pada sumber daya juga memungkinkan kaum perempuan mencurahkan lebih banyak waktunya dalam kegiatan-kegiatan yang mendatangkan pendapatan dan untuk mengurus kebutuhan mereka sendiri serta keluarga mereka serta ekonomi dan masyarakat keseluruhan yang akan mendapatkan manfaatnya



BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Profil Kegiatan Masyarakat

Untuk melihat peran, posisi dan seberapa besar keterlibatan laki-laki dan perempuan, baik di dalam rumah tangga maupun di masyarakat dapat dilihat dari profil kegiatan masyarakatnya. Selain itu, profil kegiatan masyarakat juga akan memberikan gambaran tentang jenis-jenis mata pencaharian masyarakat di daerah tersebut.

Kegiatan masyarakat di desa penelitian terdiri dari kegiatan di bidang produktif, reproduktif, politik dan sosial kemasyarakatan. Kegiatan produktif adalah kegiatan yang dilakukan anggota masyarakat dalam rangka mencari nafkah. Kegiatan ini disebut juga kegiatan ekonomi, karena kegiatan ini menghasilkan uang secara langsung. Kegiatan reproduktif adalah kegiatan yang berhubungan erat dengan pemeliharaan dan pengembangan serta menjamin kelangsungan sumber daya manusia dan biasanya dilakukan dalam keluarga. Kegiatan ini tidak menghasilkan uang secara langsung dan biasanya dilakukan bersamaan dengan tanggung jawab domestik atau kemasyarakatan. Dalam beberapa referensi disebut juga reproduksi sosial. Sedangkan kegiatan politik dan sosial kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan anggota masyarakat yang berhubungan dengan bidang politik, sosial dan kemasyarakatan dan mencakup penyediaan dan pemeliharaan sumber daya yang digunakan oleh setiap orang. Kegiatan ini bisa menghasilkan uang dan bisa juga tidak.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa perempuan banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan produktif, misalnya di sektor pertanian. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab penuh untuk kegiatan reproduktif (dalam rumah tangga). Dominannya keterlibatan perempuan di dua bidang kegiatan di atas

tidak signifikan dengan keterlibatannya di bidang politik dan sosial kemasyarakatan yang sangat minim. Minimnya keterlibatan perempuan di bidang ini, sangat dipengaruhi oleh beratnya beban dan tanggung jawab perempuan untuk bidang produktif dan reproduktif. Kondisi ini, diperparah lagi oleh budaya patriarkhal yang masih melekat di sebagian besar masyarakat dan interpretasi agama yang tidak sensitive pada kebutuhan perempuan, sehingga perempuan jarang dilibatkan dalam ruang publik. Perempuan juga kurang mempunyai akses pada pendidikan tinggi dan akses terhadap informasi.

Jenis kegiatan di desa penelitian dapat dilihat dalam penjabaran berikut ini.

1. Bidang Produktif

Pada umumnya masyarakat melakukan kegiatan di sektor pertanian sebagai petani baik petani yang bekerja di kebun, sawah maupun ladang. Di samping itu banyak juga masyarakat yang bekerja di sektor perikanan baik sebagai petani tambak maupun nelayan. Pekerjaan seperti pedagang, tukang bengkel, tukang bangunan, dan lain sebagainya hanya dilakoni oleh sebagian kecil masyarakat.

Pasca Tsunami, lahan sawah dan tambak mengalami kerusakan yang sangat serius, padahal kedua lahan tersebut menjadi sumber mata pencarian utama masyarakat. Untuk memulai kembali aktifitas di bidang ini membutuhkan waktu lama dan biaya yang besar, sementara perbaikan lahan tersebut belum sepenuhnya menjadi program prioritas dari pemerintah (BRR). Karena keterlambatan penanganan dan rehabilitasi lahan, sementara kebutuhan perekonomian masyarakat yang mendesak, masyarakat terpaksa melakukan pengolahan lahan seadanya. Hal ini berakibat secara kualitas dan kuantitas produksi menjadi sangat menurun sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Di sisi lain, daerah yang tidak mengalami tsunami, misalnya di Desa Pante Rakyat Kecamatan Babah Rot Kabupaten Aceh Barat Daya, masyarakat dihadapkan pada persoalan lain misalnya serangan hama yang mengakibatkan kegagalan panen selama dua tahun dan pemerintah belum melakukan upaya-upaya terhadap penanggulangan masalah ini. Kondisi ini mengakibatkan sebagian masyarakat beralih profesi ke bidang-bidang lain seperti menjadi buruh bangunan, berdagang, bengkel dan lain sebagainya, padahal mereka tidak mempunyai keahlian di bidang tersebut. Hal ini mengakibatkan upah yang mereka terima menjadi kecil, sehingga sulit untuk memenuhi hidup sehari-hari.

a. Nelayan

Aktivitas nelayan dipahami dalam dua jenis kegiatan, yaitu melaut dan mengolah hasil tangkapan. Kegiatan melaut meliputi nelayan pukat dan nelayan jaring. Kedua jenis kegiatan ini dilakukan oleh laki-laki, mulai dari persiapan (boat/perahu, jaring/pukat, fiber, alat penunjuk arah, radar dan logistik). Perempuan hanya terlibat pada persiapan logistik khusus untuk nelayan jaring. Mengolah hasil tangkapan, meliputi kegiatan penjemuran, pengasinan ikan dan pembuatan ikan kayu. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh perempuan.

b. Petani Tambak

Secara umum tahapan kegiatan petani tambak adalah sebagai berikut:

1). Tahap persiapan terdiri dari kegiatan: membersihkan tambak (*Peugleh/ Keumeukuh*), membuat/memperbaiki pintu air (*daka*) dan memasukkan air ke tambak. Kegiatan selanjutnya adalah memberi racun untuk hama penyakit serta pemberian pupuk. Seluruh kegiatan pada tahapan ini dikerjakan oleh laki-laki.

2). Tahap Pengerjaan dan Pemeliharaan terdiri dari menabur bibit, memberikan pakan, membersihkan air, pemupukan dan pemeliharaan. Kegiatan memberi pakan dan membersihkan air

dilakukan secara periodik sesuai dengan kebutuhan. Seluruh kegiatan pada tahap ini didominasi oleh laki-laki. Peran perempuan sangatlah minim hanya pada jenis kegiatan tertentu saja, misalnya memberi pakan.

- 3). Tahap Pemanenan, terdiri dari menguras air, pemilahan hasil panen, memasukkan hasil panen ke dalam fiber. Untuk jenis kegiatan pemilahan hasil panen dan memasukkan hasil panen ke fiber dilakukan secara bersama antara laki-laki dan perempuan.
- 4). Tahap Pemasaran. Setelah melewati tahap pemanenan, hasil panen secara langsung dijual kepada *toke* dan *mugee*. Lokasi penjualan dilakukan di sekitar tambak atau dibawa ke pasar. Keterlibatan perempuan dapat terlihat pada saat penjualan hasil panen di sekitar tambak, misalnya menerima dan menyimpan sementara uang hasil penjualan dari pihak laki-laki atau suami.

c. **Petani**

Dalam sektor pertanian, ada 5 tahapan yang umumnya dilakukan oleh para petani. Sebelum tahapan tersebut dilakukan oleh petani, ada kegiatan penelusuran dan pembersihan jaringan irigasi yang dilakukan terlebih dahulu oleh *Keujreun Blang* (Perkumpulan Petani Pengguna Air-P3A) bersama dengan anggotanya yang laki-laki dengan tujuan memastikan saluran irigasi masih berfungsi dengan baik. Perempuan tidak terlibat dalam aktivitas ini, kecuali yang pengurusnya perempuan, seperti di Desa Ceubrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara.

Aktivitas yang dilakukan petani dijabarkan dalam tahapan sebagai berikut :

- 1). Tahapan Persiapan. Tahapan ini, terbagi dalam dua kegiatan besar, yaitu :

- Mempersiapkan bibit dengan berbagai perlakuan mulai dari pemilahan bibit hingga menutup rapat-rapat bibit yang telah disiram, dengan tujuan untuk memaksimalkan proses tumbuhnya kecambah. Persiapan pembibitan sebagian besar dikerjakan oleh perempuan. Kegiatan persiapan bibit, diakhiri dengan penyemaian bibit di lahan semai yang dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. Namun untuk wilayah pantai timur, penyemaian bibit dilakukan sepenuhnya oleh perempuan.
 - Mempersiapkan lahan tanam. Pada saat yang bersamaan dengan penyiapan bibit, pengolahan lahan (semai dan tanam) juga dimulai. Dalam tahapan ini kegiatan yang dilakukan, terdiri dari mengolah tanah, membersihkan lahan/pematang dan irigasi serta mengalirkan air ke lahan. Dalam proses penyiapan lahan, dilakukan secara bersama-sama antara laki-laki dan perempuan. Keterlibatan perempuan sangat dipengaruhi oleh jenis alat yang digunakan. Apabila menggunakan alat tradisional (cangkul), maka keterlibatan perempuan lebih besar, ini pun hanya dilakukan oleh perempuan atau janda miskin yang tidak mampu membayar upahan. Tetapi bila menggunakan alat teknologi terapan (misalnya *hand tractor*) atau menggunakan tenaga hewan (kerbau atau lembu), maka peran ini sepenuhnya dimainkan oleh laki-laki.
- 2). Tahapan Penanaman. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam tahapan ini adalah pencabutan bibit dari lahan semai yang kemudian ditanam/*seumula* ke lahan tanam. Kegiatan ini dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Khusus untuk aktivitas penyemaian, di pantai timur tahapan ini didominasi oleh perempuan, sedangkan untuk pantai barat didominasi oleh laki-laki.
 - 3). Tahapan Pemeliharaan. Kegiatan pada tahap ini adalah pemupukan, penyemprotan, pencabutan rumput, pembersihan pematang/*ateung*, menjaga padi dari burung/*kumiet tulo* dan hama penyakit serta

membasmi hama. Kegiatan pemupukan, penyemprotan dan pembasmian hama, semua dilakukan oleh laki-laki baik pesisir Barat dan Timur, kecuali janda yang tidak punya cukup uang untuk mengupahkan kegiatan ini pada laki-laki. Peran perempuan mendominasi kegiatan pencabutan rumput, pembersihan pematang/*ateung* dan menjaga padi dari burung/*kumiet tulo*.

- 4). Tahapan Pemanenan/*Keumekoh*. Tahapan ini diawali dengan memotong padi dengan menggunakan *Sadeup* (sabit) dan meletakkannya di atas batang padi sisa potongan untuk dijemur dengan waktu yang tidak dapat ditentukan tergantung pada terik matahari dan keamanan padi dari pencurian. Untuk pantai Timur, peran perempuan sangat mendominasi kegiatan ini. Kebalikan dengan pantai timur, di pantai barat kegiatan ini sangat didominasi oleh laki-laki.



Kegiatan dilanjutkan dengan merontokkan padi dengan menggunakan mesin perontok padi dan memasukkannya ke dalam goni setelah terlebih dahulu ditampi. Selanjutnya dilakukan penghitungan zakat terhadap hasil panen yang kemudian diakhiri dengan membawa padi baik ke rumah maupun ke pabrik penggilingan padi (*kilang*). Keterlibatan perempuan

hampir pada seluruh kegiatan di tahapan ini kecuali merontokkan padi dan membawa padi baik ke rumah maupun ke pabrik penggilangan padi. Kondisi ini terjadi di dua wilayah penelitian, pantai barat dan pantai timur

- 5). Tahapan Pemasaran. Kegiatan dalam tahapan ini dapat dilakukan di sekitar rumah atau sawah ataupun di pasar. Untuk kegiatan ini, umumnya dilakoni oleh laki-laki. Perempuan hanya melakukan penjualan untuk jumlah kecil, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Aktivitas pertanian tidak hanya meliputi kegiatan-kegiatan teknis di sawah, tetapi juga berkaitan dengan kegiatan kelembagaan yang dikenal *Keujruen Blang* atau P3A. Lembaga ini memiliki ruang lingkup untuk pengelolaan yang berkaitan dengan air/irigasi dan persawahan yang tertuang dalam kebijakan lembaga, misalnya kebijakan tentang jadwal mulai turun ke sawah dan penetapan sanksi bagi petani yang melanggar aturan. Pembahasan dan penetapan ini dilakukan dalam rapat *Keujruen Blang* yang dihadiri oleh masyarakat yang laki-laki dan pengurus P3A. Hingga saat ini, anggota P3A yang terpilih menjadi pengurus, masih dikuasai oleh laki-laki. Hal ini bertolak belakang dengan fakta bahwa perempuan juga terlibat aktif dalam kerja-kerja pertanian, sehingga menjadi alasan kuat bagi keterwakilan perempuan dalam pengurus. Kecuali P3A wilayah Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase Kanan (desa Ceubrek Tunong kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara) yang pengurusnya banyak yang perempuan.

Kondisi perempuan yang termarginalkan ini disebabkan karena beberapa hal:

- Peran atau fungsi *Keujruen Blang*/ P3A masih dipandang sebagai kerja-kerja yang membutuhkan kekuatan fisik, misalnya membuka dan menutup pintu air. Padahal pemerintah melalui Dinas Sumber Daya Air, telah menggaji orang untuk melakukan kerja-kerja tersebut, namun karena orang tersebut bukan berasal dari orang setempat yang tidak menguasai lokasi maka peran tersebut sering sekali tidak dijalankan.

- Rendahnya pemahaman manajemen kelembagaan oleh pengurus *Keujruen Blang/P3A*
- Ranah publik masih dikuasai dan dipahami sebagai wilayahnya laki-laki

d. **Kegiatan Produktif Lainnya**

Kegiatan produktif lain yang dilakukan masyarakat adalah membuat kue, mengambil upahan cucian, menganyam tikar, mencari pinang dan atau coklat, menjadi tenaga upahan untuk mengurus bayi, berjualan (*mugee*) sayur dan atau ikan, beternak bebek dan atau ayam. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perempuan. Sedangkan untuk menjadi buruh bangunan, membuat mebel, sopir, merupakan kegiatan yang banyak dilakukan oleh laki-laki. Untuk kegiatan yang dilakukan secara bersama, di antaranya adalah membuka salon, menjadi guru dan berdagang.

Dari penjabaran kegiatan produktif di atas, terdapat perbedaan-perbedaan jenis kegiatan laki-laki dan perempuan. Keadaan ini dipengaruhi oleh pandangan masyarakat secara turun temurun bahwa peran laki-laki sebagai kepala keluarga memiliki kosenkuensi untuk bertanggungjawab penuh terhadap kebutuhan keluarga yang mengakibatkan tidak adanya pengakuan masyarakat terhadap perempuan yang ikut berperan dalam pemenuhan kebutuhan keluarganya. Perempuan hanya membantu untuk mencukupi kebutuhan keluarga atau menggantikan peran suami atas ketidakberfungsinya laki-laki sebagai Kepala Keluarga. Walaupun peran pemenuhan kebutuhan keluarga telah dibagi atau diambil alih oleh perempuan, tidak berarti ada pula pembagian peran dan tanggungjawab domestik antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan yang berperan sebagai petani tetap harus bertanggungjawab penuh untuk kegiatan rumah tangganya.

Pandangan masyarakat yang lain, juga ikut mempengaruhi marginalisasi perempuan. Dalam pandangan yang berkembang di masyarakat, pekerjaan yang membutuhkan tenaga/ fisik hanya pantas dilakukan oleh laki-laki. Perempuan akan lebih dihormati dan dihargai bila menjalankan fungsi sebagai ibu rumah tangga yang harus berperan maksimal bagi keluarganya. Sehingga masyarakat menetapkan klasifikasi jenis pekerjaan bagi laki-laki dan perempuan. Akibatnya kemiskinan yang dialami perempuan akan semakin panjang karena terbatasnya jenis kerja yang disediakan untuk perempuan tanpa melihat kemampuan perempuan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kondisi ini dapat dilihat dari kegiatan membajak sawah yang menggunakan *hand tractor* atau hewan, dikuasai oleh laki-laki. Penggunaan alat ini dirasakan lebih efektif oleh masyarakat dibandingkan menggunakan cangkul yang umumnya menjadi alat yang familiar untuk dipakai oleh perempuan. Penggunaan teknologi ini juga mempengaruhi tingkat pendapatan perempuan, karena kehilangan sumber pendapatan.



Konstruksi budaya yang menganggap bahwa perempuan merupakan makhluk domestik, membuat kerja-kerja yang dilakukannya sangat berkaitan dengan lingkungan sekitar rumah. Bila perempuan melakukan kegiatan di wilayah publik maka jenis kegiatan yang diberikan pada perempuan

merupakan jenis kegiatan yang tidak berbeda dengan kerja-kerja domestik. Pada sisi lain, sistem keamanan dalam masyarakat belum mendukung perempuan untuk bekerja di ranah publik terlebih pada malam hari karena pekerjaan tersebut sangat riskan bagi perempuan. Perempuan yang terpaksa melakukan ini, akan mendapatkan stigma dan berpeluang untuk mengalami pelecehan seksual atau kekerasan lainnya. Sehingga walaupun memiliki kapasitas untuk melakukan pekerjaan tersebut, perempuan akan berfikir lebih panjang untuk melakukannya. Contoh nyata dapat dilihat dalam keterlibatan perempuan yang tidak bisa maksimal melakukan kegiatan sebagai petani tambak atau nelayan pukat yang umumnya dilakukan pada malam hari.

Lemahnya akses perempuan terhadap informasi juga semakin menjadikan kondisi ini bertambah buruk. Karena dianggap memiliki fisik yang lemah, maka segala bentuk informasi yang seharusnya diterima perempuan dikaitkan dengan pekerjaan produktifnya menjadi tidak terakses. Ini sangat berkaitan dengan peletakan perannya yang hanya dan selayaknya di dalam rumah tangga saja. Contohnya terlihat dari pemberian informasi melalui training dan penyuluhan tentang pemupukan, pembibitan organik dan pengenalan teknologi menjadi prioritas bagi para laki-laki.

Interpretasi agama yang tidak sensitif pada kondisi perempuan, juga ikut mempengaruhi keadaan ini. Diyakini oleh sebagian masyarakat bahwa penting bagi perempuan untuk tidak berada dalam wilayah publik dalam durasi waktu yang cukup lama untuk menghindari dari fitnah, maka pilihan bagi perempuan adalah bekerja dalam lingkup domestik (berada dalam rumah, baik di rumah sendiri, maupun rumah orang lain)

2. Bidang Reproduksi

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa kegiatan reproduktif adalah kegiatan yang berhubungan erat dengan pemeliharaan dan pengembangan serta menjamin kelangsungan sumber daya manusia dan biasanya dilakukan

dalam keluarga. Kegiatan ini tidak menghasilkan uang secara langsung dan biasanya dilakukan bersamaan dengan tanggung jawab domestik, seperti:

- a. Memasak,
- b. Membersihkan rumah,
- c. Mencuci baju, piring
- d. Mengantar anak ke Sekolah
- e. Kegiatan mengantar anak ke Posyandu, ke Puskesmas, merupakan kegiatan yang lebih banyak dilakukan oleh perempuan, laki-laki hanya membantu perempuan dengan mengantar perempuan membawa bayi/balita ketempat Posyandu tersebut berada. Peran laki-laki disini hanya sebagai sarana transportasi semata. Demikian juga dengan membawa anak ke Puskesmas hanya dilakukan oleh perempuan, laki-laki baru mau membantu apabila kondisi si anak sakit parah, sedangkan apabila sakit ringan saja, maka menjadi tanggung jawab si ibu.
- f. Mengurus keperluan suami, kegiatan ini mutlak dilakukan hanya oleh perempuan saja.
- g. Mengurus anak, juga merupakan kegiatan yang hanya dilakukan oleh perempuan
- h. Mendidik anak (mengajar mengaji, mengajar pelajaran umum), merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan.

Kegiatan di bidang reproduktif merupakan kegiatan yang paling banyak dibebankan kepada perempuan. Hal ini tidak terlepas dari budaya patriarki dan interpretasi agama yang tidak memihak pada perempuan yang masih melekat dan diyakini oleh masyarakat. Walaupun ada keterlibatan laki-laki dalam bidang reproduktif, akan tetapi terbatas hanya pada kegiatan-kegiatan tertentu yang sifatnya cenderung membantu saja, sementara beban utamanya tetap dipikul oleh perempuan. Sebagai contoh dalam mendampingi anak-anak belajar dirumah, sebenarnya dapat dilakukan bersama-sama oleh suami dan istri, namun pihak istrilah yang memiliki kewajiban utama untuk mendampingi dan mengawasi pendidikan anak. Jadi realitasnya adalah,

selain perempuan harus melakukan tugas produktifnya, dalam waktu bersamaan perempuan juga harus menyelesaikan terlebih dahulu kerja-kerja reproduktifnya. Tanpa disadari, beban ini terus menjadi dilematis bagi perempuan itu sendiri. Di satu sisi ia harus berpikir untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang masih berkekurangan, tapi di sisi yang lain, ia tidak bisa terlepas dari beban dan tanggung jawabnya di dalam rumah tangga. Sebenarnya mudah untuk membagi peran antara laki-laki dan perempuan di bidang produktif, namun menjadi pekerjaan yang panjang dan sulit bila harus berbagi peran didalam rumah tangga. Beban ganda inilah yang selama ini terus dijalani perempuan dalam kehidupannya di dalam keluarga dan masyarakat. Hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab perempuan tidak terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan untuk pembangunan desanya.



3. Bidang Politik dan Sosial Kemasyarakatan

Dalam kehidupan kemasyarakatan, keterlibatan perempuan dan laki-laki tidaklah merata, padahal secara jumlah, perempuan dan laki-laki tidak berbeda jauh. Terjadi ruang yang lebar yang sulit untuk dipertemukan, terlebih bila masih memegang kokoh budaya dan interpretasi agama yang bias perempuan yang telah diyakini sebagai sebuah nilai dalam relasi sosial. Pada kegiatan politik, keterlibatan perempuan belum sepenuhnya dianggap sebagai

sebuah kebutuhan oleh masyarakat. Keberadaannya masih sebatas properti dan pelaksana atas kebijakan-kebijakan yang dilahirkan. Hingga saat inipun, peran ini masih terus dibiasakan dan dilanggengkan pada generasi sekarang. Begitu kuatnya upaya melanggengkan budaya yang bias ini, menyebabkan semakin tertutupnya peluang perempuan untuk terlibat walaupun mulai ada dorongan kuat dari perempuan untuk ikut terlibat.

Dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, yang telah mengundang banyak lembaga nasional maupun internasional untuk datang dan berkontribusi dalam membangun kembali Aceh, mulai melakukan langkah-langkah yang signifikan untuk mengupayakan keterlibatan perempuan. Misalnya saja, dalam kebijakan internal beberapa lembaga, mengharuskan ada kehadiran 30% sampai dengan 40% perempuan dalam pertemuan yang akan dilaksanakan, membuat pertemuan khusus untuk kelompok perempuan sebelum memulai program dan lain sebagainya. Sebagai upaya *affirmative action*, langkah ini sudah cukup baik namun sayangnya langkah ini tidak secara serius dilaksanakan oleh petugas lapangan lembaga tersebut. Sayangnya walaupun hal ini direspon oleh masyarakat, umumnya hanya untuk tujuan mempercepat dan memudahkan pencairan bantuan. Ini menandakan keterlibatan perempuan belum dianggap kebutuhan prioritas dalam menata ulang kehidupan.

Ada banyak pertemuan-pertemuan yang dikenal oleh masyarakat baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektoran. Pertemuan ini umumnya dilakukan untuk membahas dan mengambil keputusan untuk pembangunan desa. Sebut saja pertemuan *Keujreun Blang* yang membahas tentang lingkup pertanian. Walaupun petani di Aceh terdiri dari laki-laki dan perempuan, tapi perempuan tidak diminta datang pada pertemuan *Keujreun Blang* seperti mengundang atau meminta kehadiran mereka, seperti yang dilakukan terhadap petani laki-laki. Kalaupun ada perempuan yang hadir, hanyalah perempuan janda yang membutuhkan informasi tentang jadwal mulai tanam. Kehadiran perempuanpun hanya sebatas kehadiran saja, tidak diminta untuk

berkontribusi memberikan ide dan masukan terhadap kebijakan yang akan diambil.



Keadilan
Gender
Dalam
Pertanian,
Irigasi &
Perikanan

Tidak hanya dalam pertemuan *Keujreun Blang/P3A*, keterlibatan perempuan juga sangat minim dalam rapat desa untuk membicarakan hal-hal penting lainnya. Jumlah perempuan di desa yang mendominasi, belum menjadi daya tarik mengundang perempuan untuk hadir.

Keterlibatan perempuan yang minim dalam rapat-rapat desa, dapat diartikan sebagai minimnya akses perempuan pada kegiatan politik Hal ini bertolak belakang dengan besarnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Dikaitkan dengan peran perempuan sebagai pemberi layanan utama (*primer services*), kegiatan ini menciptakan ruang yang lebih besar terhadap perempuan untuk terlibat, karena aktivitas ini tidak berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk masyarakat umum, melainkan hanya kegiatan yang sifatnya silahturrahmi (kekeluargaan) saja.

Kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang umumnya dilakukan oleh komunitas, adalah sebagai berikut:

- a. Wirid Yasin

- b. Perayaan atas pernikahan, sunatan rasul dan kelahiran anak
 - c. Menjenguk orang sakit
 - d. Melayat orang meninggal
 - e. Pengajian
 - f. Berdoa (*Samadiyah*) di rumah orang meninggal atau yang sedang sakit.
 - g. *Peusjuk*/syukuran
- Maulid* Nabi/peringatan hari kelahiran Nabi

B. Akses Dan Penguasaan Laki-laki Dan Perempuan Terhadap Sumber Daya Dan Informasi

Akses kepada dan Penguasaan atas berbagai sumber daya alam merupakan bagian dari kondisi-kondisi yang harus dimiliki oleh siapapun. Tidak dimilikinya akses dan kontrol, atas berbagai sumber daya oleh perempuan menyebabkan perempuan tidak dapat berpartisipasi secara penuh dalam proyek-proyek pembangunan dan menikmati manfaatnya. Akses dan penguasaan atas berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki secara adil, merupakan faktor penting dalam merencanakan dan melakukan analisis proyek yang berbasis gender.

Akses ke berbagai sumber daya artinya, memiliki kesempatan untuk menggunakan sumber daya penting (misalnya pendapatan, tanah, rumah, sawah dan sebagainya) tanpa memiliki kewenangan keputusan yang berkaitan dengan hasilnya.

Penguasaan (kontrol) atas berbagai sumber daya artinya memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan penggunaan sumber daya yang dimiliki serta hasil yang diperoleh, kewenangan penuh atas penggunaan upah yang diperoleh atau keuntungan yang diperoleh, kewenangan penuh atas tubuhnya sendiri berkaitan dengan hal-hal kegiatan reproduktifnya. Sumber daya ini juga termasuk sumber daya informasi.

Untuk lebih jelas yang berkaitan dengan kesempatan dan penguasaan diatas dapat dilihat dalam uraian berikut ini:

a. **Sumber Daya Alam dalam Bentuk Tanah, Rumah, Kebun, Sawah dan Tambak.**

Dari hasil temuan di lokasi penelitian diketahui bahwa perempuan hanya memiliki kesempatan untuk menggunakan sumber daya sebatas harta bawaan yang diperoleh dari hibah atau warisan dari pihak keluarganya misalnya rumah, tanah, kebun dan lain-lain. Tetapi terhadap harta yang diperoleh dalam/selama perkawinan, kesempatan untuk menggunakan sumber daya tersebut menjadi terbatas dan biasanya didominasi oleh laki-laki (suami).

Perempuan memiliki akses terhadap sumber daya alam tersebut, akan tetapi laki-laki tetap memiliki akses lebih dibandingkan perempuan. Hal ini disebabkan karena masih terdapatnya pemahaman dalam masyarakat bahwa laki-laki (suami), merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab lebih besar pada keluarga sehingga memperoleh akses besar terhadap sumber daya yang dimiliki oleh keluarga maupun sumber daya lainnya.

Untuk akses terhadap aset yang diperoleh dari barang bantuan, misalnya rumah, perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama. Sementara untuk bantuan yang berkaitan dengan alat-alat produksi seperti boat dan sebagainya, aksesnya berada pada laki-laki. Akan tetapi penguasaannya, baik rumah maupun alat-alat reproduksi ada pada laki-laki, karena umumnya bantuan tersebut diberikan atas nama laki-laki, dan seolah-olah kepemilikannya adalah laki-laki dan bukan keluarga atau kepemilikan bersama antara laki-laki dan perempuan, sehingga untuk pengalihan aset sepenuhnya berada pada tangan laki-laki. Hal ini tentu saja tidak terjadi untuk perempuan janda, karena

mereka mempunyai akses dan penguasaan penuh terhadap aset yang dipeoleh dari hibah/bantuan.

Dalam hal penguasaan (kontrol) atas sumber daya baik yang diperoleh dari hibah, warisan atau harta yang dimiliki selama perkawinan didominasi oleh laki-laki atau suami. Harta yang diperoleh dari warisanpun untuk pengalihannya kepada pihak lain misalnya menjual atau menyewakan maka keputusannya tetap dimusyawarahkan pada suami, karena suami dianggap sebagai kepala keluarga. Peran perempuan dalam hal ini sangat kecil kecuali bagi perempuan dengan status janda, dimana kesempatan untuk menggunakan dan penguasaan terhadap sumber daya yang berasal dari hibah atau warisan dimiliki secara penuh. Sementara untuk harta yang diperoleh selama perkawinan tetap di bawah penguasaan pihak keluarga suami.

b. **Hasil Sumber Daya Alam dari Sawah, Kebun, Gunung, Tambak, Sungai.**

Untuk hasil sawah seperti padi dan tanaman palawija, pada umumnya aksesnya ada pada laki-laki dan perempuan, khususnya dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan. Akan tetapi pada saat penjualan hasil, apalagi dalam jumlah yang besar, penguasaannya lebih dimiliki oleh laki-laki. Sedangkan perempuan hanya memiliki penguasaan untuk penjualan yang jumlahnya kecil dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kondisi di atas disebabkan karena adanya anggapan bahwa perempuan tidak mempunyai informasi tentang harga serta tidak mendapatkan kepercayaan dari pembeli (mugee, tokee). Di samping itu kondisi fisik perempuan dianggap menjadi kendala dalam melakukan peran-peran ini, karena untuk hasil alam yang akan dijual dalam jumlah besar perempuan dianggap tidak mampu mengangkat atau membawa ke

tempat penjualan. Apalagi jika penjualan tersebut dilakukan ke pasar yang jaraknya jauh dari desa tempat tinggalnya.

Bagi perempuan yang berstatus janda, mereka biasanya menjual sendiri hasil panennya. Karena tidak mempunyai suami, maka tidak ada keharusan baginya untuk melakukan musyawarah ketika mau menjual hasil panen tersebut. Dalam hal hasil panen yang berjumlah besar, maka perempuan tersebut menggunakan jasa RBT (tukang ojek) dengan membayar upah atau meminta tolong kepada keluarga atau saudaranya yang laki-laki untuk menjual hasil panen tersebut.

Untuk hasil tambak akses dan penguasaannya didominasi oleh laki-laki. Hal ini dikarenakan secara turun temurun jenis pekerjaan ini banyak dilakukan oleh laki-laki dan ini tetap dijalankan sampai dengan sekarang.

Untuk hasil sumber daya alam yang berasal dari kebun, dan dalam bentuk tanaman keras seperti sagu, kelapa, dan buah-buahan lainnya yang jumlahnya besar, maka akses dan penguasaannya lebih banyak pada laki-laki. Apabila tanaman tersebut berada di sekitar rumah dan jumlahnya kecil, seperti pinang, maka perempuan memiliki akses dan penguasaan yang sama dengan laki-laki. Biasanya untuk hasil kebun yang jaraknya cukup jauh dari desa (rumah) akses dan penguasaannya hanya dimiliki oleh laki-laki.

Akses dan penguasaan terhadap ternak ayam/itik, pada umumnya dimiliki oleh perempuan saja, laki-laki sedikit sekali memiliki akses dalam bidang ini. Hal ini terjadi karena pemeliharaan ternak ini banyak dilakukan oleh perempuan dan dikerjakan di sekitar rumah, hasilnya pun tidak terlalu besar. Selain itu harga jualnya pun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan untuk akses terhadap ternak kambing, biri-biri, lembu/sapi dan kerbau dimiliki secara berimbang oleh laki-laki dan perempuan, karena mereka secara

bersama-sama memelihara ternak tersebut. Akan tetapi pada saat penjualan, penguasaan lebih besar pada laki-laki. Hal ini terjadi karena harga ternak ini termasuk mahal, dan kepala keluarga yang paling berhak untuk menjual aset keluarga. Di samping itu perempuan dianggap tidak memahami harga dan cara menjual ternak. Pembeli (mugee/tokee) juga tidak mempercayai perempuan sebagai penjual, karena perempuan tidak dianggap sebagai pengambil keputusan dalam keluarga, termasuk keputusan untuk mengalihkan (menjual) aset. Akan tetapi untuk perempuan yang berstatus janda dapat langsung menjual asetnya karena akses dan penguasaan sepenuhnya berada pada tangannya.

Sedangkan untuk hasil gunung atau hutan, perempuan tidak memiliki akses sama sekali, karena letaknya yang sangat jauh dan berkaitan dengan resiko keamanan dalam perolehannya. Untuk hasil sungai dan laut, seperti ikan, tiram, kerang, kerikil dan pasir, perempuan memiliki akses dan penguasaan, tetapi dalam jumlah yang kecil dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alasannya karena faktor fisik perempuan dan minimnya pengetahuan perempuan berkaitan dengan harga dan cara pemasarannya. Sehingga aktivitas ini tidak dianggap sebagai aktivitas utama sebagai pencari nafkah, dan tidak tercatat dalam statistik desa sebagai salah satu jenis pekerjaan masyarakat di desa tersebut

c. Akses dan Penguasaan Terhadap Informasi

Akses perempuan terhadap informasi sangat minim, karena perempuan lebih banyak berkiprah dalam ruang lingkup domestik. Sementara informasi banyak beredar di ruang publik seperti di meunasah, warung kopi dan tempat-tempat pertemuan lainnya. Begitu juga penguasaan (kontrol) terhadap sumber informasi hanya ada pada pihak laki-laki. Perempuan tidak bisa memutuskan untuk memilih atau menentukan sumber-sumber informasi mana yang dapat meningkatkan wawasan

mereka. Bilapun ada, informasi yang diperoleh perempuan hanya sebatas informasi yang sifatnya hiburan saja.

Akses perempuan terhadap sumber informasi seperti koran, TV, radio, pengumuman, papan informasi, maupun informasi melalui rapat-rapat, pelatihan/penataran/penyuluhan serta sumber informasi lainnya di desa penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1). Akses perempuan terhadap koran tidak ada sama sekali. Hal ini disebabkan karena koran-koran tersebut hanya terdapat di warung-warung kopi, atau di tempat umum lainnya dimana laki-laki lebih sering berada disana, sehingga akses dan penguasaan hanya dimiliki oleh laki-laki. Sementara perempuan di desa jarang untuk datang dan duduk di warung kopi, sehingga tidak mendapatkan akses untuk membaca, kecuali apabila ada koran yang dibawa pulang oleh suaminya ke rumah atau ada informasi yang disampaikan oleh suami atau anggota keluarga lainnya dari berita koran.
- 2). Akses perempuan terhadap TV di desa sudah ada, namun akses laki-laki terhadap TV masih jauh lebih besar. Hal ini disebabkan karena tidak semua keluarga memiliki TV. Bagi laki-laki yang lebih banyak memiliki waktu dan berkiprah di luar rumah, maka akses untuk menonton TV menjadi lebih besar. Sedangkan bagi perempuan, walaupun memiliki TV di rumah kadangkala tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menonton. Hal ini dikarenakan banyaknya beban pekerjaan perempuan, baik dalam bidang produktif maupun reproduktif. Situasi ini berakibat pada proses pengembangan diri perempuan menjadi lamban, dan menjadi semakin sulit untuk berkiprah di di ranah publik.
- 3) Akses perempuan terhadap radio sedikit lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dikarenakan perempuan lebih banyak memiliki

waktu di rumah, sehingga perempuan sering mendengarkan radio sambil mengerjakan pekerjaan domestiknya. Dibandingkan dengan TV, radio lebih banyak dimiliki oleh masyarakat. Penguasaan terhadap sumber informasi dari radio dimiliki sama besar oleh laki-laki dan perempuan, walaupun pada umumnya perempuan hanya mendengarkan informasi yang bersifat hiburan (seperti lagu).

- 4). Akses perempuan terhadap pengumuman lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini disebabkan karena informasi melalui pengumuman umumnya dilakukan dengan *microphone* dan ditujukan kepada kelompok-kelompok tertentu. Misalnya untuk rapat-rapat penting berkaitan dengan pembangunan desa, pengumuman langsung ditujukan kepada laki-laki. Sedangkan untuk pengumuman yang ditujukan untuk perempuan biasanya hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan posyandu. Pengumuman lewat *microphone* tidak semuanya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, karena jarak antara sumber informasi (*meunasah*) dengan rumah penduduk berjauhan. Selain itu arah angin juga mempengaruhi isi pengumuman yang diterima menjadi kurang jelas karena tidak terfokus dengan baik.

Sebelum Tsunami pengumuman tentang akan diadakannya rapat dan pemberitahuan mengenai orang meninggal, misalnya di Desa Meunasah Sagoe Kecamatan Seunedon, disampaikan melalui pemukulan *tambo/beduk*. pemukulan *tambo/beduk* dilakukan dua kali untuk undangan rapat, dan dipahami sebagai undangan untuk laki-laki. Sedangkan jika ada yang meninggal dunia maka *tambo/beduk* akan dipukul sebanyak tiga kali.

Akan tetapi setelah tsunami, *beduk/ tambo* sudah tidak ada lagi, maka penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan *microphone* desa dan pengumuman tersebut hanya ditujukan untuk kaum laki-laki saja.

Penggunaan kedua alat ini, tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap meningkatnya akses dan penguasaan informasi bagi perempuan.

- 5). Akses perempuan terhadap papan informasi. Perempuan di desa juga kurang bisa mengakses informasi yang ada pada papan informasi. Hal ini disebabkan karena letak papan informasi biasanya di *Meunasah*. Laki-laki dengan mudah dapat mengakses informasi tersebut karena laki-laki sering sholat berjamaah di *Meunasah*. Sementara itu perempuan jarang melakukan sholat berjamaah di *Meunasah*. Sehingga kesempatan untuk mengakses papan informasi menjadi lebih kecil. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya pemahaman dan interpretasi agama yang dianut sebagian masyarakat, yang menyebutkan bahwa perempuan lebih baik melaksanakan sholat di rumah dibandingkan di *Meunasah/mesjid*.

- 6). Akses dan Penguasaan terhadap informasi dari mulut ke mulut. Akses informasi dari mulut ke mulut dimiliki hampir sama oleh laki-laki dan perempuan. Biasanya perempuan melakukannya pada saat beraktivitas di sawah. Demikian juga dengan laki-laki, dapat saling bertukar dan mendapatkan informasi ketika melakukan aktifitas ditempat-tempat umum, seperti di kedai kopi, pasar, *meunasah* atau tempat-tempat umum lainnya. Dalam sistim pertukaran informasi seperti ini perempuan belum tentu mendapatkan informasi yang akurat, karena tidak bisa melakukan cross cek informasi dari sumbernya. Informasi yang diterima bersumber dari dan di seputar mereka sendiri. Sedangkan laki-laki dapat mencari informasi alternatif untuk mendapatkan informasi yang akurat.

7). Akses dan Penguasaan Terhadap Rapat-rapat Desa

Perempuan sedikit sekali mempunyai akses dalam rapat-rapat yang diadakan di desa. Padahal sarana ini merupakan sarana yang paling efektif untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Selain itu sarana ini merupakan wadah untuk menyampaikan usulan dan pendapat perempuan terhadap rencana pembangunan-pembangunan di desa. Bilapun ada, perempuan hanya menghadiri rapat-rapat khusus untuk perempuan saja, misalnya rapat PKK dan rapat Posyandu. Sementara laki-laki selalu menghadiri rapat-rapat desa yang berkaitan dengan pembangunan desa, kegiatan sosial dan lain sebagainya.

Khusus untuk rapat-rapat yang berkaitan dengan pertanian, perempuan janda kadangkala diminta hadir. Tidak jarang perempuan janda ini biasanya mewakili dirinya kepada anak laki-laki untuk menghadiri rapat-rapat tersebut. Minimnya keterlibatan perempuan dalam rapat-rapat desa, menyebabkan permasalahan dan kebutuhan perempuan tidak terakomodir dalam perencanaan pembangunan di desa, karena suara-suara mereka tidak cukup terdengar.

8). Akses Terhadap Pendidikan (Pesantren, Sekolah).

Untuk akses dan penguasaan terhadap pendidikan tingkat dasar sama-sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Tetapi untuk jenjang yang lebih tinggi akses dan penguasaan lebih banyak dimiliki oleh laki-laki dari pada perempuan. Sehingga berdampak pada tidak seimbangya tingkat pemahaman dan pengetahuan antara laki-laki dan perempuan. Ketidakeimbangan ini terlihat dari minimnya jumlah perempuan untuk menduduki posisi penting khususnya sebagai pengambil keputusan baik ditingkat desa maupun ditingkat yang lebih tinggi.

9). Akses Terhadap Pelatihan/ Penataran/ Penyuluhan

Untuk akses dan penguasaan terhadap pelatihan/penataran/penyuluhan secara umum baik perempuan dan laki-laki masih kurang. Bilapun ada

perempuan hanya mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan ketrampilan-ketrampilan untuk mendukung kerja-kerja domestik atau penyuluhan dasar tentang kesehatan yang berkaitan dengan Posyandu saja. Selain itu keterlibatan perempuan tersebut bukan secara umum tetapi khusus untuk status tertentu atau yang memiliki kedekatan secara personal dengan aparatur desa atau orang-orang tertentu lainnya yang mempunyai pengaruh di komunitas, walau kadangkala tidak relevan dengan kebutuhan. Penyuluhan dan pelatihan-pelatihan dalam bidang pertanian, perikanan maupun peternakan umumnya diikuti oleh laki-laki, walaupun perempuan banyak berkerja dalam bidang-bidang ini. Hal ini mengakibatkan petani dan peternak perempuan tidak memiliki keterampilan yang baik untuk meningkatkan produksi dalam bidang-bidang tersebut

C. Hubungan Kelembagaan

Pemerintah mempunyai tanggungjawab dan kewajiban dalam membangun negaranya, sebagai upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Aceh adalah salah satu daerah yang membutuhkan pembangunan khusus, setelah bencana alam dan konflik bersenjata. Dalam mempercepat pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban tersebut, pemerintah dibantu oleh negara dan lembaga lain baik lembaga internasional, nasional maupun lokal. Berikut akan dijelaskan kelembagaan dari sisi Pemerintahan Desa dan di luar Pemerintahan Desa dalam pembangunan kembali Aceh pasca bencana dan konflik.

1. Lembaga Pemerintahan Desa

Dalam masyarakat Aceh dikenal 12 institusi (kelembagaan) lokal (Sanusi M. Syarif, Gampong dan Mukin di Aceh, 2005) yang telah berjalan dan dipercaya oleh masyarakat sebagai pengelola segala sumber daya yang terdapat di desa. Lembaga-lembaga tersebut adalah :

1. *Keujreun Blang*
2. *Ulee Seunebok*
3. *Haria Pekan*
4. *Imum Mukim*
5. *Tuha Lapan Mukim*
6. *Imum Meunasah*
7. *Geuchik Gampong*
8. *Tuha Peut Gampong*
9. *Panglima Laot*
10. *Pawang Glee*
11. *Keutuha Krueng*
12. *Syahbandar*

Ke 12 lembaga ini tidak seluruhnya ada di suatu desa. Keberadaannya sangat tergantung dari kebutuhan masyarakat desa terhadap lembaga-lembaga ini. *Panglima Laot* memiliki lingkup kerja berkaitan dengan sumber daya laut, *Keujreun Blang* memiliki lingkup kerja berkaitan dengan sektor pertanian dan bidang lain yang berkaitan dengan pertanian serta pengairan/irigasi. *Pawang Glee* khusus bertanggung jawab dalam lingkup sumber daya hutan. Jadi lembaga-lembaga ini hanya ada di desa-desa yang sumber daya alamnya berkaitan dengan lingkup tersebut. Ada juga lembaga-lembaga khusus yang keberadaannya terdapat di semua desa, seperti Imum Mukim, Tuha Peut Gampong, Tuha Lapan Mukim, Imum Meunasah dan Geuchik Gampong.

Pada wilayah penelitian, ditemukan persamaan tentang keberadaan lembaga-lembaga lokal sebagai berikut.

1. *Geuchik Gampong* atau dikenal juga oleh masyarakat dengan sebutan LKMD
2. *Tuha Peut Gampong*
3. *Tuha Lapan Mukim*

4. *Kejruen Blang* atau dikenal juga dengan P3A

5. *Imum Meunasah*

Geuchik Gampong, Tuha Peut Gampong, Tuha Lapan Mukim dan Imum Meunasah menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa secara umum. Sedangkan lingkup tugas dari *Keujreun Blang* (P3A) adalah meliputi luas petak *tertier*, mencakup pemecahan masalah-masalah yang dihadapi petani baik langsung maupun tidak langsung, seperti pola tanam dan tata tanam serta sarana produksi seperti pupuk, pestisida dan lain-lain, meningkatkan ketrampilan petani di bidang pengelolaan air irigasi dan pola tanam (AD/ART Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) *Keujruen Blang Cukoep Adee Daerah Krueng Pase Kanan Kabupaten Aceh Utara*, 2007).

Lingkup kerja ini tidak sepenuhnya dijalankan oleh *Kejruen Blang*, misalnya di desa-desa yang belum mempunyai irigasi seperti di Desa Matang Lada dan Desa Meunasah Sagoe di Kecamatan Seunudon Kabupaten Aceh Utara. Peran yang dimiliki oleh *Kejruen Blang* di dua desa ini lebih kecil, misalnya hanya mengatur dan mengelola air saat musim hujan datang. Keterlibatan dan campur tangannya dalam memecahkan persoalan yang dialami oleh para petani, sangatlah terbatas. Bahkan, peran para otoritas desa seperti *Geuchik Gampong, Tuha Peut Gampong, Tuha Lapan Mukim dan Imum Meunasah* menjadi lebih dominan dibandingkan peran *Kejruen Blang*. Perbedaan ini dipengaruhi oleh pola tanam padi dan keberadaan irigasi teknis yang berbeda antara desa Meunasah Sagoe dan Desa Matang lada dengan desa lainnya. Karena tidak adanya irigasi di desa tersebut, pola tanam petani sangat bergantung pada musim hujan, sehingga petani hanya memiliki rotasi tanam setahun sekali.

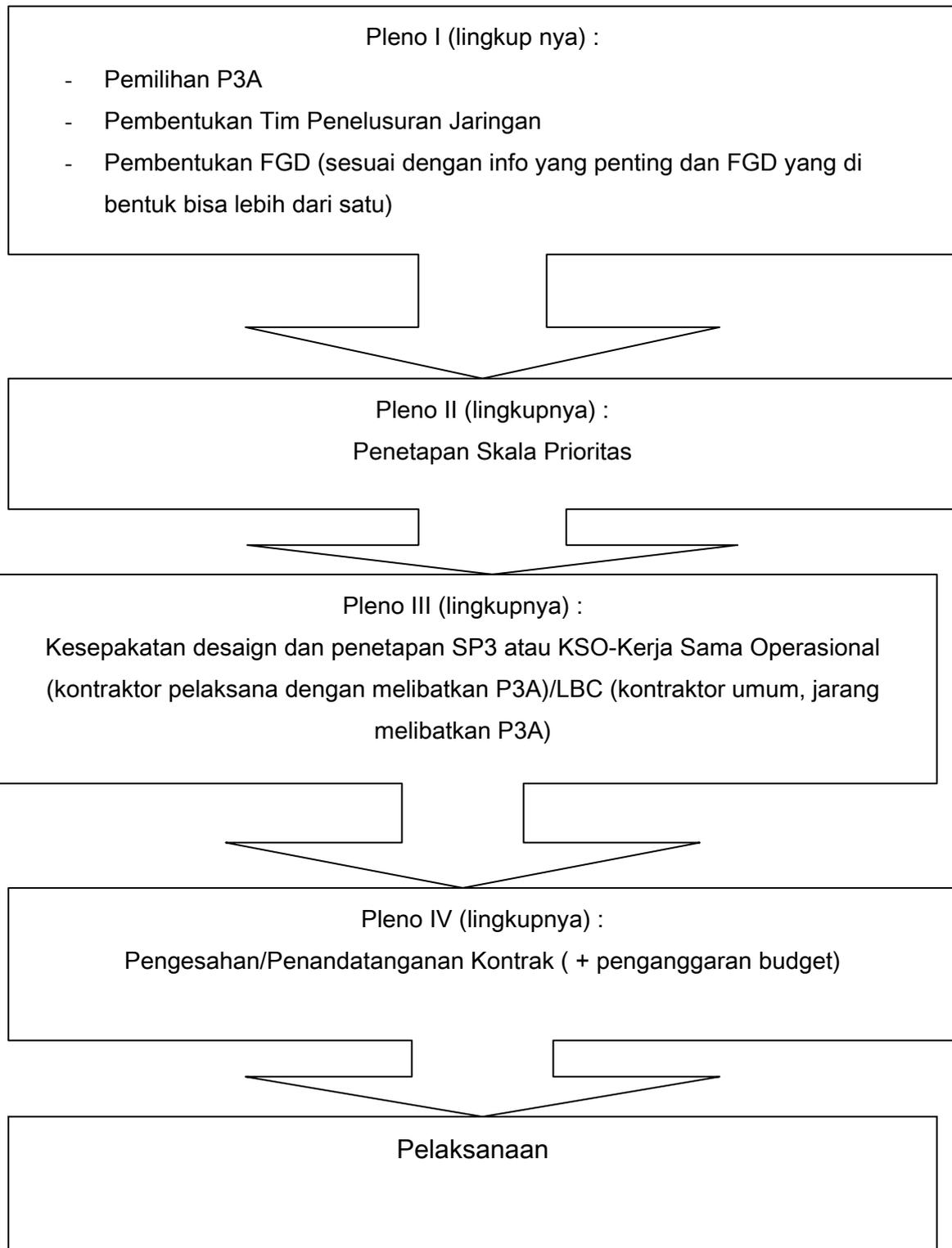
Untuk desa-desa yang memiliki irigasi, mekanisme penyelesaian kasus di lapangan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Biasanya proses penyelesaian dimulai dengan laporan temuan baik oleh petani (anggota P3A) atau oleh pengurus P3A. Laporan tersebut disampaikan pada *Keujreun* yang

selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan permintaan kepada juru tehnis untuk melakukan survei/pembuktian terhadap kasus yang dilaporkan. Setelah melakukan survei dan mendapatkan gambaran dan memperoleh data-data yang dibutuhkan, akan dibahas oleh pengurus dalam rapat pengurus P3A. Biasanya rapat pengurus ini, melibatkan TPP (Tenaga Pendamping Petani) yang bertugas di wilayah yang bersangkutan. Bila kasus yang dilaporkan dapat ditangani langsung oleh P3A, maka penanganan dan penyelesaian akan langsung dilakukan oleh P3A bersama masyarakat. Kasus yang dapat langsung ditangani memiliki kriteria tertentu, misalnya dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus masih dapat di cover dari ketersediaan dana kas P3A. Dana kas ini dikumpulkan dari Zakat Padi (*Pedee le*). Keputusan untuk menyelesaikan masalah di atas dibicarakan dan diputuskan bersama dalam rapat ini.

Bila kasus yang dilaporkan tidak dapat ditangani langsung oleh lembaga, khususnya berkaitan dengan dana, maka rapat pengurus yang membahas kasus tersebut akan bermuara pada penyiapan proposal yang ditujukan kepada Dinas-Dinas terkait khususnya Dinas Sumber Daya Air. Disinilah letak kendala utamanya. Untuk menunggu jawaban atas proposal yang masuk, masyarakat harus menunggu dalam kurun waktu yang cukup lama. Durasi menunggu ini, kadangkala bisa mencapai 2 tahun. Dalam menunggu jawaban tersebut, pengurus P3A bersama dengan TPP akan melakukan lobby-lobby ke Dinas-dinas terkait.

Pengaduan/ proposal yang masuk ke dinas-dinas terkait, akan *beradu tanding* dengan pengaduan desa lainnya, untuk mendapatkan posisi prioritas penanganan. Perjuangan P3A dalam merebut posisi prioritas penanganan, haruslah melalui rapat pleno I hingga rapat pleno IV. Setiap rapat pleno tersebut, memiliki cakupan wewenang masing-masing yang saling berkelanjutan.

Wewenang setiap Pleno tersebut akan diuraikan berikut ini:



Dalam perjalanannya, tidak semua tahapan ini dijalankan sesuai dengan perencanaan. Dari temuan yang didapat, beberapa P3A menyampaikan bahwa keputusan sudah dicapai pada pleno II, sehingga tidak perlu pleno lanjutan, seperti yang disampaikan oleh P3A di desa Pante Rakyat Kecamatan Babah Rot Kabupaten Aceh Barat Daya. Selain pemangkasan pleno ini, P3A juga menyampaikan bahwa banyak kendala yang dihadapi pada setiap rapat pleno tersebut. Misalnya, walaupun sudah menunggu respon yang cukup lama atas pengajuan proposal, besar sekali peluang terhadap penambahan jumlah kerusakan yang terjadi karena keterlambatan penanganan. Pada saat pengajuan tersebut mendapat respon untuk diperbaiki (pengakuan terjadi pada pleno I) yang ditandai dengan kegiatan pembuktian lapangan (survei), maka tim survey tidak memasukkan angka kerusakan yang baru (sesuai dengan tingkat kerusakan yang bertambah akibat keterlambatan penanganan). Alasan yang dikemukakan oleh tim survey, karena penambahan kerusakan yang baru tidak tercover dalam pengajuan proposal awal.

Kendala-kendala ini tidak berhenti di sini, P3A dan para petani tetap dibingungkan dengan data yang diajukan tim survei tidak sesuai dengan fakta di lapangan, gambar yang dirancang oleh konsultan tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perbaikan oleh petani dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal yang tidak disesuaikan dengan perubahan harga pasar yang terbaru dan jadwal pengiriman dana yang sangat terlambat (mendekati berakhirnya masa pelaksanaan program). Sebagian besar P3A, menyampaikan bahwa mereka telah melakukan beberapa upaya untuk penyesuaian agar pelaksanaannya dapat memberikan manfaat yang maksimal, namun upaya ini sering sekali tidak mendapat respon baik. Dan karena kebutuhan yang mendesak dan juga akibat posisi bargaining yang lemah, akhirnya masyarakat terpaksa menerima keputusan tersebut untuk diimplementasikan di wilayah mereka.

Dalam berbagai proses penyelesaian masalah, partisipasi masyarakat tidak banyak terjadi. Hanya dalam fase perencanaan dan pelaksanaan saja partisipasi ini masih cukup kuat, akan tetapi partisipasi perempuan tetap saja minim dalam berbagai fase. Pada fase pengawasan dan evaluasi, keterlibatan masyarakat sangatlah minim. Penekanan pengawasan dan evaluasi ini juga sangat dangkal dan kaku, misalnya melihat realisasi budget dan kesesuaian gambar dengan pelaksanaan di lapangan. Semua pelaksanaan harus berjalan sesuai dengan yang direncanakan tanpa mau melihat perubahan kondisi dan dinamika masyarakat yang terjadi. Metode yang digunakan untuk pengawasan dan evaluasi ini dilakukan sendiri oleh Dinas dan lembaga dengan keterlibatan masyarakat yang minim. Biasanya pengawasan dan evaluasi dilakukan dengan menemui langsung pelaksana proyek dan petani yang umumnya laki-laki, belum ada upaya yang dilakukan oleh tim pengawas untuk menemui petani perempuan untuk mendengarkan masukan tentang dampak dan manfaat yang dirasakan oleh petani perempuan.

Bila dilihat dari struktur P3A di berbagai desa penelitian, sedikit sekali keterlibatan perempuan sebagai pengurus, walaupun jumlah petani perempuan nyaris sama banyak dengan laki-laki. Demikian juga halnya dengan kelembagaan di sektor kelautan dan perikanan (*Panglima Laot*) yang berada di level kecamatan.

Selain dari *Keujreun Blang* dan *Panglima Laot*, keberadaan lembaga lain juga mempunyai posisi penting dalam pembangunan desa. Peran dan tugas otoritas lainnya dapat dijabarkan secara umum untuk wilayah penelitian sebagai berikut:

- Melahirkan kebijakan-kebijakan lokal.
- Menjalankan peran-peran administratif desa.
- Penyelesaian konflik-konflik internal desa (kasus-kasus KDRT, kekerasan terhadap perempuan, sengketa tanah, masalah rumah tangga) maupun konflik-konflik lintas desa.

- Menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan kebutuhan masyarakat untuk menunjang pembangunan desa.
- Memfasilitasi kegiatan-kegiatan di desa.
- Memfasilitasi kegiatan untuk membantu masyarakat desa yang kurang mampu, terutama menerapkan kebiasaan gotong royong dari masyarakat itu sendiri.

Untuk melakukan pembangunan desa, kepengurusan lembaga lokal ini biasanya diberikan kepada masyarakat setempat. Selain untuk memberdayakan masyarakat desa, juga karena masyarakat desa yang merasakan masalah dan yang paling paham akan kebutuhan mereka. Keterlibatan anggota masyarakat dalam lembaga lokal sangat beragam, kelompok pemuda dan kelompok dewasa. Hingga saat ini, khususnya untuk lokasi desa penelitian, belum ada keterlibatan perempuan untuk mewakili kelompok perempuan di dalam lembaga lokal tersebut.

Keadaan ini diperparah lagi dengan belum adanya kebijakan yang mengatur keharusan keterlibatan perempuan. Ini dipengaruhi oleh pandangan sebagian masyarakat yang menggagap perempuan sebagai masyarakat kelas dua (*second class*), yang tidak paham dengan ritme dan dinamika pembangunan desa. Wilayah domestik yang sangat identik dengan perempuan, juga menjadi kendala yang signifikan untuk upaya melibatkan perempuan dalam kegiatan publik, sehingga perempuan ditempatkan sebagai kelompok pelaksana keputusan yang dilahirkan oleh lembaga yang pengurusnya semuanya terdiri dari laki-laki. Keputusan-keputusan tersebut belum tentu mengakomodir kebutuhan kelompok perempuan dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Kondisi ini menjadi bertolak belakang dengan tujuan ideal lahirnya sebuah lembaga, dimana setiap keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga ini haruslah memberikan manfaat bagi seluruh masyarakatnya, baik laki-laki maupun perempuan.

Keterlibatan perempuan hanya dominan pada lembaga yang sifatnya tidak berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk publik. Misalnya dalam lembaga PKK di tiap-tiap desa. Keterlibatan perempuan dalam struktur ini sangat bergantung pada posisi/jabatan yang sedang dipegang oleh suami. Istri Kepala Desa akan menjadi Ketua PKK secara otomatis. Jabatan ini akan terus dipegang selama suami masih menjabat posisi Kepala Desa, tanpa melihat kemampuannya untuk mengelola lembaga tersebut. Karena lemahnya kemampuan manajerial ini, sering sekali dalam merekrut pengurus lainnya, ketua PKK mengandalkan kerabat atau orang dekat disekelilingnya untuk menjadi pengurus. Tidaklah heran bila temuan yang didapat, tidak satupun PKK menjadi lembaga yang aktif dalam menyuarakan dan memberdayakan perempuan. Peran yang masih tetap dijalankan oleh sebagian besar lembaga PKK, hanya peminjaman dan penyewaan peralatan rumah tangga untuk kebutuhan pesta/*Khauri*.

Selain PKK, ada juga lembaga yang seluruh anggotanya dijabat oleh perempuan, seperti kelompok wirid yasin, kelompok simpan pinjam perempuan, kelompok PEKKA, kelompok pengajian dan kelompok usaha mikro/industri rumah tangga. Kelompok simpan pinjam dan kelompok PEKKA secara umum cukup punya kapasitas untuk memenuhi hak-haknya secara umum, karena telah mendapatkan pendampingan yang cukup baik dari lembaga penyelenggaranya, akan tetapi keterlibatan mereka dalam lingkup publik juga masih belum cukup baik, misalnya keterlibatannya dalam rapat-rapat desa tetap minim. Jadi dapat tergambarkan bahwa kehadiran dan keterlibatan perempuan yang maksimal hanya didapat didalam kelompok-kelompok perempuan saja. Ketika keanggotaan berasal dari kelompok campuran (laki-laki dan perempuan), maka kehadiran dan peran perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap dan diletakkan pada posisi yang tidak strategis. Belum adanya pengakuan terhadap potensi yang dimiliki perempuan juga tergambar dalam minimnya keterlibatan perempuan baik secara individu maupun lembaga/kelompok dalam rapat-rapat penting di desa untuk merumuskan pembangunan desa.

2. Lembaga di Luar Pemerintahan Desa

Aceh saat ini sedang menjalankan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dari kehancuran yang diakibatkan oleh konflik dan bencana alam. Guna mempercepat proses ini, banyak lembaga non pemerintah baik nasional maupun internasional yang terlibat melaksanakan pembangunan bersama dengan pemerintah. Dalam menjalankan program-program kerjanya, banyak lembaga yang belum melakukan pendekatan yang sensitif gender. Sasaran utama dari kebanyakan program lebih difokuskan pada upaya pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik. Hal inipun belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan perempuan. Sebut saja kasus pembangunan rumah korban konflik dan Tsunami, pembangunan irigasi dan lainnya.

Dari penjelasan yang diberikan oleh perempuan, banyak sekali bangunan yang ada tidak memenuhi standar kebutuhan yang diharapkan perempuan, misalnya MCK yang dibangun di luar rumah dengan ketersediaan air (baik jumlah dan kualitas) yang sangat rendah. Hal ini tidak saja mengganggu kesehatan perempuan, khususnya kesehatan reproduksi, tapi juga akan sangat berpengaruh pada keamanan perempuan saat mengakses MCK yang berada di luar rumah, baik bahaya yang disebabkan karena jarak dan cahaya yang menerangi juga bahaya yang disebabkan oleh perilaku manusia.

Salah satu penyebab timbulnya permasalahan ini adalah, perempuan menjadi sangat jarang dilibatkan dan diminta pandangannya terhadap kegiatan/program yang akan dilakukan dengan berdalih untuk melindungi perempuan dan tidak ingin menambah beban perempuan. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh pandangan masyarakat kalau perempuan tidak paham dengan urusan pembangunan fisik, maka tidak ada upaya apapun yang dilakukan para lembaga dan masyarakat untuk melakukan pendekatan-pendekatan agar perempuan mau/dapat berkontribusi dalam menyumbangkan ide dan tenaganya. Bilapun ada upaya yang dilakukan untuk melibatkan perempuan, maka hanya sebatas mengajak perempuan-perempuan tertentu,

misalnya istri atau kerabat para pengurus atau otoritas desa, untuk datang tetapi tanpa memberikan kontribusi apapun. Kehadiran mereka hanya menjadi legitimasi bahwa pertemuan tersebut sudah melibatkan perempuan, yang dikaitkan dengan pernyataan bahwa program sudah sensitif gender.

Keadaan di atas tidak hanya dilakukan oleh lembaga non pemerintah tetapi juga dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah/BRR. Hal ini dilakukan dengan membiarkan/belum mengambil langkah apapun sebagai upaya meminimalisir ketimpangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Selain membiarkan, dari data yang ditemukan di lapangan, pemerintah/BRR juga melakukan pengabaian terhadap potensi perempuan. Ketimpangan dan kondisi ini terjadi karena :

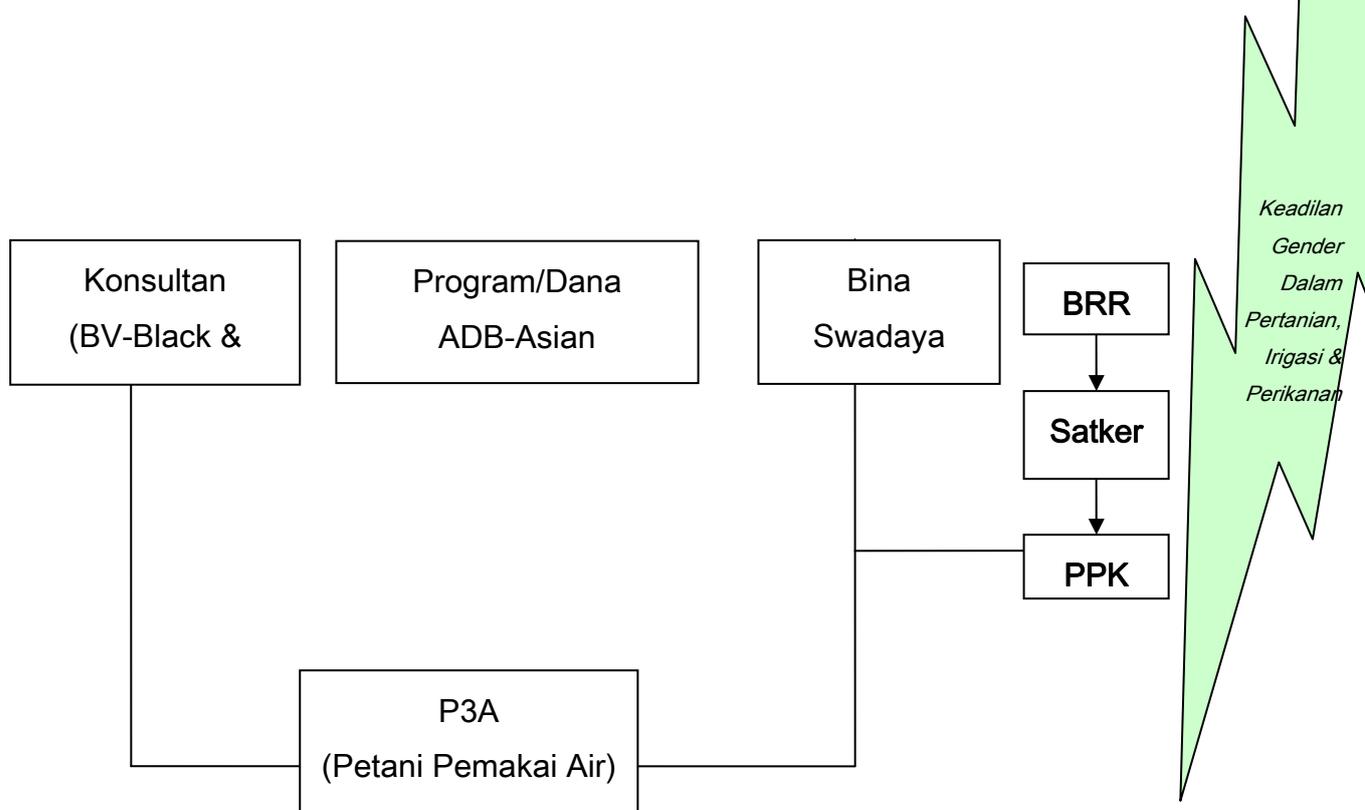
1. Masa anggaran. Yang dimaksud dengan point ini adalah, bahwa setiap anggaran dana yang diajukan, pengesahannya selalu dilakukan menjelang berakhirnya masa pelaksanaan, sehingga para pelaksana lebih memilih untuk langsung mencairkan dan melaksanakan program tanpa mempertimbangkan keterlibatan dan dampak program terhadap perempuan dan laki-laki, dari pada harus membiarkan dana tersebut beku/tidak dapat dicairkan.
2. Target waktu pelaksanaan, yang direncanakan sering sekali tidak sistematis dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Sehingga kesiapan dan kecocokan proyek tidak menjadi faktor yang harus dipertimbangkan lagi, karena yang terpenting adalah penyelesaian proyek.
3. Pelaksana, baik pelaksana lapangan maupun konseptor proyek tidak memiliki sensitifitas gender yang baik, sehingga setiap masalah dan kebutuhan yang ada di jeneralkan pada masalah dan kebutuhan yang diungkapkan oleh laki-laki saja, tentunya yang disampaikan melalui rapat untuk merumuskan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

4. Lemahnya koordinasi dan komunikasi antara pelaksana lapangan, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan para konseptor yang berada di manajemen.

Berkaitan dengan koordinasi ini dapat digambarkan suatu contoh dalam program pertanian. Ketidak-jelasan koordinasi KТПP (Koordinator Tenaga Pendamping Petani) dengan TPP (Tenaga Pendamping Petani) menjadi contoh yang menarik. Bila mempelajari perannya, TPP seharusnya bertanggungjawab langsung kepada KТПP. Tapi karena koordinasi yang tidak segaris, TPP malah tidak bertanggung jawab langsung pada KТПP tapi bertanggungjawab kepada lembaga yang menaunginya (Bina Swadaya). Sementara KТПP berada pada garis hirarkhi dengan konsultan/BV (Black and Veatch). Secara garis besar, yang menjadi tanggungjawab KТПP (koordinator Tenaga Pendamping Petani) adalah :

- Melakukan pemberdayaan dan pengembangan P3A
- Pendampingan Konstruksi SP3 (Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan) secara Partisipatif dengan melibatkan P3A
- Penguatan kelompok P3A, sesuai dengan 5 BHP (Bidang Hasil Pokok)

Artinya, yang berhak menilai kinerja TPP adalah Bina Swadaya bukan KТПP. Dalam kondisi ini intervensi yang dapat dilakukan oleh KТПP terhadap TPP juga menjadi sangat terbatas. Dampaknya, saat TPP menyampaikan kasus dan kebutuhan yang dialami oleh petani dampungannya kepada Bina Swadaya, maka kasus tersebut akan mentok di Bina Swadaya, karena tidak ada garis koordinasi yang jelas antara BV dan Bina Swadaya. Berikut skema sederhana koordinasinya dapat digambarkan sebagai berikut



Keterangan:

KTTP tidak memiliki garis tegas dengan TPP karena TPP berada langsung di bawah LSM Bina Swadaya, sementara Satker merupakan pelaksana dari program/ dana BRR yang juga di gunakan oleh TPP dan P3A untuk membangun konstruksi.

Keberadaan lembaga-lembaga ini tidak sepenuhnya membawa manfaat bagi masyarakat secara luas dan perempuan khususnya. Bantuan-bantuan yang diberikan, sering tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Bantuan yang diberikan tidak berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi masyarakat yang seharusnya dianalisis dengan menggunakan sensitifitas gender. Terlihat bahwa bantuan yang diberikan hanya berdasarkan pada pelaksanaan proyek semata. Karena ketidak-sesuaian ini tidak menjadi ukuran dalam pelaksanaan, akibatnya bantuan tersebut tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Seperti kasus yang terjadi di desa Pundi, ketika perempuan selama ini banyak memiliki akses dan penguasaan terhadap pemeliharaan hewan ternak unggas seperti ayam dan bebek di lingkungan rumahnya, akan tetapi pada saat pemberian penyuluhan tentang *flu burung* yang diundang untuk mendapatkan materi tersebut justru para laki-laki. Kasus lain seperti yang terjadi di Matang Lada ketika ada

bantuan *hand-tractor*. Bantuan ini tidak bisa dimanfaatkan langsung pada saat diterima, karena lahan sawah tadah hujan mereka yang belum mulai direhab, sehingga alat tersebut akhirnya dijual dan sampai sekarang menimbulkan konflik bagi masyarakat akibat uang hasil penjualannya belum diputuskan untuk diberikan kepada siapa dan dipergunakan untuk apa.

D. Kebutuhan Dan Harapan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka secara umum ada beberapa kebutuhan dan harapan yang disampaikan oleh para responden yaitu:

1. Berkaitan dengan Profil Kegiatan Masyarakat

a. Kegiatan Produktif

➤ Adanya pembagian peran yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan, baik dalam bidang domestik (rumah tangga) maupun dalam bidang publik (di luar rumah tangga). Karena hal ini sangat menghambat perempuan untuk dapat berperan aktif di dalam berbagai bidang. Perempuan hampir tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembangan diri. Hal ini tentu saja berimplikasi pada minimnya keterlibatan perempuan dalam politik dan sosial kemasyarakatan. Perempuan jarang dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pembangunan-pembangunan desa, sehingga kebutuhan-kebutuhan mereka jarang diakomodir sebagai kebutuhan prioritas masyarakat.

➤ Pengembangan teknologi sangat diperlukan oleh kaum perempuan, terutama teknologi di bidang pertanian yang berguna untuk meringankan dan mengefisienkan pekerjaan pertanian yang juga dilaksanakan oleh perempuan. Perempuan selama ini banyak

berkecimpung dalam pertanian sejak turun temurun, tetapi pengembangan pengetahuan mereka tentang cara-cara baru (inovasi) rendah. Sehingga perempuan harus mengeluarkan waktu serta tenaga yang besar sementara hasilnya juga kurang maksimal. Peningkatan kapasitas perempuan dapat dilakukan melalui training/penyuluhan dan sebagainya.

✚ Bantuan yang diberikan berupa alat-alat pendukung di sektor pertanian haruslah diberikan tepat guna dan tepat waktu serta dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya bantuan *hand tractor* yang diterima oleh masyarakat tidak bisa digunakan untuk lahan tanaman padi, tetapi *hand tractor* tersebut lebih cocok untuk lahan tanaman palawija. Sementara pada saat itu kebutuhan masyarakat adalah *hand tractor* yang dapat mengolah tanah/lahan untuk tanaman padi. Selain itu dengan jumlah alat yang terbatas mengakibatkan masa musim tanam padi tidak dapat dilakukan secara bersamaan, karena harus menunggu giliran pemakaian *hand tractor* tersebut. Masalah lainnya adalah harga sewa alat tersebut lumayan mahal sehingga cukup memberatkan masyarakat.

✚ Diharapkan adanya penyediaan pupuk, pestisida (racun hama) dengan harga yang murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat petani. Hal ini merupakan salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh petani dalam pengelolaan lahan. Terkadang mereka harus bekerja di sektor lain untuk menghasilkan uang sehingga mampu membeli pupuk dan lain sebagainya. Di samping itu mereka juga masih harus memikirkan kebutuhan sehari-hari dalam keluarga (stok pangan keluarga) karena hasil panen padi tidak setiap bulan ada. Ada banyak kasus dimana para petani terkadang harus membeli padi lagi untuk makan sehari-hari karena stok yang ada tidak mencukupi, hal ini dikarenakan biaya produksi tidak signifikan dengan hasil yang diperoleh.

- Dinas Pertanian harus memberikan informasi tentang cara-cara penggunaan pupuk dan racun kepada masyarakat petani (laki-laki dan perempuan) untuk pencegahan dari dampak pemakaian pupuk dan racun tersebut bagi kesehatan. Dalam keseharian para petani kurang memikirkan tentang kesehatan mereka sebagai dampak dari cara kerja yang tidak sehat. Apalagi perempuan, hal ini sangat beresiko bila dikaitkan dengan kesehatan reproduksinya.
- Berbagai pihak harus mendorong petani untuk menggunakan cara-cara tradisional dalam upaya pembasmian hama dan pupuk tanaman karena selain murah juga tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Berdasarkan pengalaman cara-cara ini jauh lebih efektif dan sudah dilakukan sejak dahulu di beberapa tempat. Akan tetapi saat ini karena banyak beredar pupuk dan lain sebagainya, secara bebas tanpa penjelasan yang cukup, para petani akhirnya memilih pupuk tersebut tanpa pengetahuan jelas tentang resikonya.
- Bantuan yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan informasi yang disampaikan para petani bahwa menurut mereka jarang sekali pihak pemberi bantuan terlebih dahulu membuat pertemuan untuk menanyakan masalah dan kebutuhan mereka. Petani biasanya hanya datang dan menerima saja bantuan tersebut tanpa bisa memberi masukan walaupun bantuan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.
- Sebaiknya bantuan harus langsung disalurkan ke kelompok tani atau kelompok-kelompok lainnya, tidak melalui kepala desa (Kades/*Keuchik*). Karena selama ini sudah banyak bantuan yang diberikan tetapi tidak langsung diterima oleh petani. Dan juga

banyak yang disalah-gunakan atau diterima oleh orang yang tidak berhak.

- Harus ada upah yang adil antara perempuan dan laki-laki menurut jenis pekerjaan dan beban kerjanya. Khusus tentang perbedaan upah tersebut beberapa perempuan dan laki-laki menyampaikan bahwa memang wajar ada perbedaan tersebut bila dilihat secara fisik, misalnya berapa besar yang mampu diangkat atau dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan. Tetapi perbedaan upah ini menjadi tidak adil bila dilihat dari jenis kelaminnya dan presentasi upahnya.
- Perempuan mengharapkan adanya kegiatan alternatif yang dapat menunjang kebutuhan keluarga karena tidak dapat mengharapkan sepenuhnya dari kerja-kerja di sektor pertanian, berkaitan dengan persoalan yang dihadapi selama ini seperti gagal panen karena hama, pembangunan irigasi teknis yang belum dilakukan, terbatasnya alat-alat kerja yang mendukung sektor pertanian, misalnya perlu mengembangkan industri rumah tangga yang dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Diharapkan pembangunan konstruksi harus tepat waktu karena pembangunan konstruksi yang lamban akan mengganggu musim tanam petani. Misalnya para petani ketika akan turun ke sawah berdasarkan hasil keputusan rapat *Kejruen BlangP3A*, ditetapkan bahwa pada bulan Februari, namun pada saat musim ke sawah tersebut proses pembangunan konstruksi/Rehabilitasi yang diharapkan sangat lamban, bahkan ada yang belum dimulai. Hal ini membuat proses penanaman padi di sawah menjadi terkendala karena tidak tersedia air yang cukup. Keterlambatan Rehab ini juga terkendala akibat dari adanya birokrasi yang panjang dan rumit. Misalnya pengajuan proposal sudah dilakukan oleh salah satu P3A pada awal tahun tetapi realisasinya baru ada 2 tahun berikutnya.

b. Kegiatan Reproduksi

- Adanya pembagian peran yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan, baik dalam peran domestik (rumah tangga) maupun dalam bidang publik (diluar rumah tangga), supaya tidak terlalu banyak beban kerja yang harus dilakukan oleh perempuan sehingga mereka punya cukup waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya di luar rumah.
- Pos-pos kesehatan yang ada di desa-desa lebih aktif lagi dalam upaya membantu proses pemulihan dan pemeliharaan kesehatan perempuan dan anak, hal ini dikaitkan dengan beban kerja yang banyak bagi perempuan yang berpengaruh pada kondisi kesehatan.
- Pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan secara gratis dengan kualitas yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena masalah kesehatan masyarakat menjadi masalah yang sangat serius di masyarakat.
- Memberikan kebebasan pada perempuan untuk memilih dan menentukan keputusan untuk menggunakan alat-alat kontrasepsi.
- Pemerintah diharapkan dalam memberikan penyuluhan berkaitan dengan kesehatan, lingkungan haruslah melibatkan laki-laki dan perempuan. Karena kesehatan keluarga dan lingkungan bukan tanggung jawab perempuan saja.
- Adanya kegiatan-kegiatan seperti diskusi/ceramah yang bertujuan memberikan pemahaman kepada laki-laki dan perempuan tentang hak dan tanggung jawab khususnya yang berkaitan dengan peran-peran domestik.

c. Kegiatan Politik dan Sosial Kemasyarakatan

- Rapat gampong sebaiknya melibatkan perempuan dan laki-laki karena selama ini pengumuman undangan rapat selalu ditujukan hanya bagi laki-laki saja. Sangat diharapkan terlebih dahulu diberikan pembekalan/penguatan wawasan perempuan sehingga perempuan dapat lebih kritis mengeluarkan pendapatnya dalam forum-forum rapat desa dan waktu rapat juga disesuaikan dengan kondisi perempuan (siang atau sore hari), saat perempuan tidak mempunyai banyak aktivitas domestik dan juga tidak sedang menjalankan aktivitas produktif.

- Undangan rapat sebaiknya disampaikan langsung atau dapat juga disampaikan dengan cara tertulis dan langsung ditujukan kepada perempuan dan atau laki-laki.

- Rapat sebaiknya dilakukan pada siang atau sore hari akan tetapi boleh juga dilakukan pada malam hari jika berkaitan dengan bantuan-bantuan dan perencanaan pembangunan desa. Selain itu sebaiknya rapat-rapat gampong dilakukan pada hari-hari dimana masyarakat tidak melakukan aktifitasnya seperti hari jumat.

- Sebaiknya ada rapat khusus untuk perempuan sebelum mereka ikut dalam rapat yang lebih besar /umum (laki-laki dan perempuan). Dalam rapat ini seluruh perempuan dapat menyampaikan aspirasinya dengan bebas, karena berbicara dalam kelompok mereka sendiri akan membuat perempuan merasa lebih aman. Hal ini dikarenakan perempuan telah dikondisikan untuk tidak terlibat dalam pertemuan-pertemuan publik.

- Untuk rapat besar yang melibatkan laki-laki dan perempuan harus ada perwakilan perempuan minimal 40 % dari keseluruhan peserta.

Jadi peserta dalam rapat khusus perempuan, akan mengirimkan wakilnya untuk hadir di rapat besar. Keterwakilan ini harus dalam jumlah yang representatif, yaitu minimal 40 % dari jumlah keseluruhan peserta rapat. Apabila jumlah ini belum tercapai, rapat dapat ditunda pelaksanaannya.

- Perlu dibentuk kelompok-kelompok dan forum diskusi Perempuan, karena menurut para responden, forum ini sangat efektif untuk saling bertukar pengalaman, proses peningkatan kapasitas, saling memberi masukan untuk memecahkan masalah-masalah di antara mereka, baik berkaitan dengan persoalan reproduktif (rumah tangga), kegiatan produktif dan kegiatan politik dan sosial kemasyarakatan.
- Sebaiknya semua hasil/keputusan rapat-rapat yang telah dilakukan diinformasikan kembali kepada perempuan secara umum, karena tidak semua mereka bisa hadir pada rapat tersebut. Meskipun selama ini sebagian perempuan mendapatkan informasi tentang hasil rapat dari suaminya, tetapi menurut perempuan hal ini tidak cukup dan mereka tidak puas karena tidak semua informasi tersebut disampaikan. Biasanya yang disampaikan hanya terbatas pada hal-hal yang ditanyakan saja.
- Usulan dan pendapat perempuan harus dimasukkan dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan yang ada di desa. Tetapi yang menjadi penting juga pada saat proses pengambilan keputusan, harus dipastikan berapa besar jumlah yang peserta yang hadir antara laki-laki dan perempuan, misalnya 40% dari peserta harus perempuan.

2. Berkaitan Dengan Akses Penguasaan Terhadap Sumber Daya Alam

a. Sumber Daya Alam: Tanah, Rumah, Sawah, Kebun, Gunung, Tambak, Sungai dan Laut

➤ Perempuan dan laki-laki harus mendapatkan akses dan penguasaan yang sama terhadap sumber daya tanah, rumah, sawah, kebun, tambak, sungai dan laut. Meskipun di dalam praktek keseharian kaum perempuan menyebutkan harus ada musyawarah antar laki-laki (suami) dan perempuan (istri) untuk memutuskan pengelolaan dan pengalihan sumber daya kepada pihak lain. Khusus untuk harta hibah/warisan yang diperoleh dari pihak keluarga perempuan, maka pihak perempuan mengharapkan memiliki akses dan penguasaan sepenuhnya. Untuk asset yang bersumber dari bantuan, kepemilikannya sebaiknya atas nama suami dan istri, dan tidak atas nama suami saja, sehingga akses dan penguasaan mereka terhadap aset tersebut menjadi sama.

➤ Untuk mendorong adanya akses dan penguasaan yang sama antara laki-laki dan perempuan maka harus dilakukan penyadaran untuk perubahan pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dan laki-laki yang berkaitan dengan akses dan penguasaan terhadap sumber daya alam.

➤ Perempuan dan laki-laki harus terlibat aktif dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan karena itu harus diberikan peluang dan penguasaan yang sama terhadap sumber-sumber daya alam tersebut.

b. Hasil Sumber Daya Alam: Sawah, Kebun, Gunung, Tambak, Sungai, Laut dan Hutan (Gunung)

➤ Perempuan dan laki-laki harus mendapatkan akses dan penguasaan yang sama terhadap hasil panen, misalnya hasil panen padi, kelapa, pinang, buah-buahan, sagu dan lain sebagainya, karena mulai dari proses penanaman, pemeliharaan hingga memanen perempuan dan laki-laki melakukan kegiatan tersebut secara bersama-sama.

➤ Perempuan harus diberikan kepercayaan bahwa mereka mampu dan memiliki cara-cara sendiri (soal ketelitian dan kesabaran) tentang penyiapan hasil panen maupun hasil sumber daya alam lainnya sebelum dijual pada pihak lain. Misalnya bagaimana pemeliharaan/penyimpanan dan proses pengepakan (memasukkan dalam karung atau wadah lainnya) tanpa mengurangi kualitas hasil panen tersebut, sehingga *toke/mugee* mau membeli langsung dari mereka dengan harga yang lebih baik.

c. Akses dan Penguasaan Terhadap Informasi

➤ Perempuan harus dilibatkan dalam berbagai penyuluhan, pelatihan dan penataran yang berkaitan dengan bidang pertanian, peternakan dan kesehatan, sehingga dapat membantu peran perempuan di dalam bidang tersebut. Jumlah keterlibatan ini minimal 40 % dari jumlah peserta.

➤ Perempuan harus diberikan pelatihan untuk peningkatan kapasitas mereka yang berkaitan dengan manajemen organisasi, pemasaran, analisis pasar dan pembukuan yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan produktif. Jumlah keterlibatan ini minimal 40 % dari jumlah peserta.

- Perlu adanya cara-cara alternatif untuk penyampaian informasi yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan dan laki-laki secara adil misalnya penyampaian informasi dari mulut ke mulut atau secara tertulis yang ditujukan langsung baik kepada laki-laki maupun perempuan. Selain itu bisa juga informasi (pengumuman) disampaikan melalui *microphone* tetapi harus ditujukan untuk laki-laki dan perempuan. Informasi yang dimaksud bukan hanya yang berkaitan dengan kesehatan, posyandu, tetapi juga rapat-rapat, gotong royong dan lain sebagainya.
- Adanya upaya penyediaan sarana informasi yang bisa di akses oleh masyarakat, namun hal ini harus dibarengi dengan usaha peningkatan kemampuan baca tulis serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya budaya membaca.

d. Hubungan Kelembagaan

- Dalam organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) diharapkan ada perempuan yang menempati posisi di dalam struktur. Karena peran perempuan di bidang pertanian sangat besar sehingga keterlibatan mereka bukan hanya sebagai anggota saja. Untuk kepentingan ini keterlibatan perempuan dalam rapat-rapat pemilihan pengurus, baik berkaitan dengan jumlah (prosentase keterlibatan), waktu rapat dan cara pengambilan keputusan (melalui voting) akan mempengaruhi terpilih atau tidaknya perempuan dalam struktur.
- Perlu adanya mekanisme proses pengambilan keputusan yang lebih adil agar keterlibatan perempuan dapat lebih maksimal, contoh pada saat pemilihan pengurus untuk Lembaga P3A yang ada di Desa Cibrek Tunong Kecamatan Syamtalira Aron, pemilihan

pengurus disepakati dilakukan dengan cara voting dan jumlah yang hadir sebagian besar adalah perempuan. Ada 3 calon yang diajukan yaitu 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan. Pemilihan dilakukan oleh perempuan dan laki-laki tapi akhirnya calon perempuan yang terpilih sebagai ketua P3A melalui proses voting.

- Fungsi-fungsi manajerial di P3A harus mempertimbangkan komposisi gender (laki-laki dan perempuan).
- Perlu pelatihan dan perbekalan ilmu untuk anggota dan pengurus P3A supaya dapat menjalankan tugasnya, baik yang bersifat teknis maupun manajerial.
- Pelatihan yang diberikan kepada anggota dan pengurus P3A harus sesuai dengan peran atau ruang lingkup tugasnya. Contohnya pada salah satu P3A, dimana setiap pelatihan baik pembukuan atau teknis operasional semuanya diikuti oleh ketua P3A nya. Sementara ketua tersebut tidak pernah berbagi pengetahuan dan pengalamannya pada pengurus lain atau anggota, sehingga hasilnya tidak memberikan dampak positif bagi penguatan kelembagaan P3A tersebut, termasuk kepada anggotanya yang perempuan.
- Mendorong agar P3A bisa mandiri, baik untuk memahami penyusunan anggaran, mengelola organisasi dan merencanakan program.
- Diharapkan pembangunan konstruksi harus tepat waktu karena pembangunan konstruksi yang lamban akan mengganggu musim tanam petani dan kerusakan saluran irigasi akan bertambah parah dan biaya yang dibutuhkan juga menjadi lebih banyak, sementara

budget untuk rehab tidak ditambah sesuai dengan kondisi lapangan (tidak ada perbaikan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) di dalam proposal.

- Harus ada transparansi dan keterbukaan atas pelaksanaan setiap proyek pembangunan untuk sektor pertanian, pengairan dan perikanan dengan cara memberikan laporan kepada masyarakat.
- Persyaratan untuk menjadi calon staf atau pelaksana lapangan dalam sebuah lembaga harus mempertimbangkan kemampuan memahami aspek gender sehingga partisipasi laki-laki dan perempuan dapat lebih maksimal.
- Sebaiknya tidak melakukan rangkap jabatan pada struktur lembaga P3A, sehingga kinerja menjadi lebih maksimal dan selain itu rangkap jabatan seperti ini akan menutup kesempatan orang lain untuk berperan, termasuk perempuan.
- Memaksimalkan dan menguatkan kelompok-kelompok yang ada di desa, misalnya kelompok petani, kelompok perempuan dan lain sebagainya.
- Bila ada lembaga-lembaga yang memiliki program pembangunan dalam sektor pertanian, pengairan dan perikanan harus menetapkan kebijakan tentang keterlibatan perempuan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- Bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat seperti boat dan bantuan lainnya harus diberikan atas nama keluarga (suami dan istri) bukan dikhususkan pada laki-laki (suami), sehingga aset, manfaat dan tanggung jawab pemeliharaan terhadap bantuan tersebut ditanggung secara bersama (keluarga).

- Bantuan-bantuan yang diberikan seharusnya tidak menciptakan ketergantungan masyarakat dan harus tepat sasaran, sehingga bantuan yang diberikan tidak menimbulkan perselisihan diantara masyarakat.
- Harus ada kebijakan yang menetapkan prioritas bagi perempuan untuk peningkatan kapasitas khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian, pengairan dan perikanan untuk menunjang pekerjaan yang sifatnya teknis.
- Lembaga-lembaga pelaksana harus menetapkan kebijakan tentang keharusan keterlibatan perempuan dalam proyek, misalnya untuk pembangunan irigasi, minimal pekerjanya 30% perempuan. Untuk terlebih dahulu, perlu penguatan dan penambahan keterampilan perempuan dalam bidang ini. Hal ini baru dapat diwujudkan apabila pelaksanaan proyek direncanakan dengan baik, dan tidak sekedar menyelesaikan proyek secara *kejar tayang*.
- Harus ada koordinasi antar tenaga pendamping lapangan seperti Tenaga Pendamping Petani (TPP), Fasilitator Desa (FD), Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Dinas Pekerjaan Umum/Sumber Daya Air dan Dinas Holtikultura. Hal ini berkaitan dengan kegiatan di sektor pertanian dan pengairan (irigasi). Misalnya pada saat petani mulai akan turun kesawah maka sebaiknya pembangunan irigasi sudah selesai sehingga tidak bermasalah dalam pengairan air ke sawah.
- Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) harus lebih proaktif sehingga dapat membantu petani dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan sektor pertanian.

- Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan Penjaga Pintu Air (PPA) harus orang-orang di sekitar desa sehingga masyarakat cukup mengenal dengan baik dan memudahkan melakukan koordinasi dengan mereka. Namun bila (PPL) atau PPA bukan orang setempat, diharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat petani sehingga masyarakat tahu akan fungsi dan tanggung jawab dari petugas tersebut.

- Ketika melakukan proses pengawasan (monitoring) dan evaluasi terhadap setiap program yang berhubungan dengan sektor pertanian, pengairan dan perikanan, harus melibatkan perempuan dan laki-laki sehingga manfaat dan dampak yang dirasakan oleh perempuan dan laki-laki dapat disampaikan secara langsung untuk perencanaan pembangunan selanjutnya. Proses pengawasan yang dilakukan bukan hanya datang petugas Pekerjaan Umum/ Sumber Daya Air (SDA) atau petugas dari Dinas Pertanian yang langsung datang ke lokasi tetapi sebelumnya harus membuat pertemuan dengan melibatkan perempuan dan laki-laki.

- Laki-laki dan perempuan sama-sama dilibatkan dalam membuat keputusan untuk pembangunan desa. Keterlibatan perempuan juga harus ada dalam setiap lembaga desa dan lembaga luar desa yang fokus pada pembangunan desa.

- Pembangunan desa harus disesuaikan dengan kebutuhan bersama antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya sebelum pelaksanaan pembangunan dilakukan harus dimulai dengan peninjauan kebutuhan berdasarkan permasalahan yang muncul dari perempuan dan laki-laki.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Perempuan banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan produktif, misalnya di sektor pertanian. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab penuh untuk kegiatan reproduktif (dalam rumah tangga). Dominannya keterlibatan perempuan di dua bidang kegiatan di atas tidak signifikan dengan keterlibatannya di bidang politik dan sosial kemasyarakatan di tingkat desa. Minimnya keterlibatan perempuan di bidang ini sangat dipengaruhi oleh beratnya beban dan tanggung jawab perempuan untuk bidang produktif dan reproduktif, sehingga energi perempuan terkuras untuk ke dua bidang ini. Selain itu budaya patriarkhal yang masih melekat di sebagian besar masyarakat dan interpretasi agama yang tidak sensitif pada kebutuhan perempuan juga membuat perempuan kurang mempunyai akses pada pendidikan tinggi dan terhadap informasi, sehingga sulit untuk terlibat dalam bidang politik dan sosial kemasyarakatan.
2. Perempuan dan laki-laki mempunyai akses pada berbagai sumber daya, baik atas tanah, sawah, rumah, tambak maupun terhadap hasil alam. Akan tetapi akses laki-laki jauh lebih besar. Perempuan janda mempunyai akses dan penguasaan penuh terhadap sumber daya yang dimilikinya. Akses dan penguasaan terhadap informasi sedikit sekali dimiliki oleh perempuan, karena ranah pekerjaan perempuan umumnya di lingkup publik, sementara informasi banyak beredar di ruang publik.

3. Dalam kelembagaan yang ada di desa baik kelembagaan internal maupun eksternal, peran perempuan sangat minim. Keputusan-keputusan yang diambil dalam berbagai lembaga baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dan evaluasi perempuan tidak banyak terlibat. Program-program pembangunan yang dilaksanakan juga kurang memperhatikan kebutuhan perempuan.

B. Rekomendasi

a. Kegiatan Produktif dan Reproduksi

- Adanya pembagian peran yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan, baik dalam bidang domestik (rumah tangga) maupun dalam bidang publik (di luar rumah tangga). Karena hal ini sangat menghambat perempuan untuk dapat berperan aktif di dalam berbagai bidang.
- Pengembangan teknologi sangat diperlukan oleh kaum perempuan, terutama teknologi di bidang pertanian yang berguna untuk meringankan dan mengefisienkan pekerjaan pertanian yang juga dilaksanakan oleh perempuan.
- Bantuan yang diberikan berupa alat-alat pendukung di sektor pertanian haruslah diberikan tepat guna dan tepat waktu serta dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan.
- Diharapkan adanya penyediaan pupuk, pestisida (racun hama) dengan harga yang murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat petani.
- Dinas Pertanian harus memberikan informasi tentang cara-cara penggunaan pupuk dan racun kepada masyarakat petani (laki-laki dan perempuan) untuk pencegahan dari dampak pemakaian pupuk dan racun tersebut bagi kesehatan.
- Berbagai pihak harus mendorong petani untuk menggunakan cara-cara tradisional dalam upaya pembasmian hama dan

pupuk tanaman karena selain murah juga tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.

- Bantuan yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- Sebaiknya bantuan harus langsung disalurkan ke kelompok tani atau kelompok-kelompok lainnya, tidak melalui kepala desa (Kades/Keuchik).
- Harus ada upah yang adil antara perempuan dan laki-laki menurut jenis pekerjaan dan beban kerjanya.
- Perempuan mengharapkan adanya kegiatan alternatif yang dapat menunjang kebutuhan keluarga karena tidak dapat mengharapkan sepenuhnya dari kerja-kerja di sektor pertanian.
- Diharapkan pembangunan konstruksi harus tepat waktu karena pembangunan konstruksi yang lamban akan mengganggu musim tanam petani.
- Pemerintah diharapkan dalam memberikan penyuluhan berkaitan dengan kesehatan, lingkungan haruslah melibatkan laki-laki dan perempuan. Karena kesehatan keluarga dan lingkungan bukan tanggung jawab perempuan saja.
- Adanya kegiatan-kegiatan seperti diskusi/ceramah yang bertujuan memberikan pemahaman kepada laki-laki dan perempuan tentang hak dan tanggung jawab khususnya yang berkaitan dengan peran-peran domestik.

b. Kegiatan Politik dan Sosial Kemasyarakatan

- Rapat gampong sebaiknya melibatkan perempuan dan laki-laki karena selama ini pengumuman undangan rapat selalu ditujukan hanya bagi laki-laki saja.
- Undangan rapat sebaiknya disampaikan langsung atau dapat juga disampaikan dengan cara tertulis dan langsung ditujukan kepada perempuan dan atau laki-laki.

- Rapat sebaiknya dilakukan pada siang atau sore hari akan tetapi boleh juga dilakukan pada malam hari jika berkaitan dengan bantuan-bantuan dan perencanaan pembangunan desa.
- Sebaiknya ada rapat khusus untuk perempuan sebelum mereka ikut dalam rapat yang lebih besar/umum (laki-laki dan perempuan).
- Untuk rapat besar yang melibatkan laki-laki dan perempuan harus ada perwakilan perempuan minimal 40 % dari keseluruhan peserta.
- Perlu dibentuk kelompok-kelompok dan forum diskusi Perempuan.
- Sebaiknya semua hasil/keputusan rapat-rapat yang telah dilakukan diinformasikan kembali kepada perempuan secara umum, karena tidak semua mereka bisa hadir pada rapat tersebut.
- Usulan dan pendapat perempuan harus dimasukkan dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan yang ada di desa.

c. Berkaitan Dengan Akses Penguasaan Terhadap Sumber Daya Alam

- Perempuan dan laki-laki harus mendapatkan akses dan penguasaan yang sama terhadap sumber daya tanah, rumah, sawah, kebun, tambak, sungai dan laut. Meskipun di dalam praktek keseharian kaum perempuan menyebutkan harus ada musyawarah antar laki-laki (suami) dan perempuan (istri) untuk memutuskan pengelolaan dan pengalihan sumber daya kepada pihak lain. Khusus untuk harta hibah/warisan yang diperoleh dari pihak keluarga perempuan, maka pihak perempuan mengharapkan memiliki akses dan penguasaan sepenuhnya. Untuk asset yang bersumber dari bantuan, kepemilikannya sebaiknya atas nama suami dan istri, dan tidak atas nama

suami saja, sehingga akses dan penguasaan mereka terhadap aset tersebut menjadi sama.

- Untuk mendorong adanya akses dan penguasaan yang sama antara laki-laki dan perempuan maka harus dilakukan penyadaran untuk perubahan pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dan laki-laki yang berkaitan dengan akses dan penguasaan terhadap sumber daya alam.
- Perempuan dan laki-laki harus terlibat aktif dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan karena itu harus diberikan peluang dan penguasaan yang sama terhadap sumber-sumber daya alam tersebut.
- Perempuan dan laki-laki harus mendapatkan akses dan penguasaan yang sama terhadap hasil panen, misalnya hasil panen padi, kelapa, pinang, buah-buahan, sagu dan lain sebagainya, karena mulai dari proses penanaman, pemeliharaan hingga memanen perempuan dan laki-laki melakukan kegiatan tersebut secara bersama-sama.
- Perempuan harus diberikan kepercayaan bahwa mereka mampu dan memiliki cara-cara sendiri (soal ketelitian dan kesabaran) tentang penyiapan hasil panen maupun hasil sumber daya alam lainnya sebelum dijual pada pihak lain.

d. Akses dan Penguasaan Terhadap Informasi

- Perempuan harus dilibatkan dalam berbagai penyuluhan, pelatihan dan penataran yang berkaitan dengan bidang pertanian, peternakan dan kesehatan, sehingga dapat membantu peran perempuan di dalam bidang tersebut. Jumlah keterlibatan ini minimal 40 % dari jumlah peserta.
- Perempuan harus diberikan pelatihan untuk peningkatan kapasitas mereka yang berkaitan dengan manajemen organisasi, pemasaran, analisis pasar dan pembukuan yang

dapat menunjang kegiatan-kegiatan produktif. Jumlah keterlibatan ini minimal 40 % dari jumlah peserta.

- Perlu adanya cara-cara alternatif untuk penyampaian informasi yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan dan laki-laki secara adil misalnya penyampaian informasi dari mulut ke mulut atau secara tertulis yang ditujukan langsung baik kepada laki-laki maupun perempuan.
- Adanya upaya penyediaan sarana informasi yang bisa di akses oleh masyarakat, namun hal ini harus dibarengi dengan usaha peningkatan kemampuan baca tulis serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya budaya membaca.

e. Hubungan Kelembagaan

- Dalam organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) diharapkan ada perempuan yang menempati posisi di dalam struktur. Karena peran perempuan di bidang pertanian sangat besar sehingga keterlibatan mereka bukan hanya sebagai anggota saja. Untuk kepentingan ini keterlibatan perempuan dalam rapat-rapat pemilihan pengurus, baik berkaitan dengan jumlah (prosentase keterlibatan), waktu rapat dan cara pengambilan keputusan (melalui voting) akan mempengaruhi terpilih atau tidaknya perempuan dalam struktur.
- Perlu adanya mekanisme proses pengambilan keputusan yang lebih adil agar keterlibatan perempuan dapat lebih maksimal. Pemilihan dilakukan oleh perempuan dan laki-laki tapi akhirnya calon perempuan yang terpilih sebagai ketua P3A melalui proses voting.
- Fungsi-fungsi manajerial di P3A harus mempertimbangkan komposisi gender (laki-laki dan perempuan).

- Perlu pelatihan dan perbekalan ilmu untuk anggota dan pengurus P3A supaya dapat menjalankan tugasnya, baik yang bersifat teknis maupun manajerial.
- Pelatihan yang diberikan kepada anggota dan pengurus P3A harus sesuai dengan peran atau ruang lingkup tugasnya.
- Mendorong agar P3A bisa mandiri, baik untuk memahami penyusunan anggaran, mengelola organisasi dan merencanakan program.
- Diharapkan pembangunan konstruksi harus tepat waktu karena pembangunan konstruksi yang lamban akan mengganggu musim tanam petani dan kerusakan saluran irigasi akan bertambah parah dan biaya yang dibutuhkan juga menjadi lebih banyak, sementara budget untuk rehab tidak ditambah sesuai dengan kondisi lapangan (tidak ada perbaikan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) di dalam proposal).
- Harus ada transparansi dan keterbukaan atas pelaksanaan.
- Setiap proyek pembangunan untuk sektor pertanian, pengairan dan perikanan dengan cara memberikan laporan kepada masyarakat.
- Persyaratan untuk menjadi calon staf atau pelaksana lapangan dalam sebuah lembaga harus mempertimbangkan kemampuan memahami aspek gender sehingga partisipasi laki-laki dan perempuan dapat lebih maksimal.
- Sebaiknya tidak melakukan rangkap jabatan pada struktur lembaga P3A, sehingga kinerja menjadi lebih maksimal dan selain itu rangkap jabatan seperti ini akan menutup kesempatan orang lain untuk berperan, termasuk perempuan.
- Memaksimalkan dan menguatkan kelompok-kelompok yang ada di desa, misalnya kelompok petani, kelompok perempuan dan lain sebagainya.
- Bila ada lembaga-lembaga yang memiliki program pembangunan dalam sektor pertanian, pengairan dan perikanan

harus menetapkan kebijakan tentang keterlibatan perempuan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

- Bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat seperti boat dan bantuan lainnya harus diberikan atas nama keluarga (suami dan istri) bukan dikhususkan pada laki-laki (suami), sehingga aset, manfaat dan tanggung jawab pemeliharaan terhadap bantuan tersebut ditanggung secara bersama (keluarga).
- Bantuan-bantuan yang diberikan seharusnya tidak menciptakan ketergantungan masyarakat dan harus tepat sasaran, sehingga bantuan yang diberikan tidak menimbulkan perselisihan diantara masyarakat.
- Harus ada kebijakan yang menetapkan prioritas bagi perempuan untuk peningkatan kapasitas khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian, pengairan dan perikanan untuk menunjang pekerjaan yang sifatnya teknis.
- Lembaga-lembaga pelaksana harus menetapkan kebijakan tentang keharusan keterlibatan perempuan dalam proyek, misalnya untuk pembangunan irigasi, minimal pekerjanya 30% perempuan.
- Harus ada koordinasi antar tenaga pendamping lapangan seperti Tenaga Pendamping Petani (TPP), Fasilitator Desa (FD), Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Dinas Pekerjaan Umum/Sumber Daya Air dan Dinas Holtikultura.
- Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) harus lebih proaktif sehingga dapat membantu petani dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan sektor pertanian.
- Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan Penjaga Pintu Air (PPA) harus orang-orang di sekitar desa sehingga masyarakat cukup mengenal dengan baik dan memudahkan melakukan koordinasi dengan mereka.

- Ketika melakukan proses pengawasan (monitoring) dan evaluasi terhadap setiap program yang berhubungan dengan sektor pertanian, pengairan dan perikanan, harus melibatkan perempuan dan laki-laki sehingga manfaat dan dampak yang dirasakan oleh perempuan dan laki-laki dapat disampaikan secara langsung untuk perencanaan pembangunan selanjutnya.
- Proses pengawasan yang dilakukan bukan hanya datang petugas Pekerjaan Umum/Sumber Daya Air (SDA) atau petugas dari Dinas Pertanian yang langsung datang ke lokasi tetapi sebelumnya harus membuat pertemuan dengan melibatkan perempuan dan laki-laki, keterlibatan komunitas dalam pengawasan akan lebih efektif dibandingkan dengan hanya mengandalkan petugas yang datang dari luar.
- Laki-laki dan perempuan sama-sama dilibatkan dalam membuat keputusan untuk pembangunan desa. Keterlibatan perempuan juga harus ada dalam setiap lembaga desa dan lembaga luar desa yang fokus pada pembangunan desa.
- Pembangunan desa harus disesuaikan dengan kebutuhan bersama antara laki-laki dan perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Irwan, ed. (2006), *Sangkan Paran Gender*, Yogyakarta, Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Asian Development Bank,(tanpa tahun), *Daftar Periksa (Checklist) Gender*.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan UNFPA, (2005), *Panduan dan Bunga Rampai Pengarusutamaan Gender*, Jakarta

Bina Swadaya, (2006), *Profil Desa*

Care, CIDA, *Modul Pelatihan Analisis Gender*.

Chitrawati, Buchori, dkk. (2002) *Meningkatkan Partisipasi aktif Perempuan Belajar dari Pengalaman*, Jakarta, World Bank.

Chuzaifah, Yuniyanti dkk, (2005), *Pengarusutamaan Gender dalam Upaya Membangun Perdamaian*, Jakarta. Search for Common in Indonesia.

Deputi Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan BRR, (2006) *Kebijakan dan Strategi Mengedepankan Kesetaraan Gender dalam Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi di NAD-Nias*, Banda Aceh.

Djohani, Rianingsih, (1996), *Berbuat Bersama Berperan Bersama, Acuan Penerapan Participatory Rural Appraisal*, Bandung, Studio Driya Media.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, (2000), *Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000*, Jakarta, Meneg PP.

Muchtar, Yanti, Missiyah, (2005) *Modul Pelatihan untuk Menumbuhkan & Meningkatkan Sensitifitas Keadilan Gender*, Jakarta, Kapal Perempuan.

Said, H. Mohammad, (1981) *Aceh Sepanjang Abad*, (cetakan kedua)

Seknas Perempuan PEKKA, *Manual Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)*

LAMPIRAN



A. Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya)

1. Desa Padang Bak Jeumpa

Luas desa: 181 Ha.

Jumlah Penduduk

No	Jenis kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki – laki	397 orang	
2	Perempuan	371 orang	
	Total	768 orang	

Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
1	Tani	551 orang	
2	Nelayan	6 orang	
3	Dagang	6 orang	
4	PNS	24 orang	
5	Swasta	80 orang	
6	Tidak bekerja	101 orang	

Fasilitas yang Tersedia

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1	Rumah Tinggal	164 buah	
2	Rumah Ibadah (Masjid dan Meunasah)	2 buah	
3	Sekolah	1 SD dan 1 TPA	

Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Sarjana/Perguruan Tinggi	39 orang	
2	SMU	110 orang	
3	SMP	135 orang	
4	SD	90 orang	
5	Tidak/belum tamat sekolah	391 orang	
	Total	765 orang	

2. Desa Pantee Rakyat

Luas Desa: 25.000 Ha

Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	2755 orang	
2	Perempuan	2685 orang	
3	Total	5440 orang	

Mata Pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
1	Petani	2000 orang	Kondisi usaha lemah
2	Nelayan		Belum terdata
3	Dagang		Belum terdata
4	PNS		Belum terdata
5	Swasta		Belum terdata
6	Tidak bekerja		Belum terdata

Fasilitas yang Tersedia

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1	Rumah Tinggal	990 buah	
2	Rumah Ibadah (Masjid dan Meunasah)		Tersedia tetapi tidak terdata
3	Sekolah	4 SD ,1 SMP,1 SMA dan 9 TPA	
4	Puskesmas	1 buah	
5	MCK umum	8 Buah	

Tingkat Pendidikan Penduduk

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Sarjana/Perguruan Tinggi	20 orang	
2	SMU	100 orang	
3	SMP	212 orang	
4	SD	300 orang	
5	Tidak/belum tamat sekolah	1000 orang	
	Total	1632 orang	

B. Kabupaten Aceh Utara

1. Desa Meunasah Sagoe

Luas Desa: 585.3 Ha.

Jumlah Penduduk

No	Jenis kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki – laki	689 orang	
2	Perempuan	690 orang	
	Total	1379 orang	

Mata Pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
1	Nelayan dan petani tambak	338 orang	
2	Dagang	14 orang	
3	PNS	10 orang	
4	Buruh	146 orang	
5	Supir	8 orang	
	Total	516 orang	

Fasilitas yang Tersedia

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1	Rumah Tinggal	308 buah	
2	Rumah Ibadah (Masjid dan Meunasah)		Rusak
3	Sekolah	1 SD	

Tingkat Pendidikan Penduduk:

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Sarjana/Perguruan Tinggi	32 orang	
2	SMU	40orang	
3	SMP	47orang	
4	SD	229 orang	
5	Tidak/belum tamat sekolah	270 orang	
	Total	618 orang	

2. Desa Matang Lada

Jumlah Penduduk

No	Jenis kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki – laki	665 orang	
2	Perempuan	564 orang	
	Total	1.229 orang	

Mata Pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
1	Nelayan dan petani tambak	533 orang	
2	Dagang	19 orang	
3	PNS	16 orang	
4	Buruh	46 orang	
5	Supir	5 orang	
	Total	Orang	

Fasilitas yang Tersedia

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1	Rumah Tinggal	253 buah	
2	Rumah Ibadah (Masjid dan Meunasah)		Tersedia, ttp tidak terdata jumlahnya
3	Sekolah	3 buah	
4	Puskesmas	1 buah	
5	MCK umum	12 buah	

Lampiran 2

KALENDER MUSIM

A. Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya)

1. Desa Padang Bak Jeumpa Kecamatan Tangan-tangan

Kalender Musim Tahun 2007

BLN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
Sesi	Masa bekerja ke sawah								Masa Jeda (waktu kosong)			

Kegiatan	Musim Kemarau tapi petani mulai melakukan pengolahan dengan memanfaatkan air dari irigasi.	Mengolah lahan (Membajak atau menggarap sawah Bajak/garap sawah)	Persemaian (menabur atau menyemai bibit) dilakukan oleh petani perempuan dan laki-laki	Pemeliharaan (menanam padi, memberi pupuk dan menyemprot obat tahan hama) <p>Catatan : musim hama biasanya pada saat padi mulai bunting</p>	Pemanenan (bagi petani yang menanam di bulan April maka panennya dibulan Juli bagi petani yang menanam dibulan Mei maka panennya dibulan Agustus)	Menanam tanaman palawija	Pengolahan sawah (persiapan untuk penanaman berikutnya)	Persemaian
-----------------	--	--	--	--	---	--------------------------	---	------------

Keterangan :

1. Masa bekerja di sawah
 - Pada desa Padang Bak Jeumpa, terjadi dua kali turun kesawah sehingga petani memiliki 2 kali masa panen dalam setahun
 - Pada tahun 2007, masa turun ke sawah ditetapkan pada Februari namun karena keterbatasan alat (traktor) dan menunggu giliran untuk memanfaatkannya, sebagian petani mulai turun ke sawah di bulan Maret

2. Masa jeda (waktu kosong), untuk mengisi waktu petani melakukan :
 - Menanam palawija
 - Cabai
 - Kacang tanah
 - Kacang hijau
 - Kacang panjang
 - Jagung
 - Ubi Kayu
 - Timun
 - Beternak;
 - Beternak Ayam dan Itik dilakukan oleh petani perempuan
 - Beternak Kerbau dilakukan oleh petani laki-laki
 - Beternak kambing dilakukan secara bersama antara petani laki-laki dan perempuan
 - Berdagang dilakukan secara bersama antara petani laki-laki dan perempuan
 - Menganyam tikar dilakukan oleh petani perempuan
 - Mengumpulkan kayu bakar dilakukan oleh petani perempuan
 - Mencari ikan di laut dilakukan oleh petani laki-laki

2 . Desa Kampong Teungoh Kecamatan Kuala Batee

Kalender musim Tahun 2006

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
Sesi	Musim Jeda (waktu kosong)	Masa bekerja ke sawah											
Kegia Tan	Untuk mengi si waktu kosong petani mena pala wija	Mengolah lahan (Membajak atau menggarap sawah Bajak/garap sawah)	Persemai an (menabur atau menye mai bibit) dilakukan oleh petani perempuan dan laki-laki	Pemeliharaan (menanam padi, memberi pupuk dan menyemprot obat tahan hama)	Catatan : musim hama biasanya pada saat padi mulai bunting		Pema Nenan	Masa Jeda (waktu kosong)	Pengo lahan sawah (persia pan untuk penana man berikutnya)	Persemaia	Pada bulan ini, biasanya masa hama menye rang karena padi mulai bunting	Pema nenan	

Keterangan :

1. Masa bekerja di sawah. Terjadi dua kali turun kesawah sehingga petani memiliki 2 kali masa panen dalam setahun
2. Masa Jeda (waktu kosong), untuk mengisi waktu petani melakukan :
 - o Menanam palawija
 - Cabai
 - Kacang tanah
 - Kacang hijau
 - Kacang panjang
 - Jagung
 - Ubi Kayu
 - Timun
 - Bawang
 - Gambas
 - Terong
 - Bayam
 - Semangka
 - Sawi
 - o Beternak;
 - Beternak Ayam dan Itik dilakukan oleh petani perempuan
 - Beternak Kerbau dilakukan oleh petani laki-laki
 - Beternak kambing dilakukan secara bersama antara petani laki-laki dan perempuan
 - o Berdagang dilakukan secara bersama antara petani laki-laki dan perempuan
 - o Mengambil upahan harian dilakukan oleh petani perempuan
 - o Membuat kue dilakukan oleh petani perempuan
 - o Buruh bangunan dilakukan oleh petani laki-laki

- Menganyam tikar dilakukan oleh petani perempuan
- Mengumpulkan kayu bakar dilakukan oleh petani perempuan
- Mengambil hasil alam :
 - Ikan di laut dilakukan oleh petani laki-laki
 - Bambu dilakukan oleh laki-laki
 - Kayu dilakukan oleh perempuan dan laki-laki
 - Angkut batu dilakukan oleh laki-laki
 - Angkut kerikil dilakukan oleh perempuan
- Berkebun, dilakukan oleh laki-laki dan perempuan
 - Jahe
 - Pala
 - Kunyit
 - Pinang
 - Coklat
 - Salak

3. Desa Pante Rakyat Kecamatan Babah Rot.

Kalender musim tahun 2006

BLN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
Sesi	Masa turun ke sawah			Masa Jeda (Waktu Kosong)								
Kegia Tan	Pemeliharaan untuk padi yang ditanam pada tahun 2005	Pemanenan. Tapi petani mengalami masa gagal panen karena serangan hama (tikus) yang melanda desa dan sawah mereka	Mengosongkan lahan sebagai upaya untuk menghilangkan hama dan menanam tanaman palawija				Gotong royong, pemberian saluran irigasi, persiapan benih	Pengolahan tanah (Membajak atau menggarap sawah Bajak/garap sawah)		Penanaman (saat padi berusia 20 hari, ada hama keong)	Pemeliharaan (penyemprotan hama, penyiangan rumput dan pempukan)	Pemanenan. Tapi petani mengalami masa gagal panen karena serangan hama (keong) yang melanda desa dan sawah mereka

Keterangan :

1. Masa Jeda (waktu kosong), untuk mengisi waktu petani melakukan :
 - Menanam palawija
 - Terong
 - Gambas
 - Cabai
 - Kacang tanah
 - Kacang hijau
 - Kacang panjang
 - Lobak
 - Labu
 - Bayam
 - Beternak
 - Beternak Ayam dan Itik dilakukan oleh petani perempuan
 - Beternak Kerbau dilakukan oleh petani laki-laki
 - Beternak kambing dilakukan secara bersama antara petani laki-laki dan perempuan
 - Berdagang dilakukan secara bersama antara petani laki-laki dan perempuan
 - Mengambil upahan harian dilakukan oleh petani perempuan
 - Membuat kue dilakukan oleh petani perempuan
 - Buruh bangunan dilakukan oleh petani laki-laki
 - Menjahit dilakukan oleh petani perempuan

○ Mengumpulkan kayu bakar dilakukan oleh petani perempuan

○ Mengambil hasil alam:

- Ikan di sungai dilakukan oleh petani laki-laki
- Bambu dilakukan oleh laki-laki
- Kayu dilakukan oleh perempuan dan laki-laki
- Pasir dilakukan oleh laki-laki
- Batu kerikil dilakukan oleh perempuan dan laki-laki

B. Kabupaten Aceh Utara

1. Desa Puntı Kecamatan Syamtalira Bayu

Kalender Musim Tahun 2005

BLN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
Sesi	Tambak											
Kegiatan	Bersih kan tambak, di musim angin timur		Memasukkan bibit, baik ikan maupun bibit	Perawatan; pemupukan, pemberian pakan		Pemanenan, udang atau bandeng		Bersih kan tambak, sekaligus memasukkan bibit	Pemberian pupuk dan pakan		Pemanenan, udang atau bandeng	
Sesi	Masa menunggu karena kegagalan penen, bencana tsunami			Masa pemberi lahan akibat tsunami & hama		Turun ke sawah					Masa jeda/waktu kosong	Turun ke sawah
Kegiatan	Pemanenan, tetapi petani mengalami gagal panen karena hama dan tsunami					Bersih lahan	penyemaian, menanam,	Perawatan, tetapi ada hama burung menyering	Pe ma ne nan	Menanam palawija		Bersih kan lahan, persiapan penanaman berikutnya

Keterangan :

- a. Masa jeda (waktu kosong), untuk mengisi waktu petani melakukan :
- Menanam palawija
 - Cabai
 - Kacang panjang
 - Timun
 - Beternak;
 - Beternak Ayam dan Itik dilakukan oleh petani perempuan
 - Beternak Lembu dilakukan oleh petani laki-laki
 - Beternak kambing dilakukan secara bersama antara petani laki-laki dan perempuan
 - Berdagang dilakukan secara bersama antara petani laki-laki dan perempuan
 - Tukang bangunan
 - Jualan es keliling
 - Tukang pangkas
 - Penarik RBT/ojek
 - Membuat panganan kecil (kue, keripik)
 - Mengambil upahan cuci
 - Tambak

2. Desa Meunasah Sagoe Kecamatan Seunodon

Kalender Musim Tahun 2006

BLN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
Sesi	Tambak											
Kegiatan	Bersihkan tambak, di musim angin timur	Jemur tambak	Memasukkan air dan perawatan	Perawatan; pemupukan, pemberian pakan		Pemanenan, udang atau bandeng		Bersihkan tambak, & memasukkan bibit	Pemberian pupuk dan pakan		Pemanenan, udang atau bandeng	
Sesi	Turun ke sawah											
Kegiatan	Pemanenan (2006)									Memajak sawah, menyemai bibit, membersihkan rumput (2005)	Menanam bibit, membersihkan rumput, memupuk, semprot racun (keong, ulat, walang sangit)	Padi mulai menguning biasanya ada serangan hama (tikus & burung) saat padi mulai bunting.

Sesi	Nelayan											
Kegiatan				Hasil tangkapan laut; Tongkol	Teri, kase, ikan tali pinggang (cuale)	Udang laut						Ikan kakap (hasil tangkapan di kuala)

Keterangan :

- a. Masa jeda (waktu kosong), untuk mengisi waktu petani melakukan :
 - o Menanam palawija
 - Cabai
 - Tomat
 - Ubi Kayu
 - Gambas
 - Kacang panjang
 - Kacang tanah
 - Kacang hijau
 - Kacang kuning
 - Jagung
 - o Beternak;
 - Beternak Ayam dan Itik dilakukan oleh petani perempuan
 - Beternak Lembu dilakukan oleh petani laki-laki
 - Beternak Kerbau dilakukan oleh petani laki-laki
 - Beternak kambing dilakukan secara bersama antara petani laki-laki dan perempuan
 - o Menganyam tikar
 - o Cungkil kelapa
 - o Jualan (laki-laki dan perempuan)
 - o Nelayan (menjaring anak ikan-dilakukan oleh perempuan, memancing dilakukan oleh nelayan laki-laki)
 - o Mengambil jasa upahan (tikar, cuci pakaian, ke sawah)

Catatan:

1. Musim tanam satu tahun sekali karena di desa ini tidak memiliki irigasi (sawah tadah hujan)
2. Biasanya masyarakat mulai melakukan penanaman padi pada bulan September
3. Musim kemarau biasanya mulai terjadi dari bulan Mei s/d Agustus

Tahun 2006, sebagian masyarakat tidak turun ke sawah karena musim kemarau dan juga sawah yang belum di rehab akibat tsunami (namun mereka mengambil jasa upahan/menyewa sawah di tempat lain-desa tetangga). Hanya masyarakat dusun Pang Gadeng yang turun ke sawah karena sawahnya tidak kena tsunami

3. Desa Matang Lada Kecamatan Seunudon

Kalender Musim Tahun 2007

BLN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
Sesi	Tambak											
Kegiatan	Pemberian pupuk dan pakan	Pemanenan, udang atau bandeng (perkiraan panen 2008)	Memasukkan air dan perawatan	Jemur tambak	Memasukkan benih bandeng atau udang windu	Perawatan dan pemberian pakan dan pemupukan		Pemanenan, udang atau bandeng	Bersihkan tambak kembali, sekaligus memasukkan bibit kembali	Jemur tambak	Memasukkan benih bandeng atau udang windu	Pemberian pupuk dan pakan
Sesi	Turun ke sawah											
Kegiatan								Merencahan untuk melakukan persemaian bibit	Penanaman padi	Perawatan		

								padi (2007) karena sawah yang sedang direhab				
Sesi	Nelayan											
Kegiatan				Hasil tangkapan laut; Tongkol	Teri, kase, ikan tali pinggang (cuale)	Udang laut					Ikan kakap (hasil tangkapan di kuala)	

Keterangan :

- a. Masa jeda (waktu kosong), untuk mengisi waktu petani melakukan :
 - o Menanam palawija
 - Palawija (Semangka Tomat Cabe rawit dan cabe besar Jenis kacang-kacangan Ubi kayu Ketela Gambas Labu Timun
 - Bambu
 - Kelapa
 - Pinang
 - Pandan
 - o Beternak;
 - Beternak Ayam dan Itik dilakukan oleh petani perempuan
 - Beternak Lembu dilakukan oleh petani laki-laki
 - Beternak kambing, biri-biri dilakukan secara bersama antara laki-laki dan perempuan
 - o Muge ikan
 - o Petani garam
 - o Jualan
 - o Tukang
 - o Panjat kelapa
 - o Potong kayu
 - o Menjahit (pakaian dan bordir)
 - o Bengkel sepeda
 - o Menganyam tikar
 - o Cungkil kelapa
 - o Jualan
 - o Ambil upahan cuci baju
 - o Penjaga anak
 - o Guru (umum dan agama)

Lampiran 3



**Lembaga-Lembaga Yang Berpartisipasi
Di Desa Penelitian**

No.	Nama Lembaga	Sifat bantuan
1.	Caritas German	Fisik
2.	Vivat Fatma	Fisik & peningkatan ekonomi masyarakat
3	Pemda	Fisik & peningkatan ekonomi masyarakat
4.	IFRC	Fisik
5	BRR	Fisik
6	Save the Children	Fisik
7	Unicef	Fisik & Bantuan lainnya
8	IRD	Fisik
9	GTZ	Peningkatan ekonomi masyarakat
10	ICMC	Peningkatan ekonomi masyarakat
11	Cardi	Fisik & Peningkatan ekonomi masyarakat
12	Muslim Aid	Fisik
13	BPD	Fisik
14	PPK	Fisik & Peningkatan ekonomi
15	YEU	Fisik & Peningkatan Ekonomi
16	IOM	Fisik
17	PMI	Fisik & Bantuan lainnya
18	Aceh sepakat	Peningkatan ekonomi masyarakat
19	Cord Aid	Fisik
20	CRS	Fisik

21	ETESP	Peningkatan Ekonomi masyarakat
22	Dandim	Bantuan lainnya
No.	Nama Lembaga	Sifat bantuan
23	Kepolisian	Bantuan lainnya
24	Pemerintah Arab Saudi	Fisik
25	BRA	Fisik
26	Kelompok Embun Pagi	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
27	ADB	Fisik
28	Korem	Fisik